

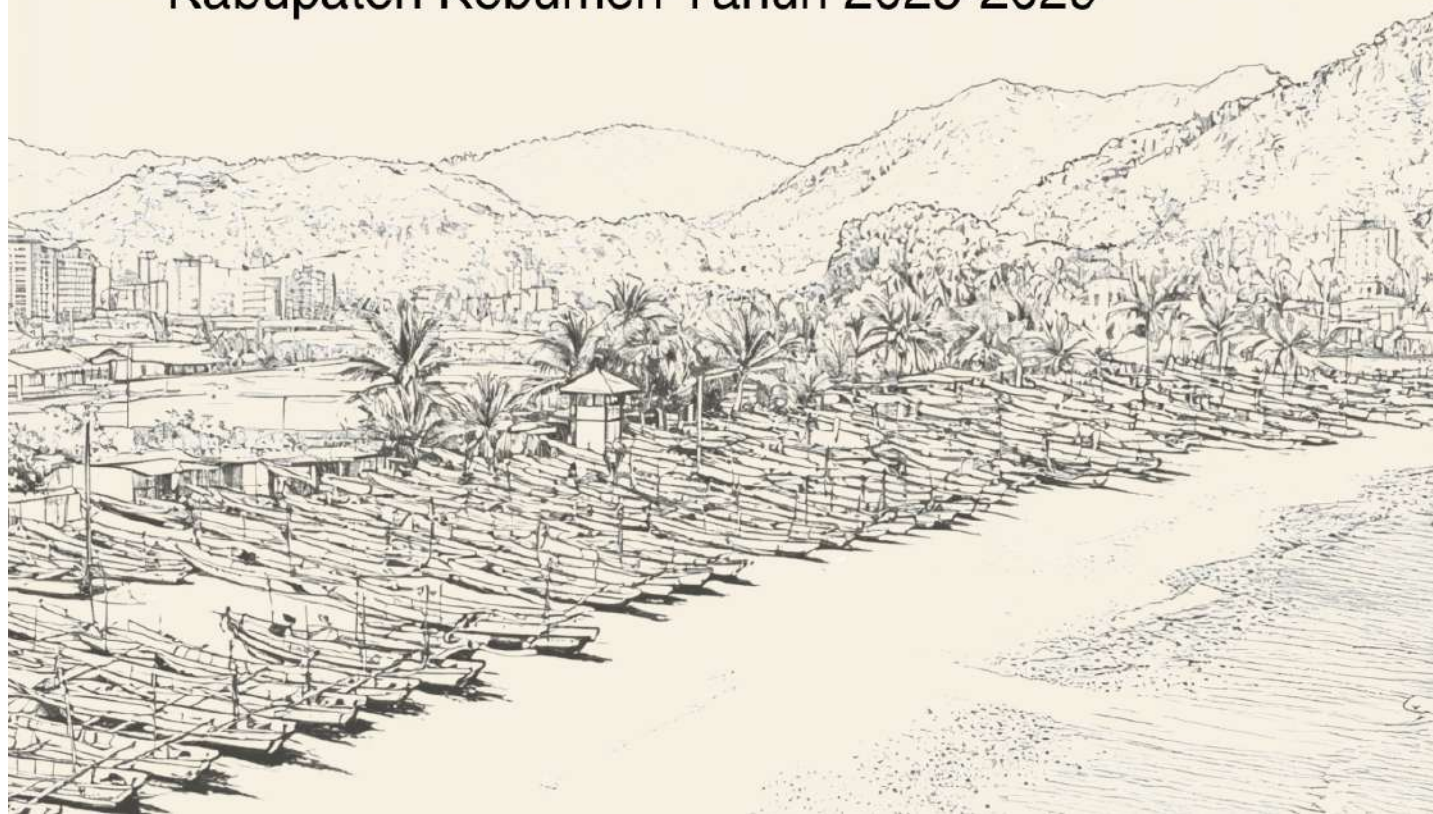


Pemerintah
Kabupaten Kebumen



RPKD

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029





SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi dalam penanganannya memerlukan langkah secara sistematis, terencana, dan bersinergi melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, perlu disusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2025-2029, perlu mengatur Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
6. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
9. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

BAB II
RPKD
Pasal 2

RPKD merupakan rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan yang memuat arah kebijakan, strategi, Program kegiatan dan Rencana Aksi Tahunan yang disertai dengan pendanaan indikatif sebagai pedoman dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2025 – 2029 yang merupakan periode I (pertama) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045.

Pasal 3

RPKD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 4

- (1) RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Profil Kemiskinan Daerah;
 - c. Bab III : Strategi Dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. Bab IV : Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. Bab V : Pemantauan Dan Evaluasi;
 - F Bab VI : Penutup.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Mei 2026
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI Rianto
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,


AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH TAHUN 2025-2029



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Metode dan Tahapan Penyusunan RPKD	4
1.5. Sistematika	7
BAB II PROFIL KEMISKINAN DAERAH.....	9
2.1. Definisi Kemiskinan	9
2.2. Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen.....	9
2.2.1. Garis Kemiskinan (P0).....	14
2.2.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	15
2.2.3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	16
2.3. Kondisi Geografis	17
2.3.1. Topografi.....	17
2.3.2. Geologi.....	18
2.3.3. Hidrologi	18
2.3.4. Kondisi Demografi.....	22
2.4. Kondisi Perekonomian	23
2.4.1. Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB)	23
2.4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	24
2.4.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	25
2.4.4. Ketimpangan Pendapatan	27
2.4.5. Inflasi	29
2.5. Analisis Karakteristik Wilayah	30
2.6. Determinan Penyebab Kemiskinan	31
2.6.1. Kondisi Pendidikan	32
2.6.2. Kondisi Kesehatan	37
2.6.3. Kondisi Infrastruktur Dasar	51
2.6.4. Konsumsi dan Ketersediaan Pangan	57
2.6.5. Kondisi Ketenagakerjaan.....	60
2.7. Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan	63
2.8. Gambaran Keuangan Daerah	64

2.8.1. Analisis Pendapatan Daerah	64
2.8.2. Analisis Arah Kebijakan Belanja Daerah	71
2.8.3. Analisis Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	74
2.8.4. Pembiayaan Non APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan	74
BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	75
3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	75
3.2. Target Tingkat Kemiskinan	97
3.3. Analisis Determinan Kemiskinan	97
3.3.1. Prioritas Intervensi Kemiskinan Bidang Konsumsi	97
3.3.2. Prioritas Intervensi Kemiskinan Bidang Kesehatan	97
3.3.3. Prioritas Intervensi Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar	98
3.3.4. Prioritas Intervensi Kemiskinan Bidang Pendidikan	98
3.4. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan	99
3.4.1. Dimensi Kemiskinan Konsumsi	99
3.4.2. Dimensi Infrastruktur Dasar	100
3.4.3. Dimensi Pendidikan	106
3.4.4. Dimensi Kesehatan	107
3.4.5. Dimensi Ketenagakerjaan	109
3.4.6. Dimensi Ketahanan Pangan	111
3.4.7. Hasil Komposit	111
3.5. Penyusunan <i>Theory of Change</i> (ToC)	115
3.5.1. ToC Bidang Kesehatan	115
3.5.2. ToC Bidang Pendidikan	116
3.5.3. ToC Bidang Infrastruktur	117
3.5.4. ToC Bidang Sosial	118
BAB IV RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN	119
4.1. Rekapitulasi Program Penanggulangan Kemiskinan	119
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI	124
5.1. Alur Pemantauan dan Evaluasi	124
5.2. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi	126
5.3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	128
BAB VI PENUTUP	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Tahapan Penyusunan RPKD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 5

Gambar II.1. Grafik Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 9

Gambar II.2. Posisi Relatif Kemiskinan Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah Tahun 2024 10

Gambar II.3. Grafik Penurunan Jumlah Penduduk Miskin 10

Gambar II.4. Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023 12

Gambar II.5. Garis Kemiskinan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 15

Gambar II.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)..... 16

Gambar II.7. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 17

Gambar II.8. Peta Administrasi Kabupaten Kebumen Sumber: Kanwil BPN Jawa Tengah, 2023 17

Gambar II.9. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen 24

Gambar II.10. Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka 25

Gambar II.11. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 25

Gambar II.12. Grafik Perkembangan HLS, RLS, dan UHH..... 27

Gambar II.13. APK Tingkat SD/Sederajat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah..... 35

Gambar II.14. APK Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah..... 35

Gambar II.15. APM Tingkat SD/Sederajat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah..... 36

Gambar II.16. APM Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten Kebumen, 37

Gambar II.17 Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 38

Gambar II.18. Angka Kematian Bayi dan Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 40

Gambar II.19. Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk Tahun 2020-2024 44

Gambar II.20. Angka Stunting Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 45

Gambar II.21. Persentase Ibu Hamil KEK Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 46

Gambar II.22. Angka Kesakitan (Morbiditas) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 48

Gambar II.23. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Dan Persentase Penduduk
Miskin 71

Gambar II.24 Anggaran Kemiskinan Tahun 2020-2024 74

Gambar III.1. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga
Miskin 99

Gambar III.2. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga
Miskin 100

Gambar III.3. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga
Miskin 101

Gambar III.4. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Rumah Tidak
Layak Huni 101

Gambar III.5. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga
Miskin dan Persentase Akses Air Minum Layak per Kecamatan..... 102

Gambar III.6. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Akses Air
Minum Layak..... 102

Gambar III.7. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga
Miskin dan Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan per Kecamatan 103

Gambar III.8. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Rasio Sarana Prasarana
Penyedia Pangan..... 103

Gambar III.9. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga
Miskin dan Rasio Jumlah Pasar terhadap Jumlah Desa 104

Gambar III.10. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Rasio Jumlah Pasar
terhadap Jumlah Desa..... 104

Gambar III.11. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga
Miskin dan Rata-rata Jumlah Industri Mikro Kecil per Kecamatan..... 105

Gambar III.12. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Rata-rata Jumlah
Industri Mikro Kecil 105

Gambar III.13. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga
Miskin dan Rasio Jumlah SMP terhadap Jumlah Desa per Kecamatan
..... 106

Gambar III.14. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga
Miskin 106

Gambar III.15. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga
Miskin dan Rata-rata Jumlah Bayi Gizi Kurang per Kecamatan 107

Gambar III.16. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Rata-rata Jumlah Bayi
Gizi Kurang..... 108

Gambar III.17. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin dan..... 109

Gambar III.18. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin dan..... 109

Gambar III.19. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin 110

Gambar III.20. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Kepala Keluarga 110

Gambar III.21. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan 111

Gambar III.22. Peta Prioritas Wilayah Penanggulangan Kemiskinan 112

Gambar III.23. ToC Bidang Kesehatan 115

Gambar III. 24. ToC Bidang Pendidikan 116

Gambar III. 25. ToC Bidang Infrastruktur 117

Gambar III.26. ToC Bidang Sosial 118

Gambar V.1. Alur Pemantauan dan Evaluasi 125

Gambar V.2. Alur Monitoring dan Evaluasi..... 126

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2023-2024 11

Tabel II.2. Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota 12

Tabel II.3. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2024 (Data Agregat) 13

Tabel II.4. Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen 20

Tabel II.5. Jumlah Sebaran Mata Air Dirinci Menurut Kecamatan..... 20

Tabel II.6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 22

Tabel II.7. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi di Lingkup Jawa Tengah per TW III Tahun 2024 24

Tabel II.8. Posisi Relatif IPM Kab/Kota Tahun 2024 Lingkup Provinsi Jawa Tengah 26

Tabel II.9. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun) 27

Tabel II.10. Rasio Gini Kabupaten Kebumen, Beberapa Kabupaten Tetangga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 28

Tabel II.11. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 29

Tabel II.12. Inflasi Purwokerto, Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 30

Tabel II.13. Klasifikasi Wilayah Desa per Kecamatan di Kabupaten Kebumen 30

Tabel II.14. Capaian Angka Partisipasi Sekolah Selama Tahun 32

Tabel II.15. Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen 33

Tabel II.16. Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Kebumen 34

Tabel II.17. Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 39

Tabel II.18. Jumlah kasus kematian bayi per kecamatan Tahun 2020-2024 41

Tabel II.19. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 42

Tabel II.20. Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024..... 46

Tabel II.21. Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024..... 47

Tabel II.22. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024..... 48

Tabel II.23. Kasus Tuberkulosis, HIV, DBD dan Malaria di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024..... 50

Tabel II.24. Penyakit Tidak Menular Kebumen Tahun 2020-2024..... 50

Tabel II.25. Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2024 52

Tabel II.26. Capaian Akses Sanitasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2024 53

Tabel II.27. Status Backlog Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2024 54

Tabel II.28. Perkembangan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2024 55

Tabel II.29. Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 56

Tabel II.30. Penanganan Rumah Korban Bencana Tahun 2020 – 2024..... 57

Tabel II.31. Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024..... 58

Tabel II.32. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kebumen per Kelompok Pangan Tahun 2020-2024..... 59

Tabel II.33. Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020- 2024..... 59

Tabel II.34. Capaian Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024..... 60

Tabel II.35. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024..... 61

Tabel II.36. Potret Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 61

Tabel II.37. Potret Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen 2024 Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 62

Tabel II.38. Karakteristik Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 62

Tabel II.39. Karakteristik Penduduk Bekerja di Kabupaten Kebumen Tahun 2024..... 62

Tabel II.40. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024 65

Tabel II.41. Pengelompokan Kabupaten/kota Berdasarkan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan Persentase Penduduk Miskin 71

Tabel II.42. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2024 73

Tabel III.1. Matrik Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2030 78

Tabel III.2. Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen 97

Tabel III.3. Komposit Prioritas Wilayah Penanggulangan Kemiskinan Setiap Dimensi Kemiskinan..... 113

Tabel IV.1. Rekapitulasi Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Strategi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030 120

Tabel IV.2. Rekapitulasi Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kelompok Aktivitas Langsung, Penunjang dan Tidak Langsung Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030 123

Tabel V.1. Instrumen Pemantauan..... 126

Tabel V.2. Instrumen Evaluasi..... 127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi topik hangat dan isu utama dalam pembangunan baik pada tingkat nasional maupun daerah kabupaten/kota. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ditetapkan tiga sasaran utama pembangunan nasional yang salah satunya adalah penurunan tingkat kemiskinan (Lutfhia, 2025). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Hadi et al., 2024). Selain itu, kemiskinan juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, budaya, politik, lingkungan, pendidikan dan kesejahteraan.

Selama ini upaya pengentasan kemiskinan termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui berbagai program seperti perlindungan sosial, bantuan sosial dan program pembangunan lain yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam realitasnya upaya yang telah dilakukan masih perlu ditingkatkan mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Selain itu, ketidakefektifan strategi penanggulangan kemiskinan juga dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antarinstitusi dalam penanganan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di atas, diperlukan adanya dokumen yang memuat kebijakan, strategi, program yang lebih komprehensif dan tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan karakteristik kemiskinan di masing-masing wilayah. Hal ini dilakukan agar intervensi yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun geografis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dalam Pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu tugas dari Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah menyusun dan menyiapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang diperlukan sebagai

upaya dalam mengurai persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Untuk itu perlu disusun RPKD sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan selama 2025 – 2029 guna mewujudkan sinergitas kebijakan dan program kegiatan di Kabupaten Kebumen.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya penanggulangan kemiskinan termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) terutama tujuan pertama terkait penanggulangan kemiskinan.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RPKD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 10. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 12. Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012

- tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaga Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219); dan
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227).

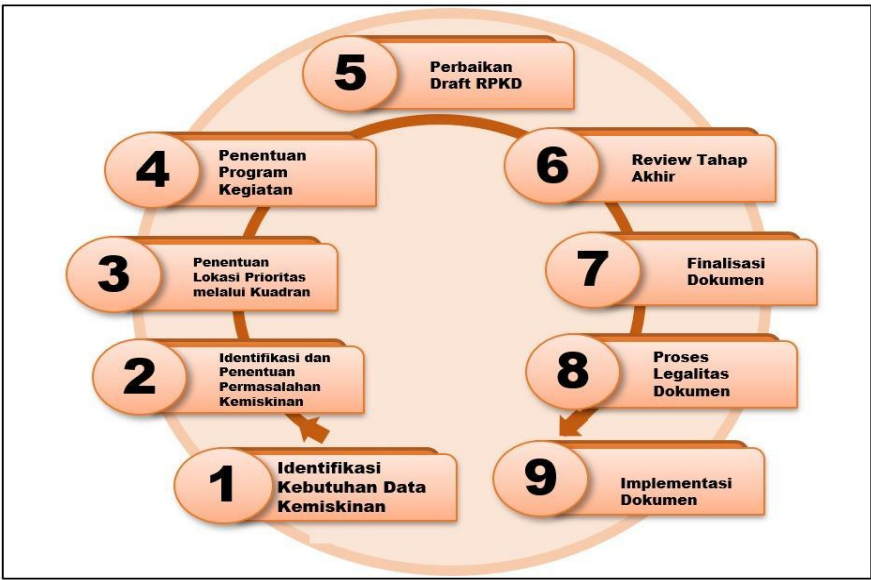
1.4. Metode dan Tahapan Penyusunan RPKD

Penyusunan dokumen RPKD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, mendasari kajian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kebumen serta Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RPKD dilakukan untuk mempertajam dokumen RPJMD dengan metode:

- 1. Pendekatan substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah terkait penanggulangan kemiskinan.** Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah memuat isu percepatan penanggulangan kemiskinan. Strategi RPKD akan mempertajam dan memperkaya substansi dari setiap dokumen perencanaan dan penganggaran reguler daerah dengan cara memastikan seluruh substansi dari setiap bagian dalam RPKD dapat mengisi dan mempertajam substansi terkait isu percepatan penanggulangan kemiskinan.
- 2. Pendekatan substansi terhadap tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.** Setiap tahap

perencanaan pada dokumen RPKD dan Renja Perangkat Daerah telah berfokus pada implementasi penanggulangan kemiskinan. Strategi RPKD dapat mengisi, memperkaya dan mempertajam tahapan dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan dan reguler daerah (RPKD dan Renja Perangkat Daerah).

3. Pendekatan Prioritas Wilayah. Penyusunan RPKD telah memetakan sasaran prioritas wilayah dan bentuk intervensi berdasarkan analisis indikator utama dan indikator pendukung. Tahapan penyusunan RPKD tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPKD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Tahapan penyusunan RPKD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 dilakukan dengan pentahapan:

1. Identifikasi Kebutuhan Data Kemiskinan

Tahap ini dilakukan dengan melakukan pemetaan kebutuhan data yang terkait dengan karakteristik dan penyebab kemiskinan, sekaligus kebutuhan data indikator makro dan mikro yang menjadi parameter utama dan pendukung yang berpengaruh terhadap kemiskinan.

2. Identifikasi dan Penentuan Permasalahan Kemiskinan dan Penyusunan *Theory of Change*.

Tahap identifikasi dan penentuan permasalahan/ pembedangan kemiskinan dilakukan dengan melihat karakteristik wilayah berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bapperida Kabupaten Kebumen yang dikategorikan dalam beberapa karakteristik tertentu. Hasil analisis karakteristik wilayah selanjutnya disimpulkan, apa permasalahan/pembedangan yang menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Selanjutnya dari permasalahan/pembedangan berupaya menemukan akar masalah penyebab kemiskinan yang

dihadapi pada setiap bidang. Akar masalah tersebut dapat diperoleh melalui analisis dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan (*supply side*) dan aspek pemanfaatan (*demand side*). Analisis ini dilakukan untuk mencari indikator yang lebih rinci (indikator pendukung) dari indikator utama bidang yang telah dianalisis, yaitu indikator pada level kegiatan atau intervensi. Tujuannya adalah mendapatkan indikator yang dapat digunakan untuk menentukan intervensi prioritas dari masalah utama bidang.

3. Penentuan Lokasi Prioritas melalui Kuadran

Penentuan lokasi prioritas dilakukan dengan cara menganalisis prioritas intervensi wilayah. Daerah akan terbantu dalam menetapkan lokasi prioritas intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran. Penentuan lokasi prioritas dilakukan menggunakan alat analisis kuadran, yaitu menemukan kombinasi lokasi yang bermasalah menurut indikator utama dan indikator pendukung untuk kemudian ditetapkan sebagai lokasi prioritas kuadran 1, 2, 3 dan 4.

4. Penentuan Program Kegiatan

Penentuan program kegiatan dilakukan melalui tinjauan kebijakan pelaksanaan di daerah (pemetaan program kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan) menyangkut ketepatan dan komplementaritasnya. Ketepatan program dilakukan untuk menilai kesesuaian sasaran pada individu, kelompok, keluarga, atau rumah tangga. Selain itu ketepatan juga dapat dilihat yang menyangkut tepat jumlah, tepat waktu dan mempunyai nilai manfaat. Sementara komplementaritas program dilihat dengan tujuan utama agar masyarakat paling miskin dipastikan mendapatkan seluruh program terutama program perlindungan sosial.

5. Perbaikan Draft RPKD

Tahap ini dilakukan untuk menyempurnakan keseluruhan bab rancangan RPKD setelah memperoleh dan mengakomodir saran masukan dari berbagai sumber.

6. Reviu Tahap Akhir

Review dilakukan untuk memastikan RPKD sudah memenuhi kaidah penyusunan dan telah mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

7. Finalisasi Dokumen

Finalisasi dokumen merupakan tahapan akhir setelah dilakukan reviu dan cek secara keseluruhan untuk memastikan semua substansi sudah terintegrasi dalam RPKD.

8. Proses Legalitas Dokumen

Proses legalitas RPKD dalam bentuk Peraturan Bupati dilakukan melalui fasilitasi Bagian Hukum untuk selanjutnya dilakukan reviu oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

9. Implementasi Dokumen

RPKD berlaku apabila telah mendapat persetujuan pengesahan dari Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati, selanjutnya implementasi RPKD menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

1.5. Sistematika

RPKD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dasar hukum serta sistematika penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

2. Bab II Profil Kemiskinan Daerah

Berisi tentang kondisi geografis daerah yang berkorelasi dengan kemiskinan, anggaran intervensi kemiskinan yang bersumber dari APBD maupun yang didanai dari Non APBD.

3. Bab III Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan, fokus strategi penanggulangan kemiskinan, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kebumen sesuai Visi dan Misi, target kemiskinan daerah, serta lokasi prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan

4. Bab IV Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan

Berisi uraian tentang matrik rencana aksi daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang berisi strategi, aktivitas riil, target tahunan serta lokasi prioritas.

5. Bab V Pemantauan dan Evaluasi

Berisi uraian instrumen pemantauan dan evaluasi.

6. Bab VI Penutup

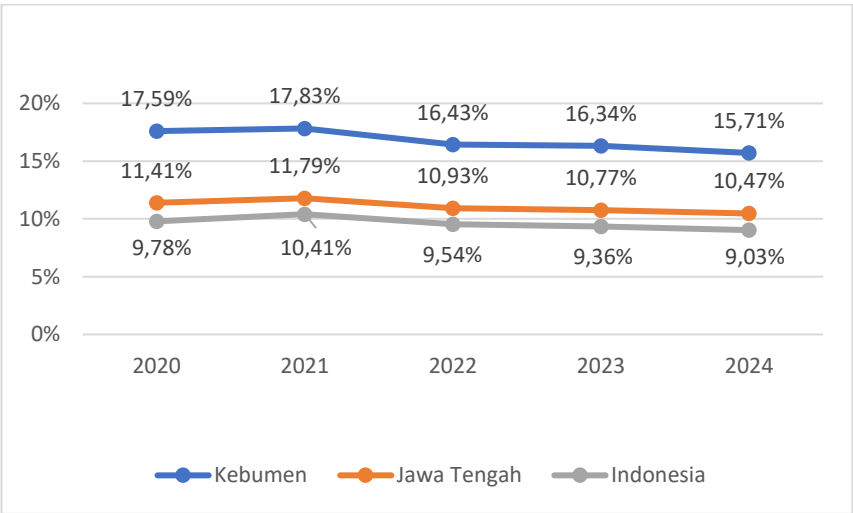
BAB II
PROFIL KEMISKINAN DAERAH

2.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu isu mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan konsep kemiskinan yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar pangan maupun non pangan [1]. Selain itu kemiskinan juga dipengaruhi oleh indikator makro lain seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB dan PDRB per kapita, inflasi, maupun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

2.2. Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen

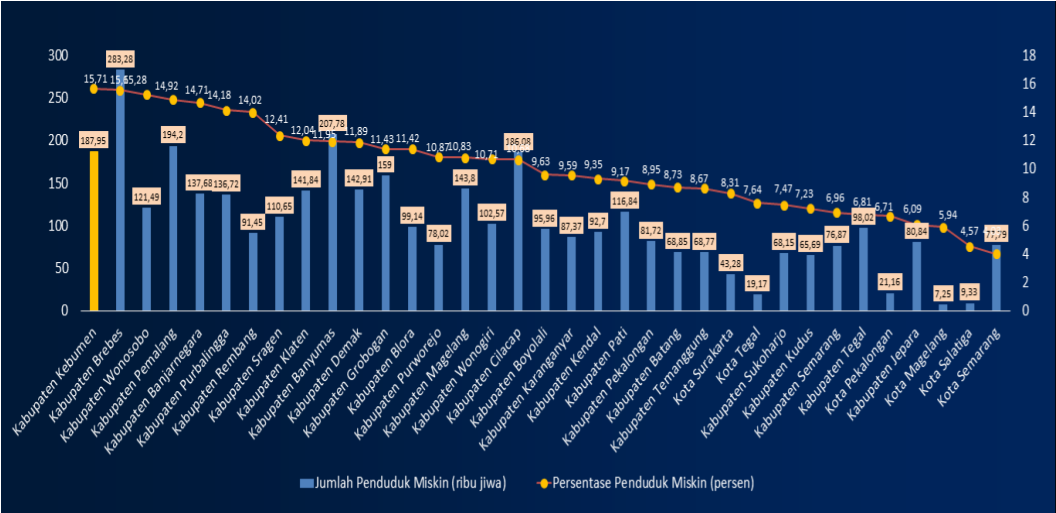
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen cukup tinggi. Namun demikian, pada kondisi normal angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen cenderung turun. Tahun 2022 pasca pandemi covid-19 mulai *recovery*, jumlah penduduk miskin kembali turun. Rata-rata penurunan angka kemiskinan per tahun dari 2020-2024 di Kabupaten Kebumen sebesar 0,47%, dibandingkan Provinsi Jawa Tengah 0,24% dan nasional 0,19%. Jika dilihat perbandingan kinerja penurunan angka kemiskinan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik.



Gambar II.1. Grafik Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

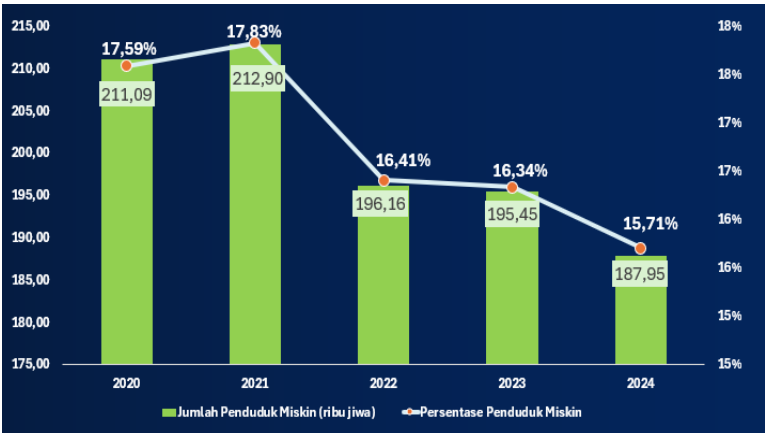
Selanjutnya, jika dilihat dari posisi relatif, angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah pada

tahun 2024 sebagaimana tersaji pada gambar berikut ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen masih menghadapi tantangan yang lebih besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga diperlukan perhatian dan strategi kebijakan yang lebih terfokus serta berkelanjutan.



Gambar II.2. Posisi Relatif Kemiskinan Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah Tahun 2024
 Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus menunjukkan hasil yang membaik. Tingkat kemiskinan sempat meningkat dari 17,59% pada tahun 2020 menjadi 17,83% pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi seiring membaiknya perekonomian pasca pandemi, tingkat kemiskinan tahun 2024 menurun menjadi 15,71%. Secara umum kinerja penurunan tingkat kemiskinan setiap tahun hampir mencapai 100% jika dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen periode 2020-2024, dari 211,09 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 187,95 ribu jiwa pada tahun 2024, atau berkurang 23,14 ribu jiwa. Jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin bisa dilihat pada Gambar II.3.



Gambar II.3. Grafik Penurunan Jumlah Penduduk Miskin
 Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

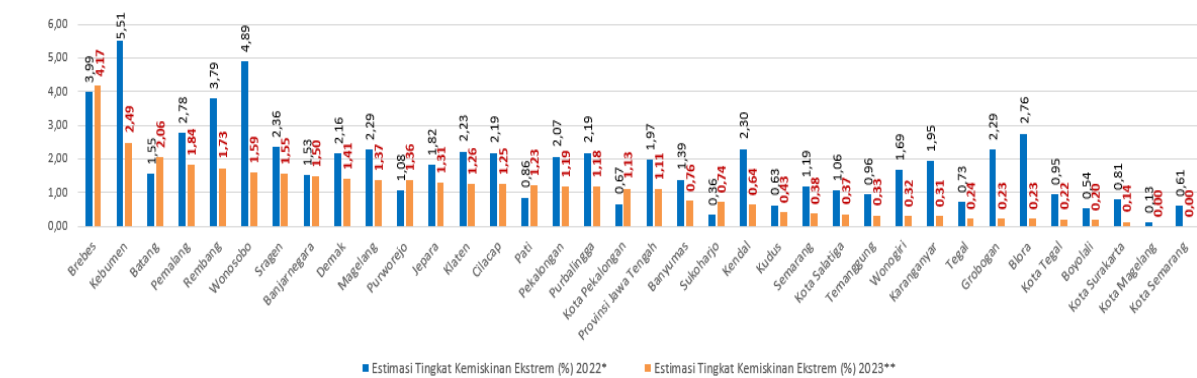
Telah banyak program dan kegiatan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sinkronisasi program dan kegiatan terus dilakukan dengan harapan program dan kegiatan menghasilkan dampak yang positif dalam penanggulangan kemiskinan. Dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen menempati posisi ke 3 dalam kinerja penurunan angka kemiskinan, yaitu dari 16,34% pada tahun 2023 menjadi 15,71 pada tahun 2024 atau menurun sebesar 0,63%. Hal ini menjadi pemicu bagi Pemerintah Kabupaten untuk menanggulangi kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

Tabel II.1. Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2023-2024

No	Prov/Kab/Kota	2023	2024	Penurunan
1	Kabupaten Purbalingga	14,99	14,18	-0,81
2	Kabupaten Pekalongan	9,67	8,95	-0,72
3	Kabupaten Kebumen	16,34	15,71	-0,63
4	Kabupaten Temanggung	9,26	8,67	-0,59
5	Kabupaten Banyumas	12,53	11,95	-0,58
6	Kabupaten Jepara	6,61	6,09	-0,52
7	Kabupaten Tegal	7,3	6,81	-0,49
8	Kabupaten Purworejo	11,33	10,87	-0,46
9	Kabupaten Sragen	12,87	12,41	-0,46
10	Kabupaten Cilacap	10,99	10,68	-0,31
11	Kabupaten Wonosobo	15,58	15,28	-0,30
12	PROVINSI JAWA TENGAH	10,77	10,47	-0,30
13	Kabupaten Grobogan	11,72	11,43	-0,29
14	Kabupaten Klaten	12,28	12,04	-0,24
15	Kabupaten Wonogiri	10,94	10,71	-0,23
16	Kabupaten Semarang	7,17	6,96	-0,21
17	Kota Semarang	4,23	4,03	-0,20
18	Kabupaten Karanganyar	9,79	9,59	-0,20
19	Kabupaten Banjarnegara	14,9	14,71	-0,19
20	Kabupaten Batang	8,92	8,73	-0,19
21	Kabupaten Boyolali	9,81	9,63	-0,18
22	Kabupaten Brebes	15,78	15,6	-0,18
23	Kota Magelang	6,11	5,94	-0,17
24	Kabupaten Rembang	14,17	14,02	-0,15
25	Kabupaten Pati	9,31	9,17	-0,14
26	Kabupaten Magelang	10,96	10,83	-0,13
27	Kota Surakarta	8,44	8,31	-0,13
28	Kabupaten Demak	12,01	11,89	-0,12
29	Kabupaten Sukoharjo	7,58	7,47	-0,11
30	Kabupaten Pemalang	15,03	14,92	-0,11
31	Kota Pekalongan	6,81	6,71	-0,10
32	Kota Salatiga	4,66	4,57	-0,09
33	Kabupaten Blora	11,49	11,42	-0,07
34	Kabupaten Kendal	9,39	9,35	-0,04
35	Kota Tegal	7,68	7,64	-0,04
36	Kabupaten Kudus	7,24	7,23	-0,01

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yaitu setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan *absolute poverty measure* yang konsisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antarwaktu. Tingkat kemiskinan ekstrem nasional tahun 2021 sebesar 4% dari total jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan sebesar 3,02% dari semula 5,51% pada tahun 2022 menjadi 2,49% pada tahun 2023.



Gambar II.4. Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023
 Sumber: Kemenko PMK, 2024

Pada tahun 2024, data kemiskinan ekstrem Kabupaten Kebumen turun menjadi 1,25%. Dari data tersebut angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Kebumen masih lebih rendah dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Wonosobo. Data persentase penduduk miskin ekstrem di lingkup Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2. Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota

PROV		KABUPATEN/KOTA			2024	
2023	2024	2023	2024	NAMA	Nilai Estimasi PO Ekstrem	Relative Standard Error (RSE)
33	33	3301	3301	Cilacap	1,27708	14,102
33	33	3302	3302	Banyumas	1,02180	15,209
33	33	3303	3303	Purbalingga	1,17217	13,694
33	33	3304	3304	Banjarnegara	1,08793	19,336
33	33	3305	3305	Kebumen	1,25903	14,970
33	33	3306	3306	Purworejo	1,39510	11,813
33	33	3307	3307	Wonosobo	1,25912	14,944
33	33	3308	3308	Magelang	1,27576	14,920
33	33	3309	3309	Boyolali	0,83936	14,370
33	33	3310	3310	Klaten	0,67119	16,530
33	33	3311	3311	Sukoharjo	0,41903	17,178
33	33	3312	3312	Wonogiri	0,81100	14,269
33	33	3313	3313	Karanganyar	0,39143	20,616
33	33	3314	3314	Sragen	2,26607	14,245
33	33	3315	3315	Grobogan	0,88543	24,083
33	33	3316	3316	Blora	0,89437	14,861
33	33	3317	3317	Rembang	3,18451	13,403
33	33	3318	3318	Pati	0,61442	14,736
33	33	3319	3319	Kudus	0,28488	23,068
33	33	3320	3320	Jepara	0,83560	14,411

PROV		KABUPATEN/KOTA			2024	
2023	2024	2023	2024	NAMA	Nilai Estimasi PO Ekstrem	Relative Standard Error (RSE)
33	33	3321	3321	Demak	1,21628	13,974
33	33	3322	3322	Semarang	0,31877	21,668
33	33	3323	3323	Temanggung	0,44055	17,443
33	33	3324	3324	Kendal	0,48639	15,863
33	33	3325	3325	Batang	0,40465	18,042
33	33	3326	3326	Pekalongan	0,51277	15,585
33	33	3327	3327	Pemalang	0,92266	13,968
33	33	3328	3328	Tegal	0,86528	14,232
33	33	3329	3329	Brebes	0,74540	16,388
33	33	3371	3371	Kota Magelang	0,60992	15,530
33	33	3372	3372	Kota Surakarta	0,81432	14,368
33	33	3373	3373	Kota Salatiga	0,33608	19,620
33	33	3374	3374	Kota Semarang	0,30806	19,971
33	33	3375	3375	Kota Pekalongan	0,37549	17,769
33	33	3376	3376	Kota Tegal	0,67506	15,647

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Selain BPS, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendiknas) juga mengeluarkan data kemiskinan ekstrem yang bersumber dari pendataan BKKBN yang dilengkapi dengan peringkat kesejahteraan penduduk/rumah tangga yang disebut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE ditujukan untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi pensasaran program kemiskinan, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin yang belum mendapat program (*exclusion error*). Pada tahun 2024 data P3KE Kabupaten Kebumen terdiri dari 190.948 data keluarga dan 719.110 data individu. Selanjutnya, dari data tersebut dilakukan verifikasi dan validasi di tingkat desa/kelurahan untuk kemudian ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah sebagai data pensasaran penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem.

Tabel II.3. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2024 (Data Agregat)

NO	KECAMATAN	INDIVIDU				KELUARGA			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	ADIMULYO	5.523	3.601	3.041	3.893	1.203	918	902	1.575
2	ALIAN	17.231	8.633	5.928	6.078	3.577	2.153	1.654	2.122
3	AMBAL	16.180	8.669	6.228	6.519	3.614	2.277	1.811	2.338
4	AYAH	8.911	6.968	5.653	6.711	1.896	1.716	1.507	2.101
5	BONOROWO	4.085	2.329	1.779	2.184	918	620	555	915

NO	KECAMATAN	INDIVIDU				KELUARGA			
		1	2	3	4	1	2	3	4
6	BUAYAN	14.076	8.288	6.321	6.972	3.204	2.185	1.881	2.544
7	BULUSPESANTREN	12.714	7.886	6.068	6.624	2.777	1.974	1.737	2.396
8	GOMBONG	6.187	3.916	3.254	4.130	1.391	1.004	926	1.530
9	KARANGANYAR	6.707	3.881	3.323	3.792	1.550	1.038	1.019	1.446
10	KARANGGAYAM	19.757	8.241	5.905	5.587	4.480	2.240	1.794	1.998
11	KARANGSAMBUNG	13.301	6.717	4.668	4.751	2.915	1.750	1.352	1.673
12	KEBUMEN	22.656	13.275	9.595	10.071	4.707	3.170	2.503	3.101
13	KLIRONG	14.154	8.268	6.198	6.437	3.119	2.115	1.727	2.171
14	KUTOWINANGUN	11.155	5.408	4.038	4.571	2.447	1.396	1.162	1.716
15	KUWARASAN	8.314	5.343	4.230	4.731	1.768	1.315	1.141	1.562
16	MIRIT	11.676	6.831	5.101	5.645	2.601	1.799	1.530	2.203
17	PADURESO	4.164	2.221	1.744	1.815	989	634	551	734
18	PEJAGOAN	12.663	6.631	4.595	5.607	2.706	1.648	1.269	1.860
19	PETANAHAN	11.763	7.638	5.954	6.623	2.589	1.967	1.710	2.298
20	PREMBUN	5.558	3.059	2.288	3.005	1.235	795	707	1.236
21	PONCOWARNO	4.899	2.700	1.938	1.887	1.021	689	561	738
22	PURING	12.361	8.454	6.401	6.825	2.760	2.170	1.868	2.393
23	ROWOKELE	14.221	6.531	5.021	5.057	3.262	1.758	1.527	1.875
24	SADANG	6.448	3.302	2.200	2.170	1.518	902	682	765
25	SEMPOR	19.636	7.927	6.083	6.196	4.462	2.098	1.798	2.202
26	SRUWENG	14.171	7.204	5.272	5.971	3.047	1.830	1.512	2.153
JUMLAH		298.511	163.921	122.826	133.852	65.756	42.161	35.386	47.645
		719.110				190.948			

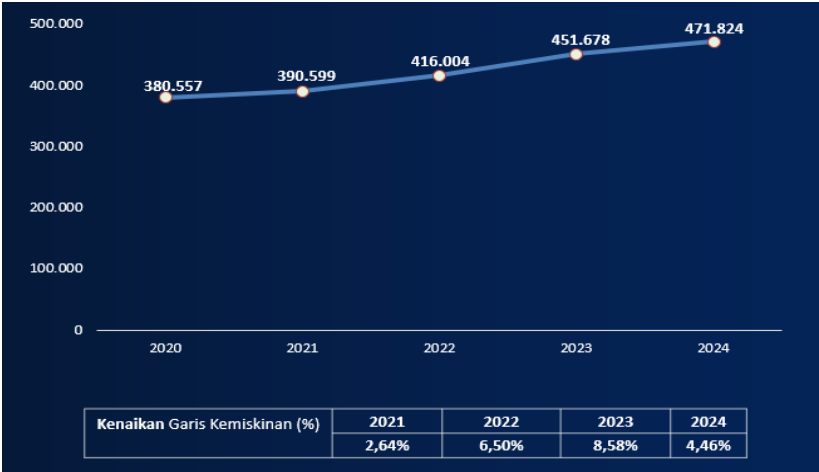
Sumber: Kemenko PMK, 2024

2.2.1. Garis Kemiskinan (PO)

Garis kemiskinan adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin dan merencanakan program untuk menanggulangi kemiskinan. Kenaikan garis kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan garis kemiskinan.

Selama kurun 5 (lima) tahun terakhir, garis kemiskinan Kabupaten Kebumen terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, garis kemiskinan Kabupaten Kebumen sebesar Rp390.599 (kapita/bulan) atau meningkat Rp10.042 (kapita/bulan) dari tahun 2020. Tahun 2022, garis kemiskinan Kabupaten Kebumen naik menjadi Rp416.004 atau bertambah Rp25.045 dari tahun 2021. Selanjutnya pada 2023 garis kemiskinan Kabupaten Kebumen kembali meningkat sebesar Rp35.674 menjadi Rp451.678 (kapita/bulan). Tahun 2024, garis kemiskinan meningkat sebesar

Rp20.146 (kapita/bulan). Selama periode tahun 2020-2024, kenaikan garis kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 8,58%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar II.5.



Gambar II.5. Garis Kemiskinan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

2.2.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan atau jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit.

Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Kebumen mengalami dinamika (fluktuatif) tiap tahun dari 2021-2024 dan selalu berada di atas level angka Provinsi Jawa Tengah dan angka nasional. Tahun 2021, Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Kebumen sebesar 3,24 atau naik 0,62 poin dari tahun sebelumnya dan naik kembali pada tahun 2022 menjadi 3,41. Tahun 2023 tingkat kedalaman kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,52 poin atau menjadi 2,89. Secara keseluruhan, tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 5 tahun terakhir paling tinggi pada tahun 2022 yakni sebesar 3,41 dan paling rendah pada tahun 2024 sebesar 2,35. Kenaikan paling tinggi pada tahun 2020-2021 yakni sebesar 0,62.



Gambar II.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

2.2.3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

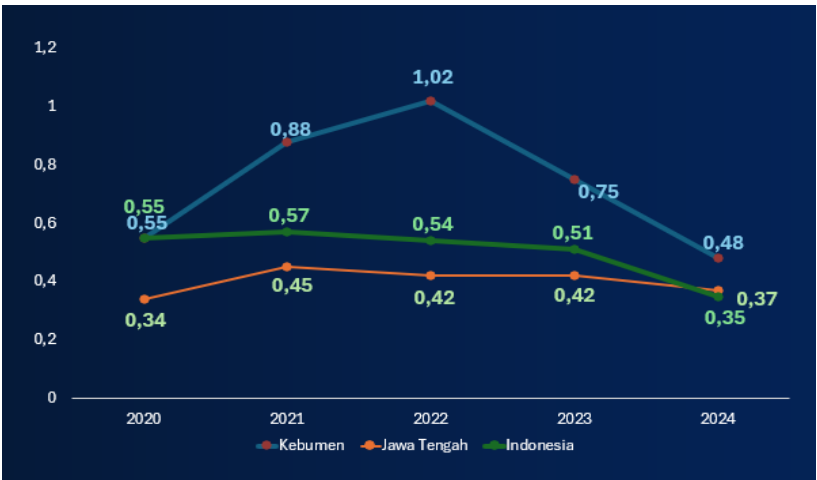
Indeks keparahan kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini juga dikenal sebagai P2 (*Proverty Severity Index-P2*). Penurunan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan antar penduduk miskin semakin turun atau jarak pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyempit.

Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) adalah indikator yang sangat penting untuk memahami keparahan dan ketidaksetaraan dalam kemiskinan. P2 adalah rata-rata kuadrat dari kesenjangan (*gap*) antara pengeluaran atau pendapatan individu miskin dengan garis kemiskinan dinormalisasi dengan garis kemiskinan. Dengan membobotkan kesenjangan secara kuadrat, P2 menekankan kondisi penduduk yang sangat miskin (ekstrem) sehingga dapat digunakan untuk menilai seberapa dalam dan tidak setara kondisi ekonomi di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran penduduk miskin.

Berdasarkan Gambar II.7, pada tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Kebumen naik sebesar 0,33 poin atau menjadi 0,88 dan kembali mengalami kenaikan sampai titik 1,02. Pada tahun 2023, P2 kembali mengalami penurunan sebesar 0,27 atau menjadi 0,75. Secara keseluruhan P2 Kabupaten Kebumen kurun waktu 5 tahun terakhir paling tinggi pada tahun 2022 yakni sebesar 1,02 dan paling rendah pada tahun 2024 sebesar 0,48. Penurunan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan antar penduduk miskin semakin turun

atau jarak pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyempit.

Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Kebumen berada pada posisi lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat keparahan kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kabupaten Kebumen paling rendah dari rata-rata Nasional dan Jawa Tengah.

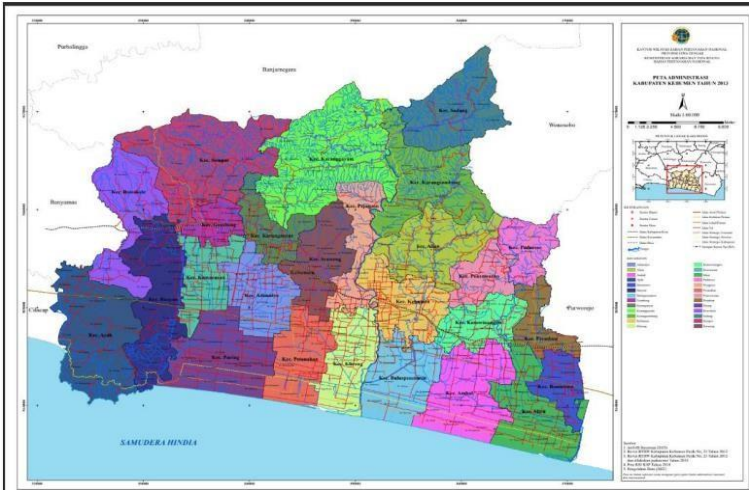


Gambar II.7. Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2)
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

2.3. Kondisi Geografis

2.3.1. Topografi

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan jarak ke Pusat Ibu Kota Provinsi sepanjang 162 km. Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 128.111.50 hektar atau 1.281.115 km² dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Ditinjau secara geografis, wilayah Kabupaten Kebumen terletak antara 109°33'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan.



Gambar II.8. Peta Administrasi Kabupaten Kebumen
Sumber: Kanwil BPN Jawa Tengah, 2023

2.3.2. Geologi

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah di Pulau Jawa yang tersusun oleh batuan Pra-Tersier (batuan tertua di Jawa berumur lebih dari 60 juta tahun yang lalu) dengan kondisi geologi yang sangat kompleks. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen dapat diketahui bahwa batuan di daerah ini mulai dari yang tertua (Paleosen) hingga termuda (Pliosen) terdiri dari:

1. Kompleks Melange Luk Ulo yang berupa bongkah-bongkah batuan Pra-Tersier dengan massa dasar serpih hitam (berumur Kapur Atas);
2. Formasi Karangsambung yang tersusun oleh batu lempung bersisik dengan bongkah batu gamping, konglomerat, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Eosen). Dalam formasi ini terdapat pula batu gamping terumbu yang berupa olistolit;
3. Formasi Totogan yang tersusun oleh breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Oligo-Miosen);
4. Formasi Waturanda yang tersusun oleh batu pasir kasar, makin ke atas berubah menjadi breksi dengan komponen andesit, basal dan massa dasar batu pasir tuf. Dalam formasi ini terdapat anggota tuf yang tersusun oleh perselingan tuf kaca, tuf kristal, batu pasir gampingan dan napal tufaan (berumur Miosen Awal);
5. Formasi Penosogan yang terdiri dari perselingan batu pasir gampingan, batu lempung, tuf, napal dan kalkarenit (berumur Miosen Tengah);
6. Diabas ialah batuan beku intrusi hasil aktivitas vulkanik (Miosen Tengah);
7. Formasi Halang yang tersusun oleh perselingan batu pasir, batu gamping, napal dan tuf dengan sisipan breksi (berumur Pliosen);
8. Formasi Peniron yang terdiri dari breksi dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping, serta massa dasar batu pasir tufan bersisipan tuf;
9. Endapan Pantai yang berupa pasir lepas; dan
10. Alluvium yang berupa lempung, lanau, pasir, kerikil dan kerakal.

2.3.3. Hidrologi

Secara hidrologis, sumber daya air di Kabupaten Kebumen adalah berasal dari mata air, sungai, danau/waduk/bendungan,

rawa dan air tanah. Daerah Aliran Sungai (DAS) Luk Ulo Hulu merupakan salah satu DAS yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo. Wilayah Kabupaten Kebumen dialiri oleh banyak sungai, yaitu Sungai Luk Ulo, Kali Cicingguling, Kali Ijo, Kali Karanganyar, Kali Kedungbener, Kali Jatinegara, Kali Wawar, Kali Sidomukti, Kali Kretek, Kali Kenteng, Kali Cacaban, Kali Gebang, Kali Kemit, Kali Rama, Kali Cungka, Kali Buntuk dan Kali Kedungsomad. Di Kabupaten Kebumen juga terdapat dua waduk besar yaitu Waduk Sempor yang berada di Kecamatan Sempor dan Waduk Wadaslintang dengan kapasitas penyimpanan air 324.087 m³ yang digunakan sebagai sumber air untuk wilayah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan pembagian wilayah sungai, sungai di wilayah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi 4 Sub Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu:

1. Sub SWS Telomoyo: 55.613,552 Ha terdiri atas:
 - a. Sub SWS Jladri 1 Pecaron: 5.593,690 Ha;
 - b. Sub SWS Jatinegara: 18.589,897 Ha - Sub SWS Kemit: 19.636,080 Ha;
 - c. Sub SWS Karanganyar: 11.789,885 Ha, dengan volume tampung air 1.786.863.425 m³;
2. Sub SWS Luk Ulo: 67.553,245 Ha, dengan volume tampung air 2.170.485.700 m³;
3. Sub SWS Medono (Wawar): 64.984 Ha, dengan volume tampung air 2.087.935.920 m³;
4. Sub SWS Ijo: 4.579,583 Ha, dengan volume tampung air 147.142.002 m³.

Dengan demikian total aliran sungai di Kabupaten Kebumen adalah ± 6.192.427.107 m³. SWS ini termasuk dalam wilayah pengelolaan BPSDA Probolo (Progo, Bogowonto, Luk Ulo).

Sungai Luk Ulo merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Kebumen yang mempunyai daerah tangkapan air seluas 596 km², dengan panjang sungai utama 62 km dengan beberapa anak sungai yaitu Sungai Jeblog, Gebog, Mondo, Lokidang dan Loning. Sungai Luk Ulo melintas sepanjang Kabupaten Kebumen yang berhulu di Kabupaten Banjarnegara dan bermuara di pantai selatan Desa Tanggulangin Klirong. Pada musim hujan debit sungai

Luk Ulo meningkat tajam sedangkan pada musim kemarau sangat kecil. Karakteristik sungai Luk Ulo pada bagian hulu berkelok-kelok membentuk meander sehingga banyak mengandung endapan pasir. Daerah tangkapan sungai Luk Ulo seluas 606 km² dengan panjang sungai 62 km yang terbagi menjadi 31 km *upstream* di daerah Karangsambung sampai daerah Kebagoran menuju arah muara di selatan Kebumen.

Sementara itu, Kabupaten Kebumen juga mempunyai potensi Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Kroya, Banyumudal, dan CAT Kebumen Purworejo. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Jika dilihat berdasarkan persebarannya, potensi CAT tersebut berada di bagian tengah dan selatan Kabupaten Kebumen. Sementara itu, di bagian utara Kebumen merupakan wilayah nonCAT, sehingga di Kabupaten Kebumen terdapat dua waduk yang berada di wilayah utara yaitu waduk Sempor dan waduk Wadaslintang. Fungsi waduk tersebut yaitu untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Kabupaten Kebumen terutama di wilayah utara.

Tabel II.4. Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen

Cekungan Air Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
CAT Kroya	2.404,64	3,44
CAT Banyumudal	6.961,48	9,97
CAT Kebumen-Purworejo	60.440,13	86,58
Total	69.806,25	100

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045, 2024

Selain itu, Kabupaten Kebumen juga memiliki sumber mata air. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen diketahui bahwa jumlah mata air yang terdata sebanyak 277 buah dan tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Tabel II.5. Jumlah Sebaran Mata Air Dirinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air
1	Ayah	18
2	Buayan	37

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air
3	Puring	-
4	Petanahan	-
5	Klirong	-
6	Buluspesantren	-
7	Ambal	-
8	Mirit	-
9	Bonorowo	-
10	Prembun	5
11	Padureso	18
12	Kutowinangun	3
13	Alian	28
14	Poncowarno	12
15	Kebumen	1
16	Pejagoan	14
17	Sruweng	25
18	Adimulyo	-
19	Kuwarasan	-
20	Rowokele	27
21	Sempor	22
22	Gombang	-
23	Karanganyar	20
24	Karanganyar	23
25	Sadang	11
26	Karangsambung	13
	TOTAL	277

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 dan DLHKP Kabupaten Kebumen 2022

Kondisi hidrologis juga mempengaruhi kemiskinan di suatu wilayah, karena semua akses kehidupan seperti pertanian, peternakan, rumah tangga membutuhkan air. Berdasarkan Kajian Resiko Bencana, beberapa wilayah di Kabupaten Kebumen rawan kekeringan juga rawan banjir. Hal ini mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, saat kekeringan tiba pengeluaran masyarakat bertambah untuk membeli air bersih yang digunakan mencukupi

keperluan rumah tangga. Selain itu, mitigasi banjir yang efektif diperlukan untuk mencegah dampak ekonomi dan kemiskinan.

2.3.4. Kondisi Demografi

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan melalui portal *gis.dukcapil.kemendagri.go.id*, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah 1.446.883 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi laki-laki sebanyak 734.040 jiwa dan perempuan sebanyak 712.793 jiwa. Kepala Keluarga (KK) sebanyak 480.280 KK. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kebumen sebanyak 137.292 jiwa (9,49%), diikuti dengan Kecamatan Sempor sebanyak 73.595 jiwa (5,09%), dan Kecamatan Alian sebanyak 71.633 jiwa (4,95%). Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Kebumen adalah Kecamatan Padureso sebanyak 17.592 jiwa (1,22%), diikuti dengan Poncowarno sebanyak 19.850 jiwa (1,37%), dan Bonorowo sebanyak 22.887 jiwa (1,58%).

Tabel II.6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase Per Kecamatan (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Ayah	34.796	33.831	68.627	4,74
2	Buayan	35.835	34.349	70.184	4,85
3	Puring	34.298	33.348	67.646	4,68
4	Petanahan	32.436	31.697	64.133	4,43
5	Klirong	34.396	33.441	67.837	4,69
6	Buluspesantren	31.849	30.674	62.523	4,32
6	Ambal	34.068	32.842	66.910	4,62
8	Mirit	28.943	28.038	56.981	3,94
9	Prembun	15.298	15.129	30.427	2,10
10	Kutowinangun	25.687	24.942	50.629	3,50
11	Alian	36.491	35.142	71.633	4,95
12	Kebumen	69.456	67.836	137.292	9,49
13	Pejagoan	29.567	28.554	58.121	4,02
14	Sruweng	32.787	32.166	64.953	4,49
15	Adimulyo	19.660	19.682	39.342	2,72
16	Kuwarasan	27.350	26.301	53.651	3,71
17	Rowokele	27.451	26.798	54.249	3,75
18	Sempor	37.397	36.198	73.595	5,09
19	Gombong	25.377	25.492	50.869	3,52
20	Karanganyar	19.537	19.153	38.690	2,67
21	Karanggayam	32.331	30.859	63.190	4,37
22	Sadang	12.446	11.753	24.199	1,67
23	Bonorowo	11.662	11.225	22.887	1,58
24	Padureso	8.909	8.683	17.592	1,22

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase Per Kecamatan (%)
		Laki-laki	Perempuan		
25	Poncowarno	10.104	9.746	19.850	1,37
26	Karangsambung	25.909	24.914	50.823	3,51
Total Penduduk		734.040	712.793	1.446.833	100

Sumber: Dirjen Dukcapil Kemendagri, 2024

Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tercatat sebanyak 1.104 jiwa/km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Kebumen dengan kepadatan penduduk mencapai 3.220 jiwa/km², diikuti dengan Kecamatan Gombang 2.616 jiwa/km² dan Kecamatan Pejagoan sebanyak 1.658 jiwa/km². Adapun wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu di Kecamatan Sadang dengan kepadatan penduduk sebanyak 442 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Karanggayam sebanyak 565 jiwa/km² dan Kecamatan Padureso sebanyak 607 jiwa/km². Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa wilayah kota memiliki kecenderungan lebih padat dibandingkan wilayah perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran penduduk di Kabupaten Kebumen terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

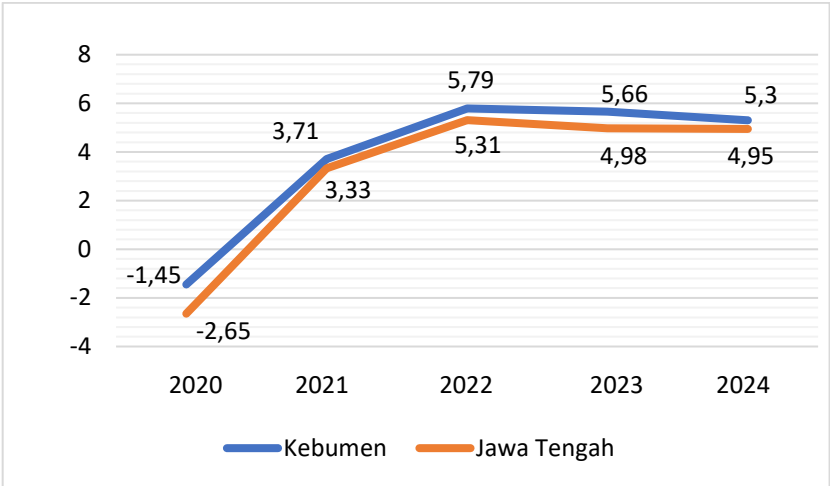
Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2024 1.446.833 jiwa, mengalami kenaikan sejumlah 12.810 jiwa jika dibandingkan jumlah penduduk tahun 2023 sejumlah 1.434.023 atau sebesar 0,89%. Pertumbuhan penduduk ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin baik dan meningkat. Pertumbuhan penduduk tentu perlu diimbangi dengan penyiapan lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, penyiapan kualitas sumber daya manusianya agar bisa bersaing dalam dunia kerja dengan harapan tidak menambah angka pengangguran baru yang akan membuat kemiskinan bertambah.

2.4. Kondisi Perekonomian

2.4.1. Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama kurun waktu 2020-2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen cenderung fluktuatif. Saat Pandemi Covid-19, dimana terjadi pembatasan aktivitas masyarakat berdampak pada perekonomian Kebumen yang mengalami kontraksi cukup dalam pada 2020 sebesar 1,45 persen. Berbagai strategi dan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi terbukti membuahkan hasil

hingga pada 2021 perekonomian Kebumen tumbuh positif sebesar 3,71 persen dan pada 2024 sebesar 5,30 persen.



Gambar II.9. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Tabel II.7. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi di Lingkup Jawa Tengah per TW III Tahun 2024

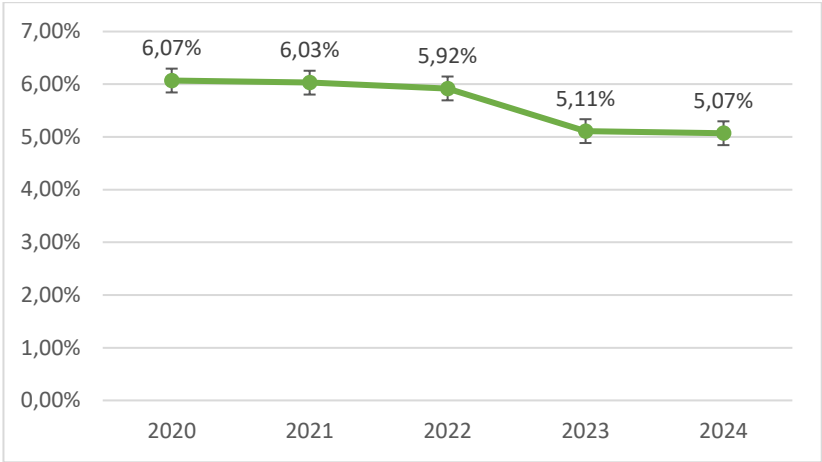
No	Prov/Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (TW III 2024)
1	Kabupaten Batang	6,06
2	Kota Semarang	5,93
3	Kota Pekalongan	5,80
4	Kota Surakarta	5,77
5	Kota Magelang	5,57
6	Kota Salatiga	5,54
7	Kabupaten Kebumen	5,50
8	Kabupaten Sragen	5,43
9	Kabupaten Kendal	5,39
10	Kabupaten Karanganyar	5,33
11	Kabupaten Pati	5,33
12	Kabupaten Banyumas	5,30
13	Kabupaten Grobogan	5,29
14	Kabupaten Sukoharjo	5,20
15	Kabupaten Temanggung	5,20
16	Kabupaten Rembang	5,08
17	Kabupaten Banjarnegara	5,06
18	Kota Tegal	5,04
19	Kabupaten Demak	4,99
20	Kabupaten Klaten	4,97
21	Kabupaten Tegal	4,97
22	Kabupaten Purworejo	4,87
23	Kabupaten Semarang	4,85
24	Kabupaten Brebes	4,85
25	Kabupaten Wonogiri	4,80
26	Kabupaten Magelang	4,77
27	Kabupaten Pekalongan	4,70
28	Kabupaten Wonosobo	4,68
29	Kabupaten Boyolali	4,43
30	Kabupaten Purbalingga	4,39
31	Kabupaten Jepara	4,28
32	Kabupaten Pemalang	4,28
33	Kabupaten Kudus	3,19
34	Kabupaten Cilacap	2,82
35	Kabupaten Blora	2,81

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian di seluruh dunia juga mengakibatkan TPT Kebumen kembali meningkat menjadi sekitar 6 persen pada 2020. Pasca Covid-19, TPT Kebumen cenderung terus menurun hingga di angka 5 persen pada tahun 2024, ini artinya berbagai kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen

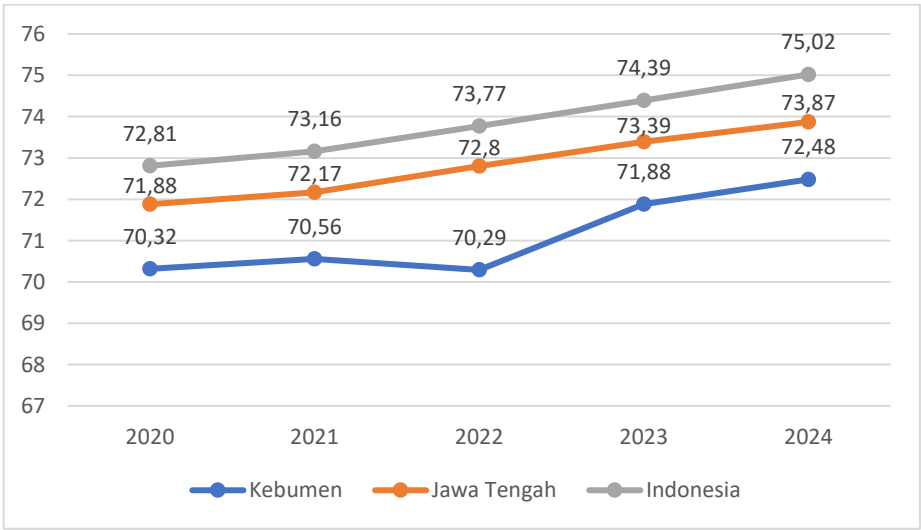
relatif sukses dan berhasil. Bahkan pada 2023, TPT Kebumen mengalami penurunan yang relatif tajam (0,81poin) menjadi 5,11 persen dan kembali menurun pada 2024 menjadi 5,07 persen.



Gambar II.10. Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

2.4.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM juga digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat. Selama periode 2020–2024, IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat setiap tahun. Ini mencerminkan perbaikan bertahap dalam kualitas kesehatan, pendidikan, dan pendapatan/standar hidup masyarakat. Tren ini menunjukkan arah pembangunan manusia yang semakin baik. Dengan capaian IPM pada 2024 ini, maka kualitas pembangunan manusia di Kebumen masuk kategori “tinggi” menurut klasifikasi *United Nations Development Programme* (UNDP).



Gambar II.11. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel II.8. Posisi Relatif IPM Kab/Kota Tahun 2024 Lingkup Provinsi Jawa Tengah

No	Prov/Kab/Kota	IPM	No	Prov/Kab/Kota	IPM
1	Kota Salatiga	85,72	19	Kabupaten Pati	74,1
2	Kota Semarang	85,24	20	Kabupaten Cilacap	72,55
3	Kota Surakarta	84,41	21	Kabupaten Wonogiri	72,54
4	Kota Magelang	82,15	22	Kabupaten Rembang	72,53
5	Kabupaten Sukoharjo	79,3	23	Kabupaten Kebumen	72,48
6	Kabupaten Klaten	78,16	24	Kabupaten Magelang	72,1
7	Kabupaten Karanganyar	78,11	25	Kabupaten Grobogan	72,02
8	Kota Tegal	77,5	26	Kabupaten Pekalongan	71,95
9	Kabupaten Kudus	77,21	27	Kabupaten Temanggung	71,86
10	Kota Pekalongan	77,21	28	Kabupaten Tegal	71,7
11	Kabupaten Boyolali	75,96	29	Kabupaten Blora	71,42
12	Kabupaten Semarang	75,67	30	Kabupaten Purbalingga	70,97
13	Kabupaten Sragen	75,53	31	Kabupaten Batang	70,73
14	Kabupaten Purworejo	75,16	32	Kabupaten Wonosobo	70,63
15	Kabupaten Demak	74,57	33	Kabupaten Brebes	70,18
16	Kabupaten Banyumas	74,52	34	Kabupaten Banjarnegara	69,62
17	Kabupaten Kendal	74,34	35	Kabupaten Pemalang	68,65
18	Kabupaten Jepara	74,32			

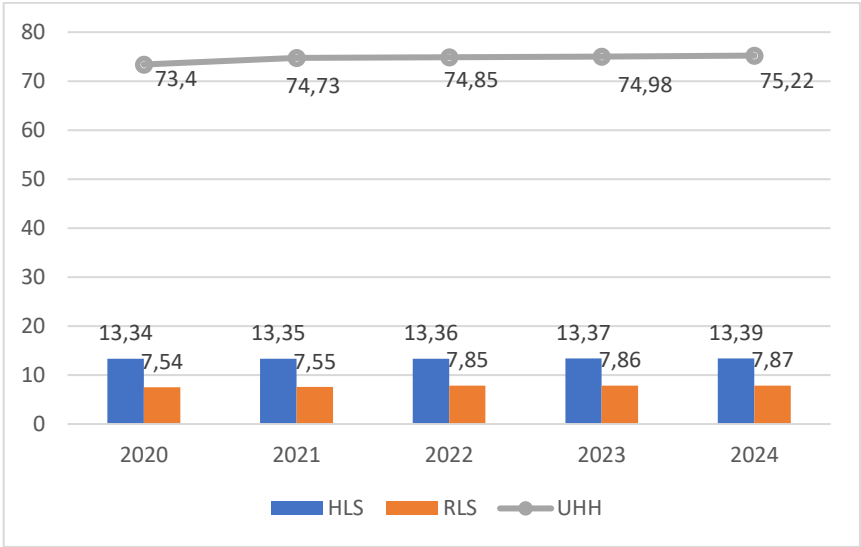
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

IPM tersusun atas tiga komponen utama yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Dimensi pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kinerja HLS Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 13,34 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,39 tahun pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan anak berusia 7 tahun atau lebih saat ini berpeluang mengenyam pendidikan hingga lebih dari satu tahun kuliah (atau dapat mengenyam pendidikan hingga lebih dari diploma satu). Peningkatan HLS menunjukkan semakin banyak penduduk Kebumen yang berpeluang menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kebumen periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan dari 7,54 pada tahun 2020 dan menjadi 7,87 pada tahun 2024. Hal ini merepresentasikan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,87 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII (SMP).

Pada komponen kesehatan, kinerja Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 73,4 tahun pada tahun 2020 menjadi 75,22 tahun pada tahun 2024. Semakin meningkatnya

UHH di Kabupaten Kebumen mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kebumen semakin membaik.



Gambar II.12. Grafik Perkembangan HLS, RLS, dan UHH
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Komponen penyusun IPM yang ketiga yaitu standar hidup layak diukur menggunakan pendekatan pengeluaran masyarakat. Data BPS menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari Rp8.901.000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp10.176.000,00 pada tahun 2024.

Tabel II.9. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun)

Uraian	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kebumen	8.901.000	9.028.000	9.282.000	9.734.000	10.176.000
Purworejo	10.163.000	10.275	10.671.000	11.110.000	11.584.000
Wonosobo	10.621.000	10.760	11.108.000	11.577.000	11.980.000
Banjarnegara	9.263.000	9.407	9.776.000	10.226.000	10.595.000
Banyumas	11.448.000	11.546	11.905.000	12.492.000	12.960.000
Cilacap	10.440.000	10.534	10.904.000	11.432.000	11.868.000
Jawa Tengah	10.930.000	11.034.000	11.377.000	11.835.000	12.276.000

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.4.4. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan secara umum diukur menggunakan Rasio Gini yaitu sebuah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana nilai 0 menunjukkan distribusi yang sempurna merata (semua orang memiliki pendapatan yang sama) dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang ekstrem (semua pendapatan berada di tangan

satu orang). Secara umum Rasio Gini kurang dari 0,3 dianggap ketimpangan rendah, Rasio Gini 0,3 hingga 0,5 masuk kategori ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 dianggap ketimpangan tinggi. Pengukuran ketimpangan pendapatan juga dapat menggunakan indikator Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia, yang membagi 3 kelompok masyarakat, yaitu 20% masyarakat dengan pendapatan teratas, 40% masyarakat dengan pendapatan menengah, dan 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah. Ketimpangan dalam indikator Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia diukur berdasarkan 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah hanya memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12% dari total pendapatan, maka masuk dalam kategori ketimpangan tinggi;
2. Jika 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah memperoleh pendapatan antara 12% hingga kurang dari 17% dari total pendapatan, maka masuk dalam kategori ketimpangan sedang; serta
3. Jika 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah dapat memperoleh pendapatan sebesar 17% atau lebih dari total pendapatan, maka masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Tabel II.10. Rasio Gini Kabupaten Kebumen, Beberapa Kabupaten Tetangga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio Gini							
	Kebumen	Purworejo	Wonosobo	Banjarnegara	Banyumas	Cilacap	Jateng	Nasional
2020	0,328	0,356	0,36	0,372	0,358	0,368	0,362	0,38
2021	0,35	0,337	0,384	0,365	0,364	0,34	0,372	0,38
2022	0,354	0,353	0,363	0,365	0,353	0,356	0,374	0,38
2023	0,333	0,337	0,356	0,376	0,397	0,364	0,369	0,39
2024	0,327	0,354	0,334	0,357	0,385	0,355	0,367	0,38

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Berdasarkan data BPS, Rasio Gini Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari 0,328 pada tahun 2020 menjadi 0,354 pada tahun 2022. Namun demikian, kembali menurun menjadi 0,327 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Rasio Gini kabupaten tetangga, Provinsi Jawa Tengah maupun nasional, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen masih lebih rendah, meskipun dari sisi angka termasuk dalam kategori sedang.

Menurut data distribusi pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia hasil Susenas BPS, ketimpangan pendapatan di Kabupaten

Kebumen selama tahun 2020–2023 cenderung fluktuatif tetapi menunjukkan perbaikan dari 20,02% pada tahun 2020 menjadi 20,38% pada tahun 2023. Kecenderungan fluktuasi sangat dipengaruhi oleh indikator makro lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan tingkat harga, maupun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal ini terjadi karena masyarakat dengan pendapatan terbawah cenderung mendapatkan penghasilannya tidak tetap atau bersifat harian dan akan dihabiskan untuk membiayai pengeluaran pada saat itu juga sehingga akan sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga yang berfluktuasi setiap hari.

Tabel II.11. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Tahun	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia untuk 40% Pendapatan Terendah (%)							
	Kebumen	Purworejo	Wonosobo	Banjarnegara	Banyumas	Cilacap	Jateng	Nasional
2020	20,02	19,76	18,76	17,92	18,47	18,23	18,53	17,73
2021	19,3	20,24	17,61	18,19	18,85	20,31	18,34	17,76
2022	19,86	20,1	18,61	18,74	19,33	19,39	18,51	18,06
2023	20,38	20,76	19,35	18,48	17,32	19,27	18,74	18,04
2024	20,76	19,71	20,35	18,93	18,65	19,38	18,90	18,40

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.4.5. Inflasi

Secara umum dijelaskan Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian dimana tingkat harga dan biaya-biaya umum naik secara terus-menerus (K.S. Gea, 2023). Tingkat inflasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana kondisi setiap daerah berbeda. Inflasi menjadi masalah yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, dimana tujuan jangka panjang untuk menjaga agar tingkat inflasi selalu berada pada tingkat yang sangat rendah. Pengendalian inflasi menjadi sangat penting karena akan menjadi fondasi agar pertumbuhan ekonomi yang positif (Kemenko Ekonomi, 2024). Inflasi yang tinggi akan menyebabkan masyarakat yang mempunyai pendapatan tetap akan tergerus daya belinya, yang mana ini akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Laju inflasi digunakan untuk mengukur laju perubahan (kenaikan/penurunan) tingkat harga sekelompok barang dan jasa secara umum, tetapi karena Kabupaten Kebumen bukan merupakan wilayah sampel SBH (Survei Biaya Hidup), maka dalam perhitungan IHK (Indeks Harga Konsumen) digunakan diagram timbang dari Kota SBH yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama dan letak geografis yang berdekatan, yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.

Tabel II.12. Inflasi Purwokerto, Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020-2024

Tahun	Inflasi (%)			
	Purwokerto	Cilacap	Jateng	Nasional
2020	1,9	1,71	1,56	1,68
2021	2,18	1,88	1,7	1,87
2022	6,49	6,81	5,63	5,51
2023	2,61	2,69	2,89	2,61
2024	1,51	1,82	1,67	1,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.4.6. Analisis Karakteristik Wilayah

Kabupaten Kebumen dengan luas 1.281.115 km², memiliki karakteristik geografis yang terbagi atas dataran rendah, pesisir sepanjang 57,5 km di selatan dan perbukitan/pegunungan (Pegunungan Serayu Selatan) di utara. Wilayah ini terdiri dari 26 kecamatan dengan potensi utama sektor pertanian, kelautan, dan wisata alam. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh basis sektor primer dan jasa. Selanjutnya karakteristik wilayah di Kabupaten Kebumen berdasarkan pada Peraturan Kepala BPS Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan Indonesia Tahun 2020, klasifikasi wilayah desa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu desa perkotaan dan desa perdesaan. Kriteria desa perkotaan merupakan prasyarat tertentu dalam hal kepadatan penduduk per km², persentase keluarga pertanian, dan keberadaan/akses ke fasilitas perkotaan yang dimiliki suatu desa/kelurahan. Adapun fasilitas perkotaan yang dimaksud meliputi keberadaan sekolah TK, SMP, SMU, pasar, kelompok pertokoan, rumah sakit, hotel/biliar/diskotek/ panti pijat/salon, telepon kabel, dan Listrik PLN. Klasifikasi wilayah desa di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel II.13. Klasifikasi Wilayah Desa per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	KECAMATAN	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL
1	Ayah	6	12	18
2	Buayan	12	8	20
3	Puring	12	11	23
4	Petanahan	19	2	21
5	Klirong	17	7	24
6	Buluspesantren	12	9	21
7	Ambal	12	20	32
8	Mirit	9	13	22
9	Bonorowo	8	3	11

NO	KECAMATAN	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL
10	Prembun	9	4	13
11	Padureso	2	7	9
12	Kutowinangun	15	4	19
13	Alian	11	5	16
14	Poncowarno	1	10	11
15	Kebumen	28	1	29
16	Pejagoan	10	3	13
17	Sruweng	17	4	21
18	Adimulyo	7	16	23
19	Kuwarasan	19	3	22
20	Rowokele	4	7	11
21	Sempor	7	9	16
22	Gombong	14	0	14
23	Karanganyar	6	5	11
24	Karanggayam	2	17	19
25	Sadang	1	6	7
26	Karangsambung	2	12	14
	TOTAL	262	198	460

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 262 dari 460 atau sekitar 56,96% desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen berstatus sebagai desa perkotaan.

2.5. Determinan Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan menjadi tantangan dalam pembangunan di Kabupaten Kebumen. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), kesehatan dan pendidikan. Kondisi tersebut ditandai dengan rendahnya pendapatan, keterbatasan akses infrastruktur dasar, sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan pertanian. Di pedesaan, kemiskinan umumnya berkaitan erat dengan sektor pertanian yang belum optimal, seperti rendahnya produktivitas, keterbatasan teknologi, serta sulitnya akses pasar. Selain itu, kurangnya infrastruktur dan fasilitas penunjang turut memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Secara menyeluruh permasalahan kemiskinan dapat dipetakan menggunakan logika program (*theory of change*) sebagaimana terlampir. *Theory of change* atau ToC adalah kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana suatu kegiatan dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan. Dalam penanggulangan kemiskinan, ToC digunakan untuk

menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu program bisa menurunkan angka kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang sudah diidentifikasi menggunakan akar masalah kemiskinan dijelaskan sebagai berikut:

2.5.1. Kondisi Pendidikan

Gambaran secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APTS) dan Rasio Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah.

2.5.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS didefinisikan sebagai proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Data APS tahun 2024 seperti pada Tabel II.14 menunjukkan tren kenaikan partisipasi sekolah untuk jenjang usia 7-12 tahun dan usia 16-18 tahun, capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan APS Jawa Tengah dan nasional. Namun, capaian APS pada jenjang usia 13-15 tahun mengalami penurunan meskipun angka capaian berada di atas capaian nasional. Capaian angka partisipasi sekolah selama tahun 2020-2024 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.14. Capaian Angka Partisipasi Sekolah Selama Tahun 2020-2024

Usia	Angka Partisipasi Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024
7 - 12 Tahun	Kebumen	99.58	99.56	99.67	99.74	99.89
	Jawa Tengah	99.73	99.66	99.58	99.57	99.57
	Nasional	99.26	99.19	99.10	99.16	99.19
13 - 15 Tahun	Kebumen	99.03	99.33	97.69	98.57	98.47
	Jawa Tengah	96.37	96.84	96.77	97.08	99.12
	Nasional	95.74	95.99	95.92	96.1	96.17
16 - 18 Tahun	Kebumen	79.84	79.91	76.77	76.32	77.32
	Jawa Tengah	70.14	70.79	70.82	70.87	71.60
	Nasional	72.72	73.09	73.15	73.42	74.64

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

Data di atas menunjukkan masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Pemerintah daerah perlu mendorong pencapaian SPM bidang pendidikan dimana seluruh penduduk usia 7-15 tahun harus terlayani pendidikan dasarnya. Pola pelayanan sekolah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menyebabkan anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus, anak terlantar dan anak jalanan tidak mengenyam pendidikan sesuai dengan usianya.

2.5.1.2. Angka Putus Sekolah (APTS)

Angka Putus Sekolah (APTS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. APTS dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12,13-15 dan 16-18 tahun). Sejalan dengan APS, APTS dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program wajib belajar yang ditunjukkan dengan pemerataan dan kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

APTS untuk jenjang SD/MI pada akhir tahun 2024 adalah 37 siswa (0.0031%), angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 48 siswa (0.039). Sedangkan Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMP/MTS sebanyak 220 siswa (0.37%).

Tabel II.15. Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI					
Σ Siswa Putus Sekolah	73	110	301	48	37

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Σ Seluruh Siswa	125.585	123.087	122.137	121.049	118.855
% Anak Putus Sekolah	0.058	0.089	0.246	0.039	0,031
SMP/MTs					
Σ Siswa Putus Sekolah	99	188	191	73	220
Σ Seluruh Siswa	61.109	61.976	62.422	61.545	58.105
% Anak Putus Sekolah	0.16	0.30	0.31	0.12	0,37

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

2.5.1.3. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI cenderung fluktuatif pada tahun 2020 dari 1:152,69 menjadi 1:148,72 di tahun 2024. Demikian halnya pada jenjang SMP/MTs juga mengalami penurunan rasio dari 1:303,86 pada tahun 2020 menjadi 1:335,38 pada tahun 2024. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel II.16.

Tabel II.16. Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

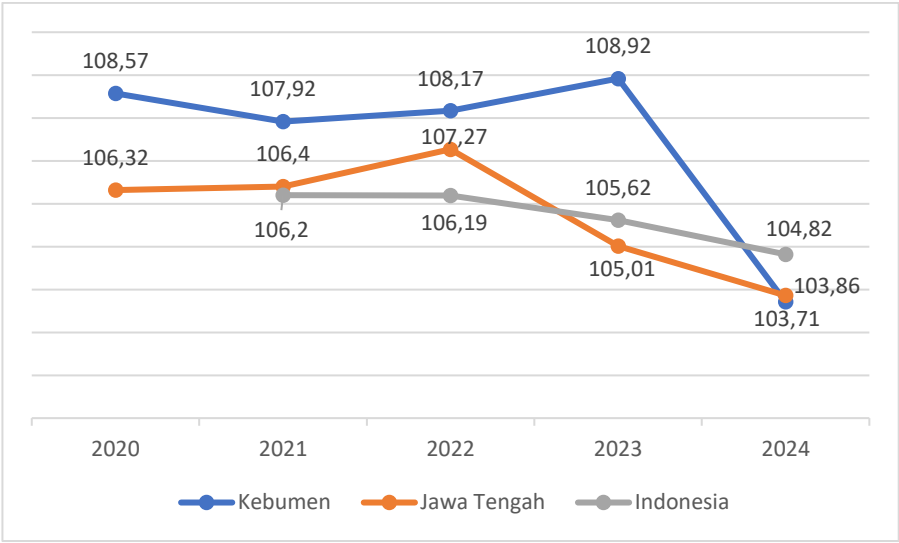
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI					
Jumlah Sekolah	873	876	866	864	863
Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun	133.302	132.026	131.750	128.981	128.352
Rasio ketersediaan sekolah	1:152,69	1:150,71	1:152,14	1:149,28	1:148,72
SMP/MTs					
Jumlah Sekolah	211	213	200	208	203
Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun	64.115	63.950	64.888	67.086	68.084
Rasio ketersediaan sekolah	1:303,86	1:300,23	1:324,44	1:322,53	1:335,38

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

2.5.1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

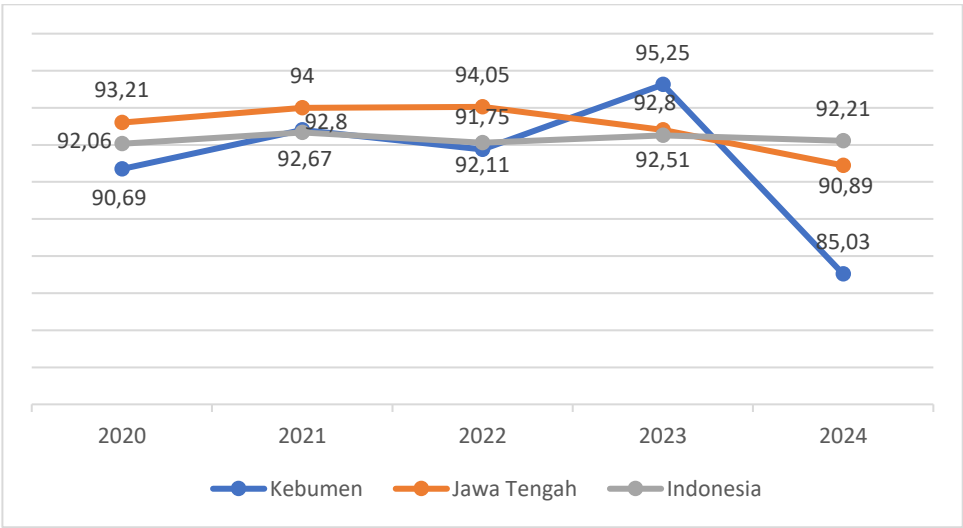
Berdasarkan data capaian, tahun 2020-2021 APK jenjang SD/ sederajat sempat mengalami penurunan, kemudian meningkat pada tahun 2022 dan tahun 2023.

APK SD/ sederajat Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 berada di atas APK Jawa Tengah maupun nasional. APK di Kabupaten Kebumen lebih dari 100% menunjukkan pelayanan pendidikan dasar telah mampu menjangkau seluruh penduduk usia sekolah dasar.



Gambar II.13. APK Tingkat SD/ Sederajat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Sementara itu, kondisi APK SMP/ sederajat pada tahun 2023 meningkat menjadi 95,25 dibandingkan tahun 2022. Namun demikian, APK SMP/ sederajat tahun 2024 mengalami penurunan. APK SMP/ sederajat masih menunjukkan angka dibawah 100%, artinya adanya penurunan pada jumlah murid yang berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai dengan usianya atau anak usia sekolah yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Kebumen.

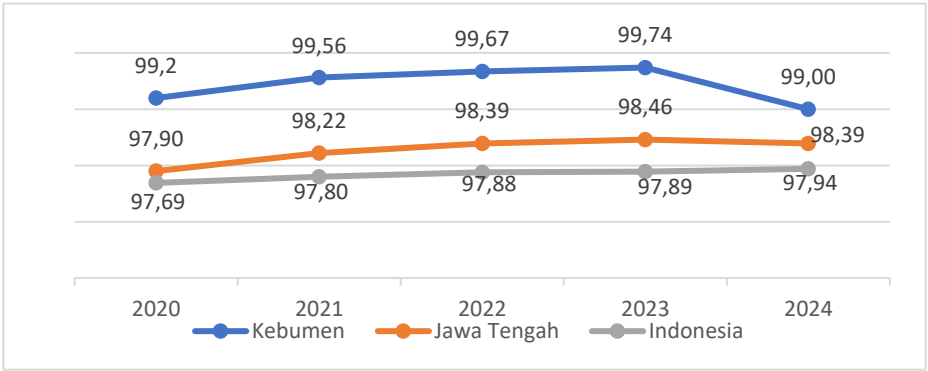


Gambar II.14. APK Tingkat SMP/ Sederajat Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.5.1.5. **Angka Partisipasi Murni (APM)**

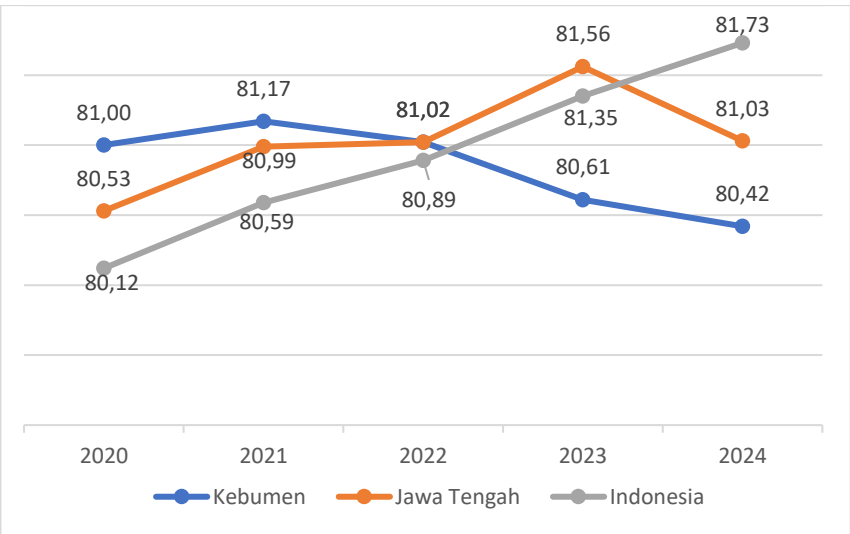
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika $APM = 100$, artinya seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

APM pada tingkat SD/ sederajat di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 99,00. Jika dibandingkan dengan APM SD/ sederajat untuk Jawa Tengah dan nasional, APM Kabupaten Kebumen masih lebih tinggi dari tahun 2020 hingga tahun 2024.



Gambar II.15. APM Tingkat SD/ Sederajat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020– 2024.
Sumber: Satu Data Kebumen, 2024

APM pada jenjang SMP/ sederajat di Kabupaten Kebumen selama periode tahun 2020-2022 masih diatas APM Jawa Tengah dan nasional. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan berturut-turut menjadi 80,61 dan 80,42 sehingga di bawah Provinsi Jawa Tengah dan nasional.



Gambar II.16. APM Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020– 2024
Sumber: Satu Data Kebumen, 2024

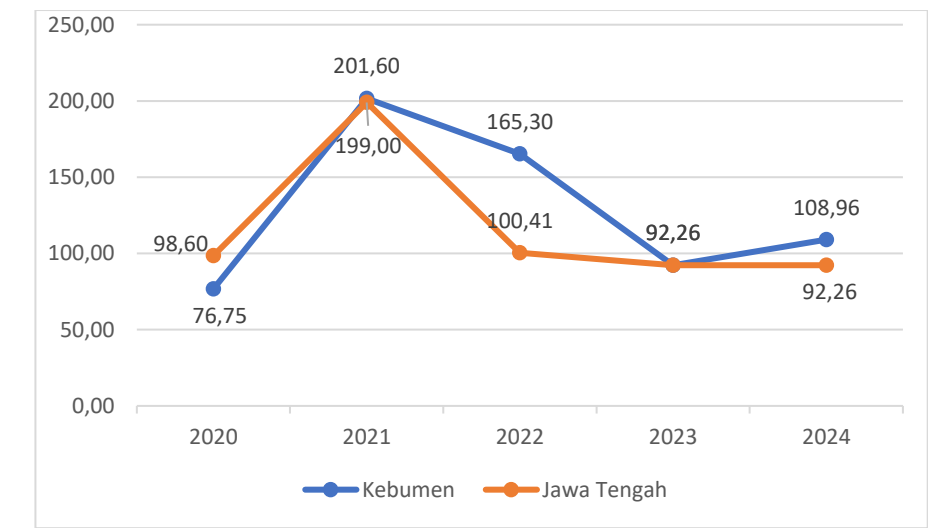
2.5.2. Kondisi Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat penting. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan. Secara umum derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah kasus Balita Gizi Buruk (BGB), Balita Kurang Gizi (BKG), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

2.5.2.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup. Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2020–2024 menunjukkan tren naik. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 menimbulkan perburukan kasus kematian ibu secara signifikan menjadi 76,75 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan tinggi menjadi 201,6 pada tahun 2021. Keterbatasan layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil selama pandemi, potensi keterpaparan virus dan komplikasi kehamilan (perdarahan, hipertensi kehamilan, jantung, diabetes) menjadi faktor-faktor yang diperkirakan

mempengaruhi naiknya angka kematian ibu. Angka kematian ibu di Kabupaten Kebumen memiliki pola yang fluktuatif. AKI meningkat dari 76,75 per 100.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 201,6 pada 2021, lalu menurun menjadi 165,3 pada 2022 dan 92,26 pada 2023. Kemudian kembali meningkat menjadi 108,96 pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa selain akses layanan kesehatan, faktor lain seperti kualitas pelayanan, kondisi kesehatan ibu sebelum melahirkan, serta penanganan komplikasi masih menjadi tantangan utama dalam menekan angka kematian ibu.



Gambar II.17 Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024
Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

Berdasarkan data per kecamatan tahun 2020-2024 didapatkan gambaran kasus kematian ibu yang cenderung menurun. Namun, pada tahun 2021 kasus kematian ibu meningkat menjadi 38 kasus. Kemudian menurun kembali menjadi 29 kasus di tahun 2022 dan 15 kasus hingga tahun 2024 dimana kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Ambal sebanyak 3 kasus. Ketersediaan layanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial/Emergensi Komprehensif) dalam rangka penyelamatan ibu dan anak baru lahir melalui program rujukan berencana dalam satu wilayah masih terbatas. Kabupaten Kebumen baru memiliki 2 fasilitas layanan PONEK yaitu RSUD dr. Soedirman dan RSU PKU Gombang.

Tabel II.17. Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

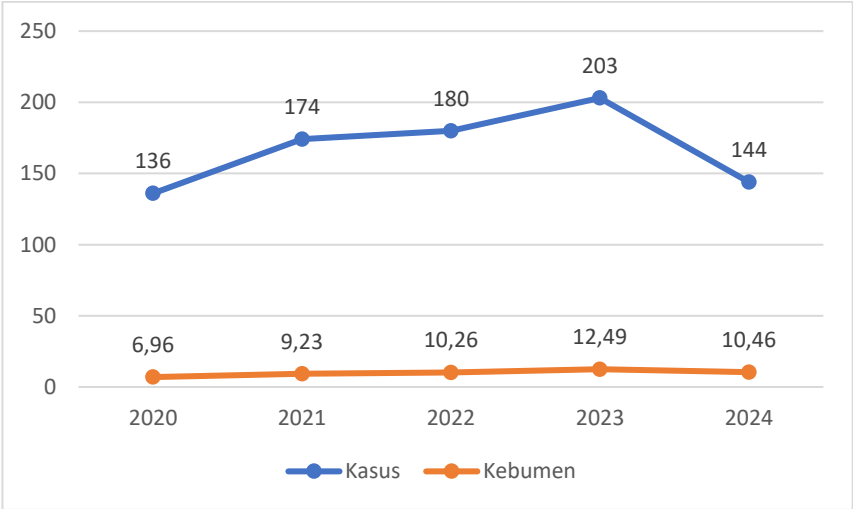
No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayah	2	2	0	1	1
2	Buayan	0	0	1	1	0
3	Puring	0	2	2	0	0
4	Petanahan	1	1	5	1	1
5	Klirong	0	1	2	1	0
6	Buluspesantren	0	1	0	1	1
7	Ambal	0	4	2	3	4
8	Mirit	0	1	2	1	1
9	Bonorowo	0	2	0	0	0
10	Prembun	0	1	0	0	0
11	Kutowinangun	1	3	1	0	0
12	Alian	2	3	2	1	2
13	Padureso	0	0	0	0	0
14	Poncowarno	0	1	0	1	0
15	Kebumen	0	0	1	0	1
16	Pejagoan	1	3	0	2	0
17	Sruweng	1	3	1	0	0
18	Adimulyo	0	1	3	1	1
19	Kuwarasan	2	1	1	0	0
20	Rowokele	1	2	4	0	2
21	Sempor	1	0	0	0	0
22	Gombong	1	1	0	1	0
23	Karanganyar	0	0	0	0	0
24	Karanggayam	1	2	1	0	0
25	Sadang	1	1	1	0	0
26	Karangsambung	0	2	0	0	1
Total		15	38	29	15	15

Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

2.5.2.2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah 70 (sangat tinggi), 40 – 70 (tinggi), 20-39 (sedang) dan <20 (rendah). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif

terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir. AKB Kabupaten Kebumen tahun 2020-2024 selengkapnya tersaji pada gambar berikut:



Gambar II.18. Angka Kematian Bayi dan Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024
Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

Jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2023 cenderung naik. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 203 kasus menjadi 144 kasus (berkurang 59 kasus). Penyebab kasus kematian bayi pada tahun 2023 sebagian besar disebabkan oleh perinatal (lahir 1–7 hari), berat badan lahir rendah, kelainan kongenital pneumonia, asfiksia, kelainan jantung bawaan, dan sepsis diantaranya yaitu terdapat kematian bayi masa perinatal (1-7 hari) yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk masalah kesehatan pada ibu hamil (masalah pada plasenta, masalah pada janin), masalah pada persalinan serta persiapan pasca kelahiran. Selain itu, penyebab lainnya yaitu meningkatnya kasus pre

eklamasi/eklamasi (keracunan kehamilan) akibat hormon kehamilan atau tubuh menolak kehamilan diakibatkan pola hidup, biasanya terjadi pada trimester ketiga kehamilan dan kehamilan pada usia risiko tinggi (resti) yang berisiko atas keselamatan ibu dan bayi. Perkembangan jumlah kasus kematian bayi per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.18. Jumlah kasus kematian bayi per kecamatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
1	Ayah	4	5	8	6	1	4,80
2	Buayan	3	9	2	12	0	5,20
3	Puring	3	11	9	3	0	5,20
4	Petanahan	4	9	6	6	1	5,20
5	Klirong	9	7	6	10	0	6,40
6	Buluspesantren	3	10	12	13	1	7,80
7	Ambal	11	5	13	8	4	8,20
8	Mirit	7	4	7	9	1	5,60
9	Bonorowo	3	2	2	1	0	1,60
10	Prembun	5	6	4	6	0	4,20
11	Kutowinangun	7	5	5	10	0	5,40
12	Alian	3	9	7	6	2	5,40
13	Padureso	2	5	1	4	0	2,40
14	Poncowarno	2	8	4	3	0	3,40
15	Kebumen	14	8	13	16	1	10,40
16	Pejagoan	1	0	2	3	0	1,20
17	Sruweng	10	13	11	10	0	8,80
18	Adimulyo	3	6	4	10	1	4,80
19	Kuwarasan	7	9	13	5	0	6,80
20	Rowokele	4	7	5	6	2	4,80
21	Sempor	6	10	11	10	0	7,40
22	Gombong	4	2	9	2	0	3,40
23	Karanganyar	5	5	9	3	0	4,40
24	Karanggayam	6	10	12	7	0	7,00
25	Sadang	2	4	2	0	0	1,60
26	Karangsambung	8	5	3	7	1	4,80
Jumlah		136	174	180	191	15	139,20

Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

Berdasarkan data perkembangan jumlah kasus kematian bayi dalam kurun waktu 2021-2023 per

kecamatan didapatkan gambaran kasus kematian bayi yang semakin meningkat dengan rata-rata kasus kematian bayi tertinggi di Kecamatan Kebumen, Kecamatan Buluspesantren dan Kecamatan Buayan. Faktor penyebab kematian bayi secara umum disebabkan oleh keterlambatan penanganan, penyakit penyerta, kondisi kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta status gizi ibu dan bayi. Upaya penurunan AKB antara lain melalui peningkatan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mengetahui adanya kelainan penyakit, pemeliharaan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas bayi. Selain itu, pendampingan kelas ibu dan balita, optimalisasi peran Posyandu, intervensi gizi bayi, termasuk penanganan kasus gizi buruk juga dilakukan untuk menurunkan kasus kematian bayi.

2.5.2.3. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir dapat terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Pada tahun 2022 ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 99,94% dan mengalami kenaikan menjadi 100% di tahun 2023 dan tahun 2024. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.19.

Tabel II.19. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	19.526	18.863	17.549	16.289	13.823
Jumlah total Ibu Bersalin	18.879	18.879	17.559	16.289	13.823
Presentase	99.95	99.92	99.94	100	100

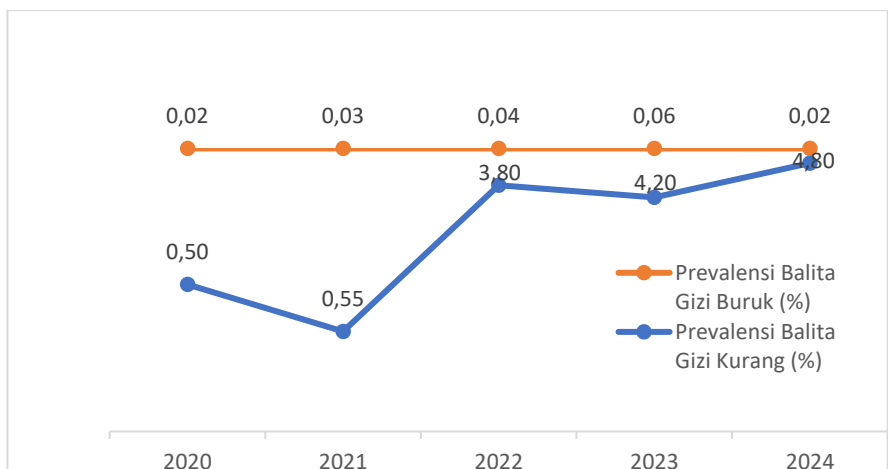
Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

2.5.2.4. Status Gizi

Gizi buruk cenderung menyerang setelah balita berusia 18 bulan. Kecukupan zat gizi berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak. Terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi gizi buruk yaitu: ekonomi, sanitasi, pendidikan orangtua dan perilaku orang tua. Malnutrisi masih saja melatarbelakangi penyakit dan kematian anak. Ketidakcukupan protein sesungguhnya berpeluang menyerang siapa saja, terutama bayi dan anak dalam usia pertumbuhan. Kasus gizi buruk bukanlah jenis penyakit yang datang tiba-tiba, tetapi hasil dari proses yang menahun dan menjadi kronik saat mencapai puncaknya. Masalah defisiensi gizi khususnya menjadi perhatian karena berbagai penelitian menunjukkan adanya efek jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak manusia.

Selain AKI dan AKB, status gizi masih perlu menjadi perhatian. Dimana hal ini ditandai masih ditemukannya kasus gizi kurang, gizi buruk dan tingginya angka stunting. Persentase balita gizi kurang di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 mencapai 0,50% dan meningkat tinggi mulai tahun 2022 menjadi 3,80% atau naik 3,30%. Sedangkan persentase balita gizi buruk sebesar 0,02% pada tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 0,03% tahun 2021, 0,04% tahun 2022, 0,06 di tahun 2023 kemudian menurun menjadi 0,02% pada tahun 2024.

Kecukupan gizi menjadi salah satu hal yang penting guna mempersiapkan generasi yang gemilang di masa yang akan datang. Pemenuhan gizi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemberian makanan tambahan dan vitamin, tetapi perlu upaya edukasi dalam pola asuh anak mulai dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Optimalisasi peran Pos Kesehatan Desa (PKD) dan Posyandu sebagai wadah edukasi pada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, kader kesehatan menjadi agen *screening* awal kejadian kasus di sekitarnya.

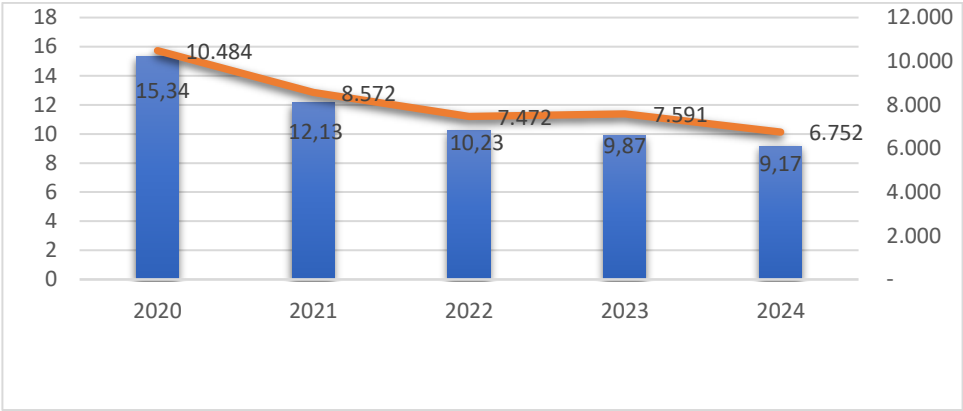


Gambar II.19. Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk Tahun 2020-2024
 Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

Selanjutnya stunting adalah isu strategis di bidang kesehatan yang menjadi perhatian seluruh pihak karena akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Stunting dipengaruhi oleh rendahnya asupan gizi, lingkungan sosial yang terkait dengan pengasuhan, akses terhadap pelayanan Kesehatan dan kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Menurut WHO, kejadian stunting pada anak usia dini dapat berlanjut dan berisiko untuk tumbuh pendek pada usia dewasa muda. Stunting dalam jangka panjang memiliki akibat buruk yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat berada di masa sekolah dan disabilitas di usia tua (Rahayu, 2018). Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting untuk mengupayakan percepatan penurunan stunting yang mempunyai pengertian yaitu setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah dan desa.

Angka stunting di Kabupaten Kebumen dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami tren penurunan atau membaik. Menurut elektronik Pencacatan dan

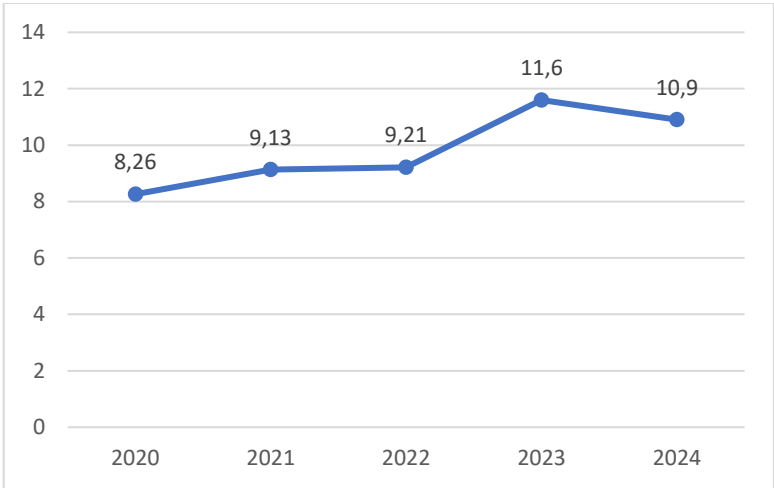
Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angka stunting tahun 2020 sebesar 15,34% dan terus menurun sampai 9,17% pada tahun 2024. Berikut adalah angka stunting dan penderita stunting selama kurun waktu 2020-2024:



Gambar II.20. Angka Stunting Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024
Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

Meskipun angka penderita stunting di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, penanganan stunting tetap menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan serta kebijakan pemerintah pusat dalam mengupayakan percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mengidentifikasi dan menentukan strategi sebagai bagian dari aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting agar angka stunting dan jumlah penderita stunting dapat menurun. Salah satu upaya dalam menurunkan angka stunting adalah dengan menurunkan prevalensi ibu hamil KEK (kekurangan energi kronis), sehingga mengurangi risiko lahirnya bayi berpotensi stunting. Persentase ibu hamil KEK pada tahun 2020 sebesar 8,26% dan terus meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi 11,6%. Kemudian pada tahun 2024 menurun kembali menjadi 10,9%. Kenaikan Persentase Ibu Hamil KEK yang signifikan di tahun 2023 menyebabkan kenaikan angka stunting karena ibu hamil KEK berpotensi melahirkan bayi stunting. Ibu hamil KEK yaitu ibu hamil yang mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) di

bawah 23,5 cm atau Indeks Masa Tubuh (IMT) pada pra hamil atau Trimester I (usia kehamilan ≤ 12 minggu) di bawah 18,5 kg/m² (kurus). Angka KEK tahun 2023 naik dikarenakan pola makan yang kurang tepat, *body image* sebelum hamil ataupun keterbatasan ketersediaan makanan. Persentase ibu hamil KEK Kabupaten Kebumen tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.21. Persentase Ibu Hamil KEK Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024
Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

2.5.2.5. Rasio Dokter dan Penduduk

Rasio dokter dan penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 rasio dokter dan penduduk sejumlah 1: 4.306 dan menurun di tahun 2023 menjadi 1: 4.459. Kondisi rasio dokter dan penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 sebesar 1:2.888. Dengan rasio tersebut artinya jumlah dokter di suatu wilayah sudah mendekati kondisi ideal yaitu 1: 2.500.

Tabel II.20. Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokter	419	255	330	320	499
Jumlah Penduduk	1.394.038	1.405.644	1.421.143	1.426.832	1.441.425
Rasio Dokter/ Penduduk	1 : 3.327	1 : 5.512	1 : 4.306	1:4.459	1:2.888

Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

2.5.2.6. Rasio Puskesmas dan Penduduk

Rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen cenderung menurun pada kurun waktu 2020-2024. Rasio Puskesmas per satuan penduduk pada tahun 2020 sebesar 1:39.999 menurun menjadi 1:41.183 di tahun 2024. Nilai rasio tersebut masih belum dalam kondisi ideal rasio Puskesmas per satuan penduduk yaitu 1:30.000 atau 1 puskesmas harusnya melayani maksimal 30.000 penduduk. Sementara itu, puskesmas pembantu dengan jumlah 71 juga masih belum mencapai standar sebesar 1:1.500 penduduk atau 1 puskesmas pembantu harusnya melayani maksimal 1.500 penduduk. Meskipun demikian, keberadaan Puskesmas Pembantu dan Poliklinik yang tersebar secara merata dapat membantu masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Rasio Puskesmas dan Klinik Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.21. Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Puskesmas	35	35	35	35	35
2	Jumlah Puskesmas Keliling	35	35	49	49	38
3	Jumlah Poliklinik/ PKD/Polindes	387	357	280	304	349
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	77	65	69	70	71
5	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	534	492	433	409	455
6	Jumlah Penduduk	1.399.976	1.405.644	1.409.951	1.426.832	1.441.425
7	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:39.999	1:40.161	1:40.284	1:40.767	1:41.183

Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

2.5.2.7. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berjumlah tetap yaitu 11 rumah sakit. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam

peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kebutuhan rumah sakit didasarkan pada ketersediaan tempat tidur dimana idealnya 1 tempat tidur melayani 1.000 penduduk. Namun demikian, seiring bertambahnya jumlah penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2024 meturun menjadi 1:131.039 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

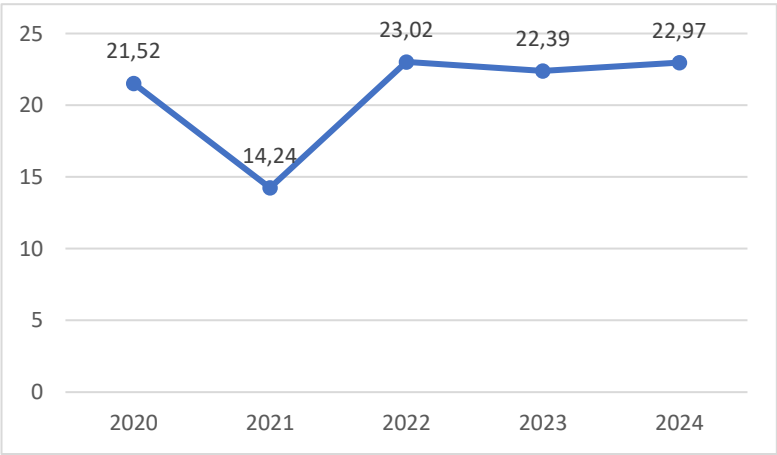
Tabel II.22. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RSUD	2	2	2	2	2
Jumlah RS Swasta	9	9	9	9	9
Jumlah RS AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
Jumlah Seluruh RS	11	11	11	11	11
Jumlah Penduduk	1.399.976	1.405.644	1.409.951	1.426.832	1.441.425
Rasio	1 :127.720	1 :127.786	1:129.194	1:129.712	1:131.039

Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

2.5.2.8. Angka Kesakitan

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Blum (1974) bahwa derajat kesehatan penduduk suatu negara dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka morbiditas di Kebumen pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 21,52 menjadi 14,24 pada tahun 2021. Kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 23,02 dan kembali menurun di 2023 tahun menjadi 22,39 sebelum akhirnya mengalami kenaikan kembali pada tahun 2024 menjadi 22,97.



Gambar II.22. Angka Kesakitan (Morbiditas) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024
 Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

Jumlah kasus baru AIDS di Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebanyak 152 kasus. Kasus HIV AIDS merupakan fenomena gunung es artinya kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kasus yang ada di masyarakat. Terdapat kemungkinan masih banyak kasus HIV AIDS yang belum dilaporkan karena tidak orang dengan risiko tinggi mau memeriksakan diri sehingga status HIV-nya tidak bisa diketahui.

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Indonesia merupakan negara kedua tertinggi penderita tuberkulosis. Hal tersebut mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program. Angka notifikasi kasus atau *Case Notification Rate* (CNR) di wilayah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 adalah 201 per 100.000 penduduk, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 194 per 100.000 penduduk.

Kejadian malaria juga masih menjadi perhatian di Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2022, ditemukan 3 kasus malaria non kasus indigenous yang dibawa oleh pendatang dari luar daerah. Program surveilans migrasi malaria tetap dijalankan untuk penanganan dan pencegahan kasus. Program ini merupakan salah satu upaya pencegahan penularan penyakit malaria dengan jalan pemantauan penduduk yang akan atau dari luar Pulau Jawa. Sesuai dengan hasil evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah tahun 2024, kinerja program dan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis, HIV, DBD dan Malaria tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.23. Kasus Tuberkulosis, HIV, DBD dan Malaria di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Case Notification Rate semua kasus TB per 100.000 penduduk	99	119	165	194	201
Kasus baru HIV AIDS	227	181	152	141	151
Angka Kesakitan DBD	12	13	11	5.8	20
Jumlah Kasus Malaria	0	4	3	7	20

Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

Selain penyakit menular, kejadian penyakit tidak menular (PTM) menunjukkan kecenderungan tren meningkat setiap tahunnya. Pola hidup masyarakat yang kurang sehat dan rendahnya kesadaran untuk menjaga kebugaran dengan berolahraga meningkatkan PTM seperti obesitas, stroke, jantung, kanker dan diabetes. Selain itu, kebiasaan merokok menjadi salah satu pemicu penyakit tidak menular seperti gangguan pernafasan, kanker, penyakit paru dan jantung. Peningkatan kasus penyakit tidak menular menimbulkan dampak ekonomi dan produktivitas karena kasus PTM ditemukan pada penduduk usia produktif. Cakupan pemeriksaan PTM oleh tenaga kesehatan baru dilakukan ketika sudah dalam kondisi lanjut, sehingga upaya pencegahan dan penanganan PTM menjadi kurang optimal.

Tabel II.24. Penyakit Tidak Menular Kebumen Tahun 2020-2024

No	Jenis Penyakit	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ca servik	109	19	94	20	62
2	Ca Mamae	128	149	650	152	486
3	Ca Hepar	13	0	0	NA	0
4	Ca Paru	18	0	0	43	45
5	ID DM	617	98	371	462	652
6	ND DM	10.584	10.482	14.964	9.910	13.353
7	AMI	72	118	32	57	20
8	Dekom Kordis	917	666	774	706	420
9	Hemoragik	386	750	539	587	721
10	PPOK	698	638	1.108	876	2.010
11	Asma Bronkial	1.293	293	1.178	969	1.468
12	Psikosis	2.202	4.123	3.768	66	4.655

No	Jenis Penyakit	2020	2021	2022	2023	2024
13	Hipertensi	62.775	69.899	89.803	60.044	64.187
14	Diabetes	10.584	10.580	13.251	10.372	11.252
15	Tumor Benjolan	0	14	56	67	111
16	ODGJ	4.088	5.041	3.914	4.214	5.487
17	Iva positif	20	25	32	59	68

Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

2.5.3. Kondisi Infrastruktur Dasar

2.5.3.1. Air Bersih dan Sanitasi

Aspek air bersih dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam rangka memenuhi salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-6 yakni air bersih dan sanitasi layak, Kabupaten Kebumen terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap aspek tersebut.

Akses air bersih perpipaan menjadi parameter air bersih dikarenakan proses pemanfaatannya oleh masyarakat dapat lebih terjamin dalam hal kualitas dan kebersihan air. Cakupan penduduk berakses air bersih perpipaan di Kabupaten Kebumen terus mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2020 sebesar 15,94% dan tahun 2024 meningkat menjadi 26,74% (381.569 penduduk terlayani). Akses air bersih perpipaan dihitung dari jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih perpipaan baik pada jaringan perkotaan maupun perdesaan. Jaringan perkotaan yakni jaringan yang dikelola oleh PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen serta jaringan SPAM Regional Keburejo yang dikelola oleh PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah. Sementara jaringan perdesaan yakni jaringan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat di perdesaan, baik yang berasal dari dana APBN maupun APBD, seperti dari Program Pamsimas, Hibah Air Bersih/Minum DAK dan sebagainya.

Beberapa permasalahan pemenuhan akses air minum oleh PDAM Tirta Bumi Sentosa adalah masih rendahnya *idle capacity* khususnya SPAM Keburejo rata-rata tahun

2023 penyerapan konsumen 60 liter/detik masih di bawah kapasitas 150 liter/detik, ini berarti masih ada potensi air perpipaan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Penyelenggaraan sistem air minum perdesaan dikelola oleh KPSPAM, permasalahan dan kendala di setiap desa bervariasi, tetapi secara umum kendala penyelenggaraan air minum perdesaan yaitu terbatasnya sumber air baku dan manajemen KPSPAM yang perlu ditingkatkan.

Dalam 5 tahun terakhir, akses air bersih perpipaan di Kabupaten Kebumen terus meningkat. Capaian penduduk berakses air bersih di Kabupaten Kebumen tahun 2020-2024 dapat sebagai berikut:

Tabel II.25. Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	SPAM Perkotaan PDAM (jiwa)	101.292	109.504	137.760	142.108	149.428
2	SPAM Perdesaan / Pamsimas, SPAM perdesaan, dsb (jiwa)	142.667	154.235	194.036	203.932	207.412
3	Jumlah Total Penduduk Berakses Air Minum Perpipaan	243.959	263.739	331.796	346.040	356.840
4	Jumlah Penduduk	1.390.869	1.405.606	1.409.951	1.426.832	1.441.425
5	Persentase (%)	17,54%	18,75%	23,53%	24,25%	24,76%

Sumber: DPUPR dan PDAM Kabupaten Kebumen, 2024 (diolah)

Kondisi sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kebumen mayoritas menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (on-site sistem/SPALD-S) yaitu pengolahan limbah yang diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber tanpa dialirkan. Sistem ini memanfaatkan fasilitas tangki septik skala rumah tangga dan tangki septik di beberapa rumah tangga (5-10 SR), serta cubluk di pedesaan. Sistem ini menyediakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagai sarana pengolah lumpur dari tangki septik. Pada saat ini Kabupaten Kebumen memiliki 2 (dua) sarana IPLT yang berada di Kaligending Karangsembung dan IPLT yang berada di Semali Kecamatan Sempor (beroperasi tahun 2023).

Meskipun persentasenya masih kecil, Kabupaten Kebumen juga menerapkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (off-site sistem/SPALD-T), yaitu pengolahan limbah yang diselesaikan secara terpusat/komunal melalui jaringan pengumpul yang diteruskan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

Capaian akses aman di Kabupaten Kebumen terus menurun sejak 2020 hingga 2024. Penurunan akses sanitasi aman disebabkan bertambahnya keluarga tidak sebanding dengan pembuatan akses sanitasi aman. Selama ini budaya masyarakat membangun *septic tank* masih kriteria belum layak secara fisik dengan kondisi lantai dan dinding belum kedap dan belum dilakukan penyedotan secara rutin 2-3 tahun sekali, bahkan dari segi fisik belum sesuai persyaratan yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat membangun akses sanitasi aman dan kemampuan pembiayaan masyarakat masih rendah.

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, saat ini sudah tidak ada lagi masyarakat yang melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS). Kemudian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mencatat capaian akses sanitasi di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel II.26. Capaian Akses Sanitasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Aman (%)	2,80	2,94	2,43	2,02	3,67
2	Akses Layak (%)	93,00	91,99	78,81	86,97	96,22
3	Akses Belum Layak (%)	6,20	5,07	18,67	10,92	3,78
4	BABS Tertutup (%)	100	100	100	100	100
5	BABS Terbuka (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat akses sanitasi aman dan sanitasi layak menunjukkan kinerja yang belum

memuaskan dari tahun 2020 sampai tahun 2024, walaupun usaha Pemerintah Kabupaten Kebumen cukup signifikan membantu penyediaan akses sanitasi baik individu maupun komunal baik melalui dana DAU, DAK, Bantuan Provinsi dan CSR.

2.5.3.2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan program prioritas berupa peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak. Kebutuhan rumah sangat dipengaruhi oleh kondisi demografi. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen dimaknai juga sebagai pertumbuhan jumlah keluarga baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan rumah bagi keluarga.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 adalah 476.112 dan jumlah rumah yang tersedia sebesar 354.807. Hal ini berarti terdapat rumah tangga yang masih menumpang dengan KK induknya. Sesuai data BKKBN, pada tahun 2020 terdapat data backlog 64.093. Jumlah rumah dan *backlog* hingga tahun 2024 belum mengalami pembaruan data dari BKKBN. Berdasarkan data ini terdapat kekurangan kepemilikan rumah (*backlog*) yang sangat besar dan harus dipenuhi oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Status *backlog* kepemilikan rumah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 secara lengkap tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.27. Status *Backlog* Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah	354.807	354.807	354.807	354.807	354.807
Jumlah Rumah Tangga	325.963	356.220	369.138	461.823	476.112
<i>Backlog</i>	64.093	64.093	64.070	64.070	64.070

Sumber: Disperkimhub dan BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Selain terkait *backlog* kepemilikan rumah, penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten

Kebumen selama 5 tahun terakhir berjalan semakin baik. Hal ini terlihat dari persentase wilayah kumuh perkotaan dari 5,04% di tahun 2020 menurun menjadi 3,01% atau terdapat 169,32 Ha kawasan kumuh yang tertangani hingga tahun 2024. Luas kawasan kumuh sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/385 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen seluas 343,27 Ha. Pada tahun 2024 masih terdapat 174,04 Ha kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kebumen yang memerlukan penanganan. Perkembangan kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Kebumen tahun 2020-2024 secara rinci tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.28. Perkembangan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Area Permukiman (Ha)	32.217,82	32.217,82	32.217,82	32.217,82	32.217,82
	a. Permukiman Perkotaan	5.776,96	5.776,96	5.776,96	5.776,96	5.776,96
	b. Permukiman Perdesaan	26.440,85	26.440,85	26.440,85	26.440,85	26.440,85
2	Luas Permukiman Kumuh perkotaan sesuai SK (Ha)	343,27	343,27	343,27	343,27	343,27
3	Luas Permukiman kumuh perkotaan yang tertangani (kumulatif) (Ha)	52,35	54,65	55,15	83,82	169,32
4	Luas permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani (kumulatif) (Ha)	290,92	288,62	288,12	259,45	174,04
5	Persentase wilayah kumuh perkotaan (4/1a)	5,04	4,996	4,987	4,49	3,01

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2024

Penanganan kawasan kumuh merupakan pekerjaan yang terintegrasi dari beberapa perangkat daerah, dimana terdapat 7 aspek penilaian yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran, apabila suatu wilayah mendapatkan skor >16 dari 7 aspek tersebut maka termasuk dalam wilayah kumuh. Rata-rata kekumuhan perkotaan Kebumen masuk dalam *kriteria kumuh ringan sampai kumuh sedang*.

Sementara itu, rumah layak huni di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 mencapai 332.347 dari total

354.807 rumah atau masih terdapat 23.266 rumah tidak layak huni (RTLH). Basis data RTLH hingga tahun 2021 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Tahun 2014, tetapi pada tahun 2021 terdapat pembaruan data RTLH dan menambah sejumlah 20.635 RTLH dari Basis Data Terpadu. Jumlah rumah layak huni dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kebumen tahun 2020-2024 secara rinci tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.29. Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah	306.885	306.885	354.807	354.807	354.807
2	Jumlah rumah layak huni	306.285	328.465	329.912	331.541	332.347
3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6.012	28.635	26.342	24.895	23.266
4	Jumlah RTLH tertangani	5.412	2.293	1.447	1.629	806
5	Sisa RTLH yang belum tertangani	600	26.342	24.895	23.266	22.460
6	Persentase rumah layak huni	99,80	92,58	92,98	93,4	93,67
7	Persentase rumah tidak layak huni	0,20	7,42	7,02	6,6	6,33
8	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	90,02	8,01	5,49	6,54	3,46
9	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	93,96	73,26	71,44	71,09	69,80

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2024

Sampai akhir tahun 2024, persentase rumah layak huni di Kabupaten Kebumen sebesar 6,33%. Hal ini menunjukkan masih terdapat 22.460 RTLH yang perlu mendapat intervensi. Pemenuhan rumah akibat bencana merupakan indikator SPM urusan perumahan yang harus dipenuhi. Pada tahun 2024 penanganan rumah akibat korban bencana sebanyak 10 unit menurun dari tahun 2023 sebanyak 11 unit. Keterbatasan pemenuhan SPM ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dialokasikan di bidang perumahan. Sampai akhir tahun 2024 jumlah rumah korban bencana di Kabupaten Kebumen yang belum tertangani sebanyak 80 unit. Pemenuhan SPM perumahan korban bencana tetap terus dilaksanakan di tahun mendatang.

Tabel II.30. Penanganan Rumah Korban Bencana Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah korban bencana	127	118	112	91	80
2	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	9	6	21	11	10
3	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani s.d. tahun n	9	15	36	47	57
4	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota (%)	7,08	11,81	28,34	37,00	100
5	Jumlah rumah korban bencana yang belum tertangani s/d tahun n	118	112	91	80	70

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2024

2.5.4. Konsumsi dan Ketersediaan Pangan

2.5.4.1. Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 menjelaskan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang wajib untuk dipenuhi. Tahun 2024, kebutuhan pangan di Kabupaten Kebumen sebesar 103.598,42 ton sedangkan ketersediaan sebesar 259.084,16 ton dengan surplus 155.485,74 ton. Apabila dilihat dari capaian kinerja sasaran strategis, ketahanan pangan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 40,97% dari tahun 2023 sedangkan kebutuhan pangan menurun 11,14%. Kondisi ketahanan pangan ditunjukkan dengan ketersediaan komoditas pangan strategis yaitu padi, jagung, kedelai dan gula. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan demografi yang ada.

Tabel II.31. Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kebutuhan Pangan (ton)	112.498,87	113.435,47	113.783,05	115.145,34	103.598,42
Jumlah Ketersediaan Pangan (ton)	265.101,09	324.355,40	334.743,16	229.663,98	259.084,16

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, 2024

2.5.4.2. Skor Pola Pangan Harapan

Dalam perencanaan penyediaan pangan mengacu pada peningkatan kemampuan produksi permintaan pangan (daya beli dan preferensi konsumen) dan pendekatan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang yang didukung oleh pengetahuan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Salah satu arah kebijakan pembangunan pangan dan pertanian dalam RPJMN 2025-2029 adalah kemandirian pangan meliputi ketersediaan, konsumsi dan tata kelola pangan. Indikator untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dinilai dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang.

Penguatan tata kelola pangan tidak hanya berhenti pada upaya memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan. Lebih lanjut harus berdampak pada penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman

konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Berdasarkan hasil analisis skor PPH selama 5 tahun terakhir, capaian skor PPH Kabupaten Kebumen tahun 2024 berada di angka 93,05 atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 91,9 atau mengalami kenaikan 1,15. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH lebih dari 90% menunjukkan pola konsumsi pangan di Kabupaten Kebumen sudah mendekati ideal sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan.

Tabel II.32. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kebumen per Kelompok Pangan Tahun 2020–2024

Kelompok Pangan	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Umbi-umbian	2,5	1,2	1,0	0,9	1,1	0,84
Pangan Hewani	24,0	17,6	17,5	18,2	19,2	20,92
Minyak & Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Buah/ biji Berminyak	1,0	0,3	0,4	0,3	0,3	0,38
Kacang-kacangan	10,0	6,8	6,4	8,7	9,2	8,97
Gula	2,5	2,3	2,3	1,9	2,0	1,94
Sayur & Buah	30,0	28,8	28,3	30,0	30,0	30,0
Skor PPH	100,0	87,0	85,9	90,0	91,9	93,05

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, 2024

2.5.4.3. Capaian Konsumsi Kelompok Pangan

Standar konsumsi berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII Tahun 2004 ditentukan sebesar 2.000 kkal/kapita/hari. Mulai tahun 2017, standar konsumsi sebesar 2.150 kkal/kapita/hari yang dihitung berdasarkan WNPG X Tahun 2012. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada Tabel II.33

Tabel II.33. Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020- 2024

URAIAN	Ideal WNPG X	2020	2021	2022	2023	2024
Beras (kg/kapita/tahun)	97,80	88,90	105,40	103,60	90	114,5
Umbi-umbian (kg/kapita/tahun)	39,20	11,40	14,60	12,00	14,2	11,9

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian konsumsi kelompok pangan beras tahun 2024 sebesar 114,5 atau meningkat dari 2023 dengan perolehan nilai di atas standar yaitu 97,80. Sedangkan komponen umbi-umbian dan pangan hewani serta sayur buah berada di bawah nilai ideal WNPG X.

Tabel II.34. Capaian Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Kelompok Pangan	Ideal WNPG X	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-padian	1.075,0	1.144,8	1.171,7	1.083,1	1.111	1.090,28
Umbi-umbian	129,0	33,8	46,8	39,1	47	35,37
Pangan Hewani	258,0	168,4	187,8	195,6	202	219,7
Minyak & Lemak	215,0	282,0	295,9	257,1	277	283,76
Buah/biji Berminyak	64,0	17,0	15,1	11,5	14	16,08
Kacang - kacangan	108,0	72,5	68,4	93,9	97	94,14
Gula	108,0	95,8	100,4	81,5	82	NA
Sayur & Buah	129,0	118,3	121,9	133,8	146	146,39
Lain-lain	64,0	39,6	47,6	45,2	51	NA
JUMLAH	2.150,0	1.972,2	2.055,6	1.940,8	2.027	1.885,72

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, 2024

Capaian konsumsi kelompok pangan dan konsumsi energi perkapita/hari menunjukkan bahwa konsumsi beras perlu diturunkan. Adapun konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan. Di sisi lain, jenis konsumsi kelompok pangan hewani juga dapat diperoleh dari produk perikanan.

2.5.5. Kondisi Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Kebumen dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,07% dan turun menjadi 5,07% pada tahun 2024. Peningkatan pengangguran terbuka terpengaruh pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 tetapi kembali turun mulai tahun 2021. Kondisi

tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kebumen tahun 2021-2024 menurun menjadi 5,92% pada tahun 2022, 5,11% pada tahun 2023 dan 5,07% pada tahun 2024. Capaian ini berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel II.35. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024

TPT	2020	2021	2022	2023	2024
Kebumen	6,07	6,03	5,92	5,11	5,07
Jawa Tengah	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kebumen tahun 2024 mencapai 855.785 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 77,37%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 5,07%.

Tabel II.36. Potret Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	491.831	363.954	855.785
Bekerja	462.526	349.853	812.379
Pengangguran Terbuka	29.305	14.101	43.406
Bukan Angkatan Kerja	66.566	183.674	250.240
Sekolah	28.129	35.222	63.351
Mengurus Rumah Tangga	19.095	133.484	152.579
Lainnya	19.342	14.968	34.310
Jumlah	558.379	547.628	1.106.025
Tingkat Kesempatan Kerja	94,04	96,13	94,93
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	88,08	66,46	77,37
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,96	3,87	5,07

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen yang bekerja didominasi oleh pekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 318.419 orang atau sebesar 39,19% diikuti lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 234.760 orang atau sebesar 28,90%. Sedangkan pekerja yang menamatkan pendidikan tinggi sebanyak 65.898 orang atau

sebesar 8,11%. Jika dilihat dari data pendidikan tinggi yang ditamatkan, penduduk yang menganggur didominasi oleh penduduk dengan lulusan SMA sebanyak 23.394 orang atau sebesar 53,89% dari jumlah pengangguran.

Tabel II.37. Potret Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen 2024 Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
Sekolah Dasar (SD)	318.419	9.508	327.927	97,10
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	193.302	7.491	200.793	96,27
Sekolah Menengah Atas (SMA)	234.760	23.394	258.154	90,94
Perguruan Tinggi	65.898	3.013	68.911	95,63
Jumlah	812.379	43.406	855.785	94,93

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Tabel II.38. Karakteristik Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pertanian	192.634	99.872	292.506
Manufaktur	99.619	98.439	198.056
Jasa	170.273	151.542	321.815
Total	462.526	349.853	812.379

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Sektor jasa merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sektor jasa mampu menyerap hingga 321.815 pekerja atau 39,61% dari total penduduk yang bekerja. Sementara sektor manufaktur merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja yaitu hanya menyerap 198.056 pekerja atau sekitar 24,38%.

Tabel II.39. Karakteristik Penduduk Bekerja di Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Berusaha Sendiri	97.279	71.469	168.748
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	121.430	44.330	165.760
Berusaha dibantu buruh tetap	7.928	2.201	10.129
Buruh/Karyawan/Pegawai	111.073	85.990	197.063
Pekerja Bebas	77.619	18.881	96.500

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pekerja Keluarga/Tak dibayar	47.197	126.982	174.179
Jumlah	462.526	349.853	812.379

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

2.6. Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan dan permasalahan kemiskinan, isu strategis kemiskinan di Kabupaten Kebumen yaitu tingginya angka kemiskinan yang menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kabupaten/kota di Jawa Tengah meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 sebesar 15,71%, lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah sebesar 9,58%.

Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Kebumen, tetapi juga ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin. Karakteristik rumah tangga miskin di Kabupaten Kebumen sebagian besar berpendidikan SD dan penghasilan utama bersumber dari sektor jasa dan pertanian.

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin. Hal ini disebabkan belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan pemenuhan infrastruktur dasar seperti penyediaan rumah layak huni, layanan air minum dan sanitasi aman. Di sisi lain, permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi dan hidrologi. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal kegiatan perekonomian masyarakat.

2.7. Gambaran Keuangan Daerah

Untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan sebagai instrumen fiskal yang berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pembangunan lintas sektor. APBD merupakan dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah, sekaligus berperan sebagai instrumen akuntabilitas dan komunikasi publik terkait prioritas kebijakan fiskal yang disepakati bersama DPRD.

Struktur APBD secara umum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.

Selain diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, alokasi ketiga komponen APBD juga dialokasikan untuk upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini tercermin melalui integrasi program berbagai sektor yang fokus pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi kerakyatan, serta perlindungan sosial.

2.7.1. Analisis Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan seluruh hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lainnya yang sah. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024, sebagaimana Tabel II.40 berikut:

Tabel II.40. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2024

NO	URAIAN PENDAPATAN	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2021-2024
	TOTAL PENDAPATAN	2.832.035.015.733	2.847.196.017.404	2.901.129.535.425	3.137.694.279.634	3,60%
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	472.017.087.115	512.346.375.475	463.650.961.705	484.291.013.938	0,87%
A.1.	Pajak daerah	112.474.854.190	129.843.875.322	137.222.705.502	139.432.389.479	7,99%
A.2.	Retribusi daerah	23.652.739.277	28.375.110.419	28.881.046.419	33.229.154.159	13,50%
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16.552.860.815	17.640.585.052	19.123.340.688	21.856.399.056	10,68%
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	319.336.632.833	336.486.804.682	278.423.869.096	289.773.071.244	-3,09%
B	Pendapatan Transfer	2.351.223.178.918	2.329.703.641.941	2.435.850.438.454	2.634.840.256.696	4,02%
B.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.187.883.684.115	2.123.296.694.941	2.250.967.223.263	2.366.495.205.883	2,72%
B.1.1.	Dana Perimbangan	1.736.189.371.115	1.706.540.321.941	1.783.201.602.063	1.884.387.249.883	2,85%
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	41.397.337.217	38.220.093.261	36.123.723.591	33.987.975.000	-5,97%
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	1.239.930.914.430	1.306.369.023.000	3,59%
B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	78.732.325.023	70.275.269.743	49.510.073.990	68.388.503.136	-4,38%
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	436.770.798.875	424.339.890.137	457.636.890.052	475.641.748.747	2,97%
B.1.2.	Insentif Fiskal	46.433.860.000	0	11.805.728.000	20.849.462.000	-18,37%
B.1.3.	Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	455.959.893.200	461.258.494.000	4,61%
B.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	163.339.494.803	206.406.947.000	184.883.215.191	268.345.050.813	21,43%
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	157.491.424.803	175.763.136.000	174.243.934.191	181.816.080.313	5,15%
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	5.848.070.000	30.643.811.000	10.639.281.000	86.528.970.500	459,87%
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.794.749.700	5.145.999.988	1.520.109.562	18.563.009.000	37,02%
C.1.	Pendapatan Hibah	8.794.749.700	5.145.999.988	1.520.109.562	18.563.009.000	37,02%

Sumber: BPKPD Kabupaten Kebumen, 2025

Pendapatan daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian daerah yang diantaranya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Selain itu, mulai tahun 2025 diberlakukan *opsen* Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya 30% menjadi 66% bagi PAD Kabupaten/Kota, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor cukup mempengaruhi PAD. Sementara itu, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bentuk dana transfer. Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini pun akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian nasional dan provinsi.

Realisasi pendapatan daerah pasca pandemi Covid-19 menunjukkan kinerja yang terus membaik. Realisasi pendapatan daerah selama tahun 2021-2024 mengalami peningkatan sebesar 3,60% per tahun yaitu dari Rp.2.832.035.015.733,00 pada tahun 2021 menjadi Rp.3.137.694.279.634,00 pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. PAD mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,87% selama tahun 2021-2024, terkecil jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari 16,67% pada tahun 2021 menjadi 15,43% pada tahun 2024 dengan rata-rata proporsi sebesar 16,52%, Hal ini menunjukkan masih terbatasnya kemandirian keuangan daerah, Secara rinci, kinerja masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,99% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 4,43%;
 - b. Retribusi daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,50% atau tertinggi dibandingkan komponen PAD yang lain, dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,97%;

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,68% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,64%; serta
 - d. Lain-lain PAD yang Sah menjadi satu-satunya yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif atau berkontraksi -3,09%. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan pendapatan BLUD, dimana dengan telah berakhirnya pandemi Covid-19 pada tahun 2023 menyebabkan permintaan layanan terkait Covid-19 (seperti tes PCR) terus menurun/atau sudah tidak terdapat *demand* lagi. Pada tahun 2022, layanan terkait Covid-19 sempat memberikan kenaikan pendapatan yang cukup signifikan bagi BLUD. Namun demikian, proporsi terhadap total pendapatan daerah tetap menjadi yang terbesar dibandingkan komponen PAD yang lainnya yaitu dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 10,48%.
2. Pendapatan transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,02% selama tahun 2021-2024. Namun demikian, proporsi terhadap total pendapatan daerah tetap menjadi yang terbesar, yaitu dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 83,20%, bahkan cenderung meningkat dari 83,02% pada tahun 2021 menjadi 83,97% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih bergantungnya pembiayaan APBD Kabupaten Kebumen dari pendapatan transfer. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat secara agregat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,72% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 76,21%. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:
 - i) Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami rata-rata pertumbuhan negatif atau berkontraksi sebesar -5,97%. Penurunan ini dikarenakan adanya kecenderungan strategi dari pemerintah pusat dengan mengganti/menggeser menjadi insentif fiskal khususnya pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu rata-

rata proporsi DBH terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 1,28%;

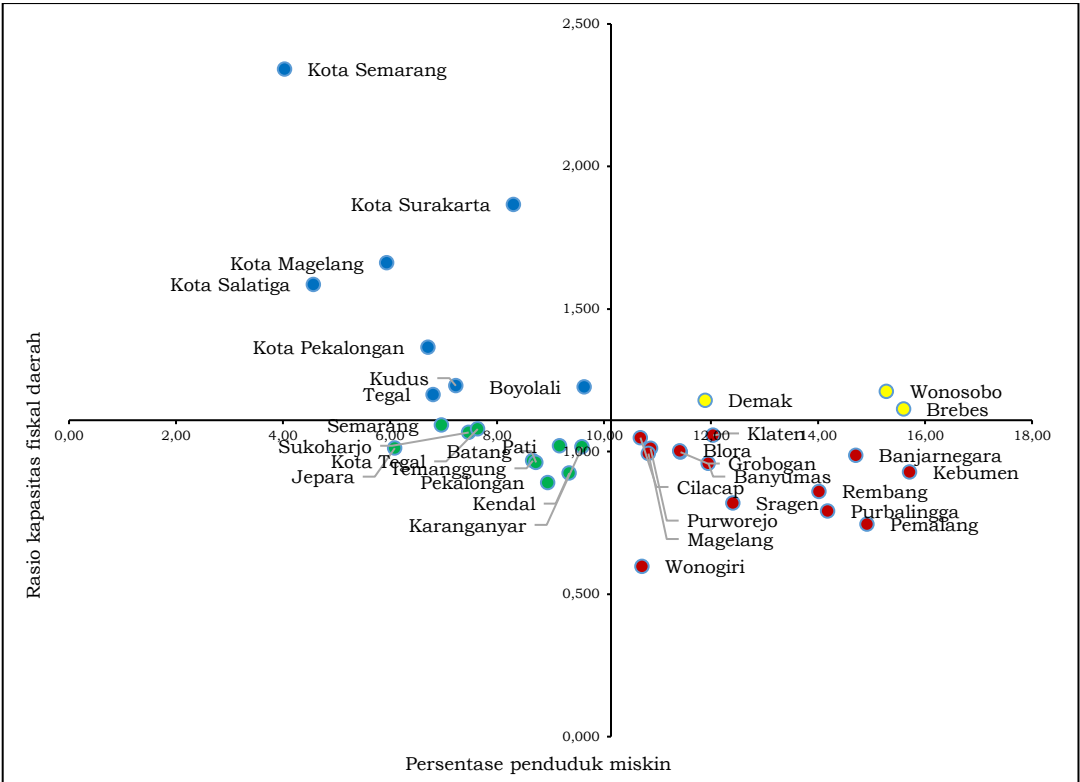
- ii) Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3,59% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 41,81% yang merupakan sumber pendanaan terbesar bagi APBD Kabupaten Kebumen. Namun demikian, sejak tahun 2023 telah diberlakukan ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yaitu adanya DAU Earmark yang secara nominal menambah alokasi DAU, tetapi penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat (mandatory) sehingga sangat membatasi fleksibilitas ruang fiskal APBD;
- iii) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) justru mengalami rata-rata pertumbuhan negatif atau berkontraksi -4,38% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 2,28%. Hal ini dikarenakan alokasi DAK Fisik sangat dipengaruhi oleh lokus prioritas nasional, dimana terkadang tidak semua daerah menjadi lokus bagi beberapa bidang DAK Fisik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat;
- iv) Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK-NF) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,97% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 15,31%. DAK-NF lebih bersifat rutin yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, DAK-NF didominasi oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- v) Insentif Fiskal (IF) justru mengalami rata-rata pertumbuhan negatif atau berkontraksi sebesar -18,37% dikarenakan tidak memperoleh alokasi pada tahun 2022. Adanya perubahan ketentuan penerima IF dari sebelumnya untuk semua daerah yang mendapatkan opini WTP, menjadi diberikan kepada daerah yang memperoleh prestasi misalkan penanganan kemiskinan, stunting, dan inflasi. Namun demikian, jika

diperhatikan pemberian alokasi IF cenderung hanya mengurangi/memindahkan dari alokasi DBH. Sementara itu, rata-rata proporsi IF terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,68%, terkecil dari seluruh komponen pendapatan transfer yang diperoleh; serta

- vi) Dana Desa (DD) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,61% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 14,84%. DD bersifat transfer atau hanya melewati rekening kas pemerintah kabupaten untuk selanjutnya ditransfer langsung ke rekening kas pemerintah desa;
- b. Pendapatan transfer antardaerah secara keseluruhan diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang secara agregat mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup signifikan yaitu sebesar 21,43% karena adanya signifikansi kenaikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.86,528,970,500,00. Sementara itu, rata-rata proporsi pendapatan transfer antardaerah terhadap total pendapatan daerah sebesar 6,99%. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen pendapatan transfer antardaerah adalah sebagai berikut:
 - i) Pendapatan bagi hasil mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,15% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 5,88% yang menunjukkan dominasi terhadap keseluruhan pendapatan transfer antardaerah sekitar 73,68%. Hingga tahun 2024, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi bagian dari pendapatan bagi hasil sebesar 30% dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten; serta
 - ii) Seperti disebutkan di atas, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan signifikan hingga 459,87% per tahun selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 1,10%.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2021-2024 hanya bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat yang bersifat reimburse. Sepanjang tahun 2021-2024, pemerintah

Kabupaten Kebumen selalu mendapatkan hibah air minum, sedangkan hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) telah berakhir pada tahun 2022 serta hibah sanitasi pada tahun 2023 oleh pemerintah pusat dialihkan dalam bentuk DAK Fisik. Pada tahun 2024, Kabupaten Kebumen juga mendapatkan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Oleh karena itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2021-2024 yang berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat mengalami peningkatan cukup signifikan hingga 37,02% per tahun dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,28%.

Secara struktur, pendapatan daerah juga ditopang oleh PAD. Hal ini menandai pergeseran menuju kemandirian fiskal yang apabila dikelola dengan tepat dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Di sisi lain kemandirian fiskal jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di satu daerah dapat dikelompokkan dalam 4 kuadran yaitu (1) rasio kapasitas fiskal daerah rendah dan persentase penduduk miskin tinggi, (2) rasio kapasitas fiskal daerah tinggi dan persentase penduduk miskin tinggi, (3) rasio kapasitas fiskal daerah rendah dan persentase penduduk miskin rendah, serta (4) rasio kapasitas fiskal daerah tinggi dan persentase penduduk miskin rendah. Pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan kapasitas fiskal daerah dan tingkat kemiskinan tahun 2024 tersaji dalam Gambar II.23 dan Tabel II.41.



Gambar II.23. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Dan Persentase Penduduk Miskin
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan PMK No 127 tentang Perubahan Atas PMK No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, diolah

Berdasarkan gambar II.23 dapat diketahui bahwa pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah dan persentase penduduk miskin, sebagaimana Tabel II.41 berikut:

Tabel II.41. Pengelompokan Kabupaten/kota Berdasarkan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024

Kuadran I (14 kabupaten) (Kapasitas fiskal rendah dan persentase penduduk miskin tinggi)	Kebumen, Banjarnegara, Rembang, Purbalingga, Pemalang, Klaten, Blora, Grobogan, Banyumas, Cilacap, Sragen, Purworejo, Magelang dan Wonogiri
Kuadran II (3 kabupaten) (Kapasitas fiskal tinggi dan persentase penduduk miskin tinggi)	Brebes, Wonosobo dan Demak
Kuadran III (10 kabupaten/kota) (Kapasitas fiskal rendah dan persentase penduduk miskin rendah)	Pati, Batang, Temanggung, Pekalongan, Kendal, Karanganyar, Semarang, Sukoharjo, Jepara dan Kota Tegal
Kuadran IV (8 kabupaten/kota) (Kapasitas fiskal tinggi dan persentase penduduk miskin rendah)	Boyolali, Tegal, Kudus, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Pekalongan

2.7.2. Analisis Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Kebumen disusun dengan mengedepankan *money follow program priority*, yang diperuntukkan dalam rangka mendukung berbagai aspek seperti:

- 1. Pemenuhan aspek layanan dasar (pemenuhan SPM);
- 2. Pencapaian target/ sasaran RPJMD;

3. Pemenuhan *mandatory spending*:
 - a. Belanja pegawai maksimal 30%;
 - b. Belanja pendidikan minimal 20%;
 - c. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Minimal 40%; dan
 - d. Belanja minimal terhadap penerimaan Pajak daerah dan DBH Pajak Rokok.
 4. Peningkatan kapasitas ASN;
 5. Pengawasan (APIP).
- Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024 terlampir pada tabel berikut ini:

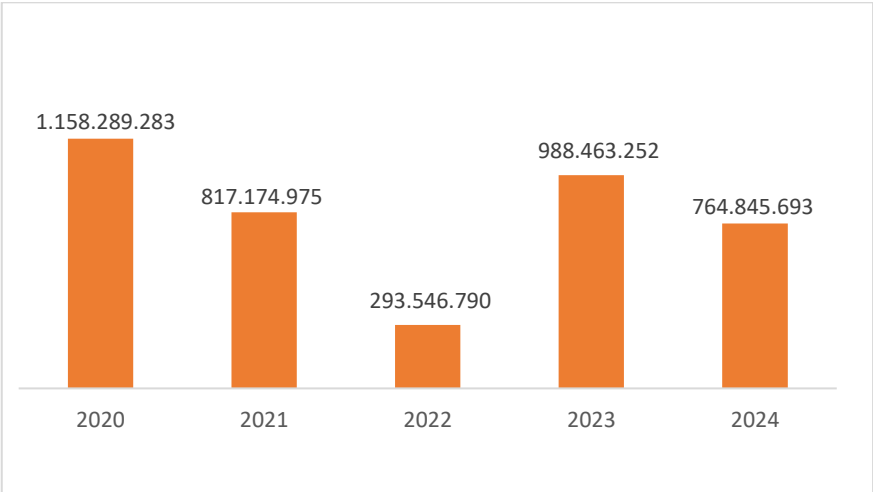
Tabel II.42. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2024

Rekening	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Belanja Pegawai	1.141.295.419.703	1.142.207.137.167	1.153.775.444.865	1.188.427.007.238
Belanja Barang dan Jasa	666.965.891.277	704.907.763.493	726.725.182.478	800.813.552.333
Belanja Modal	266.110.950.340	272.301.599.864	278.842.913.538	278.735.832.493
BTT	545.318.400	1.295.204.500	409.940.801	323.000.000
Belanja Transfer	610.545.516.650	632.491.265.300	676.974.543.619	701.849.108.462
Belanja Daerah	2.779.840.698.100	2.824.358.293.725	2.977.141.914.829	3.126.694.533.457

Sumber: BPKPD Kabupaten Kebumen, 2025

2.7.3. Analisis Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Alokasi anggaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen pada periode 2020–2024 disusun dengan mempertimbangkan aspek perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, melalui integrasi program lintas perangkat daerah. Secara umum, dinamika anggaran penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem bersifat fluktuatif yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun penyesuaian kebijakan fiskal. Alokasi anggaran difokuskan untuk intervensi langsung seperti untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pangan dan sosial yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan. Realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Kebumen tahun 2021-2024, sebagaimana Gambar II.24 berikut:



Gambar II.24 Anggaran Kemiskinan Tahun 2020-2024
Sumber: Bapperida Kabupaten Kebumen, 2024 (diolah)

2.7.4. Pembiayaan Non APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan, selain bersumber dari APBD juga dimungkinkan pembiayaan non APBD. Pembiayaan ini merupakan alternatif dalam memenuhi kebutuhan penanggulangan kemiskinan karena keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD. Pembiayaan non APBD dapat berasal dari swasta/privat, organisasi/lembaga maupun masyarakat. Guna efektivitas penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Kebumen melakukan upaya kolaborasi bersama Lembaga Swasadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Nirlaba (NPO), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi, melainkan juga memperhatikan dimensi lain seperti non ekonomi. Oleh karena itu, intervensi penanggulangan kemiskinan termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan secara menyeluruh baik makro maupun mikro yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama lima tahun ke depan disusun dengan mendasari apa yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen mendasari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Strategi ini dilakukan melalui bantuan dan perlindungan sosial, berupa beasiswa bagi siswa dan santri kurang mampu, pembayaran premi BPJS Kesehatan, bantuan langsung tunai, bantuan permakanaan dan sandang serta bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, subsidi pangan serta fasilitasi bantuan hukum bagi warga kurang mampu.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. Strategi ini dilakukan dengan program rehabilitasi sosial

melalui bantuan pelatihan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

3. Meniminimalkan kantong-kantong kemiskinan dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi ini dilakukan melalui program yang tidak langsung menyentuh warga kurang mampu tapi dampaknya dapat dirasakan oleh semua pihak, seperti bantuan rumah tidak layak huni, subsidi harga barang kebutuhan pokok, rapat koordinasi pengendalian inflasi, rapat koordinasi TKPK serta koordinasi dengan semua *stakeholder*.

Selain strategi di atas, pemerintah daerah juga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti pelatihan bagi calon tenaga kerja, bursa kerja, pelatihan dan pendampingan usaha mikro dan kecil, pemberian bibit tanaman, pemberian bantuan sarana dan prasarana perdagangan, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan benih padi dan ikan, serta bantuan modal. Agar intervensi penanggulan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem lebih tepat sasaran diperlukan sebuah data sasaran yang valid. Untuk itu, diperlukan perbaikan data penduduk miskin. Perbaikan ini dilakukan oleh Dinas Sosial P3A selaku Kelompok Kerja Data dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Sumber pembiayaan program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Selain itu, dukungan pendanaan di tingkat desa melalui Dana Desa seringkali digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sosial, ketahanan pangan maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Lembaga swasta dan dunia usaha seringkali berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dengan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan seringkali berupa pemberian bantuan sosial, bantuan biaya pendidikan, kesehatan, pemenuhan infrastruktur dasar maupun program yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Kemitraan dan kerja sama dengan swasta dapat dioptimalkan dalam rangka membangun sinergi penanggulangan kemiskinan selain melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perlunya inovasi sumber pendanaan dan/atau melakukan pendekatan-pendekatan alternatif sumber pembiayaan agar jangkauan program penanggulangan kemiskinan lebih luas. Terdapat beberapa mekanisme pendanaan yang dapat

dilakukan seperti skema *Public-Private Partnership* (PPP) yang dianggap lebih efisien dan berkelanjutan. Secara lengkap Matrik Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2030 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel III.1. Matrik Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2030

1) Tahun Anggaran 2025

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
1	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Disdikpora	1.01.02 1.01.02.2.01 1.01.02.2.01.0054	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Beasiswa (Siswa Kurang Mampu, Yatim Piatu, Disabilitas, Santri)			1.057.840.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	2.500	400.000	Uang Tunai	1 Kali
2			1.01.02 1.01.02.2.02 1.01.02.2.02.0039		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Beasiswa (Siswa Kurang Mampu, Yatim Piatu, Disabilitas, Santri)			1.938.832.793	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	1.500	730.000	Uang Tunai	1 Kali
3			1.01.02 1.01.02.2.02 1.01.02.2.04.0014		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Peralatan Sekolah Bagi Siswa ATS			83.860.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	150	400.000 (Paket A) 730.000 (Paket C)	Bantuan Alat Sekolah	1 Kali
4	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinkes PPKB	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.0026	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Premi BPJS	43.053.136.482	APDB	Berkelanjutan	Kab. Kebumen	94.568	37.800	Biaya Premi	12 Bulan
5	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan				3.741.745.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	1.363	100 anak terlantar; 100 lanjut usia terlantar; 50 disabilitas terlantar; 20 gelandangan dan pengemis (Rp. 1.485.852) serta 493 fakir miskin (Rp. 1.485.852) 600 lansia terlantar (Rp. 23.115)	Sembako	1 Tahun

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
6	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0002	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	Pemberian bantuan pakaian/ sandang bagi anak terlantar, disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis			93.507.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	270	100 anak terlantar; 100 lanjut usia terlantar; 50 disabilitas terlantar; 20 gelandangan dan pengemis		
7			1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0003				Bantuan kursi roda, Kruk, Alat Bantu Dengar.			66.177.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	62	Jumlah Kursi Roda 13 Unit @ Rp. 1.937.175; Alat bantu Dengar 26 Unit @Rp. 465.750; Kruk Ketiak 3 Unit @Rp. 240.983; Tongkat Elbow 3 unit @Rp. 282.900; Walker 1 unit @672.750		
8			1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0008				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			187.580.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	120	1.500.000	Bantuan Uang	
9	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0003	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Bantuan Sembako (Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan PM rumah singgah Dosaraso)			269.730.600	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	140	Penerima Manfaat Rumah Singgah diberikan makanan siap saji 1 hari 3x makan	Sembako dan Permakanan	
10		Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0004			Penyediaan Sandang	Bantuan sandang/ pakaian			81.329.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	120 Orang	1.500.000	Bantuan Uang	
11		Dinsos P3A	1.06.05 1.06.05.2.02	Program Perlindungan Dan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Fasilitasi Bantuan Sosial	Bantuan Langsung			5.378.853.400	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	4.280 PPM	300.000	Bantuan Langsung Tunai	

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
			1.06.05.2.02.0006	Jaminan Sosial	Daerah Kabupaten/ Kota	Kesejahteraan Keluarga	Tunai DBHCHT										
12		Bagian Hukum Setda	4.01.02 4.01.02.2.03 4.01.02.2.03.0002	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pendampingan Hukum			40.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	10 Orang	Sesuai Indeks 3.000.000 s.d 4.000.000/ kasus	Jasa Pendamping Hukum	
		Bagian Hukum Setda	4.01.02 4.01.02.2.02 4.01.02.2.02.0001		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Beasiswa Santri			720.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	720	1.000.000	Bantuan Uang	
13	Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin dan Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0007	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pelatihan			81.802.600	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	100 Orang	SSH	Bantuan Pelatihan	
14	Meminimalkan kantong-kantong kemiskinan dan Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan	Disperkim-hub	1.04.04 1.04.04.2.01 1.04.04.2.01.0001	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Bantuan Rumah Tidak Layak Huni		534.862.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	20 Unit	20.000.000	Bantuan Material dan Ongkos Tukang	
15		Bapperida	5.01.03 5.01.03.2.01 5.01.03.2.01.0005	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Makan Minum, BBM, Fotokopi, ATK, Honor Narsum rakor TKPK, Perjadin	98.009.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	PD Terkait	Sesuai Indeks SSH	-	

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
16		Bagian Perekonomian Setda	4.01.03 4.01.03.2.01 4.01.03.2.01.0002	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Makan Minum, BBM, Perjadin	43.505.124	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	PD terkait	Sesuai Indeks SSH		
17		Disperindag KUKM	3.30.04 3.30.04.2. 3.30.04.2.02.0003	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Subsidi Harga		595.185.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	Warga Kurang Mampu sesuai Data Kemiskinan	Sesuai Indeks Subsidi		
18		Dinsos P3A	1.06.05 1.06.05.2.02 1.06.05.2.02.0008	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			Makan Minum Rapat	124.004.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	Opertaor Data Kemiskinan	Sesuai SSH	Makan Minum Rapat	1 Kali
Jumlah										58.189.886.499							

2) Tahun Anggaran 2026

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
1	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Disdikpora	1.01.02 1.01.02.2.01 1.01.02.2.01.0054	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Beasiswa (Siswa Kurang Mampu, Yatim Piatu, Disabilitas, Santri)			1.130.000.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	2.700	400.000	Uang Tunai	1 Kali
2			1.01.02 1.01.02.2.02 1.01.02.2.02.0039		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Beasiswa (Siswa Kurang Mampu, Yatim Piatu, Disabilitas, Santri)			1.535.074.600	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	1.800	730.000	Uang Tunai	1 Kali
3			1.01.02 1.01.02.2.02 1.01.02.2.04.0014		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Peralatan Sekolah Bagi Siswa ATS			689.000.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	975	400.000 (Paket A) 730.000 (Paket C)	Bantuan Alat Sekolah	1 Kali
4	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinkes PPKB	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.0026	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Premi BPJS	71.414.858.000	APDB	Berkelanjutan	Kab. Kebumen	171.454	37.800	Biaya Premi	1 Tahun
5	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan				1.872.792.023	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	1.054	100 anak terlantar, 100 lanjut usia terlantar, 50 disabilitas terlantar, 20 gelandangan dan pengemis (Rp. 1.485.852) serta 493 fakir miskin (Rp. 1.485.852) 600 lansia terlantar (Rp. 23.115)	Sembako	1 Tahun
6	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0002	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Penyediaan Sandang	Pemberian bantuan pakaian/ sandang bagi anak			93.507.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	300			

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
					Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		terlantar, disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis										
7			1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0003			Penyediaan Alat Bantu	Bantuan kursi roda, Kruk, Alat Bantu Dengar.			66.177.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	22			
8			1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0008			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Bantuan Uang			187.580.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	120	1.500.000		
9	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0003	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Bantuan Sembako (Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan PM rumah singgah Dosaraso)			211.643.500	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	150			
10		Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0004			Penyediaan Sandang	Bantuan sandang/ pakaian			78.329.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	100 Orang			
11		Dinsos P3A	1.06.05 1.06.05.2.02 1.06.05.2.02.0006	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Langsung Tunai DBHCHT			367.831.9000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	2.375 PPM	300.000	Bantuan Langsung Tunai	
12		Bag. Hukum Setda	4.01.02 4.01.02.2.03 4.01.02.2.03.0002			Fasilitasi Bantuan Hukum	Pendampingan Hukum			39.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	12 Orang			
13	Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin dan Mengembangkan dan menjamin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0007	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pelatihan Keterampilan, keagamaan dan senam			210.302.200	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	100 Orang	SSH	Bantuan Pelatih	

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
	keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil				NAPZA di Luar Panti Sosial												
14	Meminimalkan kantong-kantong kemiskinan dan Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan	Disperkim-hub	1.04.04 1.04.04.2.01 1.04.04.2.01.0001	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Bantuan Rumah Tidak Layak Huni		2.212.576.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	101 Unit	20.000.000	Bantuan Material dan Ongkos Tukang	
15		Bapperida	5.01.03 5.01.03.2.01 5.01.03.2.01.0005	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Makan Minum, BBM, Fotokopi, ATK, Honor Narsum rakor TKPK, Perjadin	108.500.00	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	PD Terkait	Sesuai Indeks SSH	-	
16		Bagian Perekonomian Setda	4.01.03 4.01.03.2.01 4.01.03.2.01.0002	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Makan Minum, BBM, Perjadin	52.500.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	PD terkait	Sesuai Indeks SSH		
17		Disperindag KUKM	3.30.04 3.30.04.2. 3.30.04.2.02.0003	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Subsidi Harga		1.720.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	Warga Kurang Mampu Yang Masuk Data Kemiskinan	Sesuai Indeks Subsidi		
Jumlah										85.300.158.323							

3) Tahun Anggaran 2027

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
1.	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Disdikpora	1.01.02 1.01.02.2.01 1.01.02.2.01.0054	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Beasiswa (Siswa Kurang Mampu, Yatim Piatu, Disabilitas, Santri)			1.130.000.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	2.700	400.000	Uang Tunai	1 Kali
2.			1.01.02 1.01.02.2.02 1.01.02.2.02.0039		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Beasiswa (Siswa Kurang Mampu, Yatim Piatu, Disabilitas, Santri)			2.025.791.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	1.800	730.000	Uang Tunai	1 Kali
3			1.01.02 1.01.02.2.02 1.01.02.2.04.0014		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Peralatan Sekolah Bagi Siswa ATS			692.000.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	975	400.000 (Paket A) 730.000 (Paket C)	Bantuan Alat Sekolah	1 Kali
4	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinkes PPKB	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.0026	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Premi BPJS	80.577.750.135	APDB	Berkelanjutan	Kab. Kebumen	171.454	37.800	Biaya Premi	1 Tahun
5	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan				2.058.089.023	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	1.054	100 anak terlantar, 100 lanjut usia terlantar, 50 disabilitas terlantar, 20 gelandangan dan pengemis (Rp. 1.485.852) serta 493 fakir miskin (Rp. 1.485.852) 600 lansia terlantar (Rp. 23.115)	Sembako	1 Tahun
6	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0002	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Penyediaan Sandang	Pemberian bantuan pakaian/ sandang bagi anak			93.507.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	300			

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
					Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		terlantar, disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis										
7			1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0003			Penyediaan Alat Bantu	Bantuan kursi roda, Kruk, Alat Bantu Dengar.			96.177.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	22			
8			1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0008			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Bantuan Uang			187.580.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	120	1.500.000		
9	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0003	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanaan	Bantuan Sembako (Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan PM rumah singgah Dosaraso)			264.730.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	150			
10		Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0004			Penyediaan Sandang	Bantuan sandang/ pakaian			78.329.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	100 Orang			
11		Dinsos P3A	1.06.05 1.06.05.2.02 1.06.05.2.02.0006	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Langsung Tunai DBHCHT			128.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	2.375 PPM	300.000	Bantuan Langsung Tunai	
12		Bag. Hukum Setda	4.01.02 4.01.02.2.03 4.01.02.2.03.0002	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pendampingan Hukum			39.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	12 Orang			
13	Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin dan Mengembangkan dan menjamin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0007	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pelatihan Keterampilan, keagamaan dan senam			116.683.200	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	100 Orang	SSH	Bantuan Pelatih	

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
	keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil				NAPZA di Luar Panti Sosial												
14	Meminimalkan kantong-kantong kemiskinan dan Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan	Disperkimhub	1.04.04 1.04.04.2.01 1.04.04.2.01.0001	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Bantuan Rumah Tidak Layak Huni		2.085.704.800	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	101 Unit	20.000.000	Bantuan Material dan Ongkos Tukang	
15		Bapperida	5.01.03 5.01.03.2.01 5.01.03.2.01.0005	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Makan Minum, BBM, Fotokopi, ATK, Honor Narsum rakor TKPK, Perjadin	188.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	PD Terkait	Sesuai Indeks SSH	-	
16		Bag. Perekonomian	4.01.03 4.01.03.2.01 4.01.03.2.01.0002	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Makan Minum, BBM, Perjadin	77.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	PD terkait	Sesuai Indeks SSH		
17		Disperindag KUKM	3.30.04 3.30.04.2. 3.30.04.2.02.0003	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Subsidi Harga		2.720.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	Warga Kurang Mampu Yang Masuk Data Kemiskinan	Sesuai Indeks Subsidi		
Jumlah										92.558.341.158							

4) Tahun Anggaran 2028

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
1	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Disdikpora	1.01.02 1.01.02.2.01 1.01.02.2.01.0054	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Beasiswa (Siswa Kurang Mampu, Yatim Piatu, Disabilitas, Santri)			1.130.000.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	2.700	400.000	Uang Tunai	1 Kali
2			1.01.02 1.01.02.2.02 1.01.02.2.02.0039				Beasiswa (Siswa Kurang Mampu, Yatim Piatu, Disabilitas, Santri)			2.025.791.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	1.800	730.000	Uang Tunai	1 Kali
3			1.01.02 1.01.02.2.02 1.01.02.2.04.0014		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Peralatan Sekolah Bagi Siswa ATS			692.000.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	975	400.000 (Paket A) 730.000 (Paket C)	Bantuan Alat Sekolah	1 Kali
4	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinkes PPKB	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.0026	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Premi BPJS	86.470.775.404	APDB	Berkelanjutan	Kab. Kebumen	171.454	37.800	Biaya Premi	1 Tahun
5	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan				7.788.089.023	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	1.054	100 anak terlantar, 100 lanjut usia terlantar, 50 disabilitas terlantar, 20 gelandangan dan pengemis (Rp. 1.485.852) serta 493 fakir miskin (Rp. 1.485.852) 600 lansia terlantar (Rp. 23.115)	Sembako	1 Tahun
6	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0002	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Penyediaan Sandang	Pemberian bantuan pakaian/ sandang bagi anak terlantar,			93.507.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	300			

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
					Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis										
7			1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0003			Penyediaan Alat Bantu	Bantuan kursi roda, Kruk, Alat Bantu Dengar.			71.177.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	22			
8			1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0008			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Bantuan Uang			187.580.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	120	1.500.000		
9	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0003	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Bantuan Sembako (Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan PM rumah singgah Dosaraso)			264.730.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	150			
10		Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0004			Penyediaan Sandang	Bantuan sandang/ pakaian			78.329.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	100 Orang			
11		Dinsos P3A	1.06.05 1.06.05.2.02 1.06.05.2.02.0006	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Langsung Tunai DBHCHT			1.015.800.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	2.375 PPM	300.000	Bantuan Langsung Tunai	
12		Bag. Hukum Setda	4.01.02 4.01.02.2.03 4.01.02.2.03.0002	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Fasilitasi Bantuan Hukum	Pendampingan Hukum			39.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	12 Orang			
13	Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin dan Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0007	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pelatihan Keterampilan, keagamaan dan senam			21.574.980	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	100 Orang	SSH	Bantuan Pelatih	

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan	
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang									
	usaha ekonomi mikro dan kecil				NAPZA di Luar Panti Sosial													
14	Meminimalkan kantong-kantong kemiskinan dan Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan	Disperkim-hub	1.04.04 1.04.04.2.01 1.04.04.2.01.0001	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Bantuan Rumah Tidak Layak Huni		2.085.704.800	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	101 Unit	20.000.000	Bantuan Material dan Ongkos Tukang		
15		Bapperida	5.01.03 5.01.03.2.01 5.01.03.2.01.0005	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Makan Minum, BBM, Fotokopi, ATK, Honor Narsum rakor TKPK, Perjadin	189.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	PD Terkait	Sesuai Indeks SSH	-		
16		Bag. Perekonomian	4.01.03 4.01.03.2.01 4.01.03.2.01.0002	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Makan Minum, BBM, Perjadin	77.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	PD terkait	Sesuai Indeks SSH			
17		Disperindag KUKM	3.30.04 3.30.04.2. 3.30.04.2.02.0003	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Subsidi Harga		2.720.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	Warga Kurang Mampu Yang Masuk Data Kemiskinan	Sesuai Indeks Subsidi			
Jumlah										104.950.058.207								

5) Tahun Anggaran 2029

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
1	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Disdikpora	1.01.02 1.01.02.2.01 1.01.02.2.01.0054	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Beasiswa (Siswa Kurang Mampu, Yatim Piatu, Disabilitas, Santri)			1.130.000.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	2.700	400.000	Uang Tunai	1 Kali
2			1.01.02 1.01.02.2.02 1.01.02.2.02.0039		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Beasiswa (Siswa Kurang Mampu, Yatim Piatu, Disabilitas, Santri)			2.025.791.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	1.800	730.000	Uang Tunai	1 Kali
3			1.01.02 1.01.02.2.02 1.01.02.2.04.0014		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Peralatan Sekolah Bagi Siswa ATS			694.000.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	975	400.000 (Paket A) 730.000 (Paket C)	Bantuan Alat Sekolah	1 Kali
4	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinkes PPKB	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.0026	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Premi BPJS	87.002.740.832	APDB	Berkelanjutan	Kab. Kebumen	171.454	37.800	Biaya Premi	1 Tahun
5	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan				10.788.089.023	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	1.054	100 anak terlantar, 100 lanjut usia terlantar, 50 disabilitas terlantar, 20 gelandangan dan pengemis (Rp. 1.485.852) serta 493 fakir miskin (Rp. 1.485.852) 600 lansia terlantar (Rp. 23.115)	Sembako	1 Tahun
6	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0002	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Penyediaan Sandang	Pemberian bantuan pakaian/ sandang bagi anak terlantar,			93.507.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	300			

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
					Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis										
7			1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0003			Penyediaan Alat Bantu	Bantuan kursi roda, Kruk, Alat Bantu Dengar.			96.285.220	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	22			
8			1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0008			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Bantuan Uang			187.580.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	120	1.500.000		
9	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0003	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Bantuan Sembako (Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan PM rumah singgah Dosaraso)			264.730.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	150			
10		Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0004			Penyediaan Sandang	Bantuan sandang/pakaian			78.329.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	100 Orang			
11		Dinsos P3A	1.06.05 1.06.05.2.02 1.06.05.2.02.0006	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Langsung Tunai DBHCHT			1.015.800.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	2.375 PPM	300.000	Bantuan Langsung Tunai	
12		Bag. Hukum Setda	4.01.02 4.01.02.2.03 4.01.02.2.03.0002	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pendampingan Hukum			39.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	12 Orang			
13	Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin dan Mengembangkan dan menjamin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0007	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pelatihan Keterampilan, keagamaan dan senam			21.574.980	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	100 Orang	SSH	Bantuan Pelatihan	

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
	keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil				NAPZA di Luar Panti Sosial												
14	Meminimalkan kantong-kantong kemiskinan dan Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan	Disperkimh ub	1.04.04 1.04.04.2.01 1.04.04.2.01.0001	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Bantuan Rumah Tidak Layak Huni		2.094.761.848	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	101 Unit	20.000.000	Bantuan Material dan Ongkos Tukang	
15		Bapperida	5.01.03 5.01.03.2.01 5.01.03.2.01.0005	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Makan Minum, BBM, Fotokopi, ATK, Honor Narsum rakor TKPK, Perjadin	191.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	PD Terkait	Sesuai Indeks SSH	-	
16		Bagian Perekonomian Setda	4.01.03 4.01.03.2.01 4.01.03.2.01.0002	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Makan Minum, BBM, Perjadin	77.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	PD terkait	Sesuai Indeks SSH		
17		Disperindag KUKM	3.30.04 3.30.04.2. 3.30.04.2.02.0003	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Subsidi Harga		2.720.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	Warga Kurang Mampu Yang Masuk Data Kemiskinan	Sesuai Indeks Subsidi		
Jumlah										108.520.188.903							

6) Tahun Anggaran 2030

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
1	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Disdikpora	1.01.02 1.01.02.2.01 1.01.02.2.01.0054	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Beasiswa (Siswa Kurang Mampu, Yatim Piatu, Disabilitas, Santri)			1.130.000.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	2.700	400.000	Uang Tunai	1 Kali
2			1.01.02 1.01.02.2.02 1.01.02.2.02.0039		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Beasiswa (Siswa Kurang Mampu, Yatim Piatu, Disabilitas, Santri)			2.025.791.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	1.800	730.000	Uang Tunai	1 Kali
3			1.01.02 1.01.02.2.02 1.01.02.2.04.0014		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Peralatan Sekolah Bagi Siswa ATS			694.000.000	APDB	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	975	400.000 (Paket A) 730.000 (Paket C)	Bantuan Alat Sekolah	1 Kali
4	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinkes PPKB	1.02.02 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.0026	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Premi BPJS	89.422.953.791	APDB	Berkelanjutan	Kab. Kebumen	171.454	37.800	Biaya Premi	1 Tahun
5	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan				3.765.303.823	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	1.054	1. 100 anak terlantar, 100 lanjut usia terlantar, 50 disabilitas terlantar, 20 gelandangan dan pengemis (Rp. 1.485.852) serta 493 fakir miskin (Rp. 1.485.852) 2. 600 lansia terlantar (Rp. 23.115)	Sembako	1 Tahun
6	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0002	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Penyediaan Sandang	Pemberian bantuan pakaian/ sandang bagi anak terlantar, disabilitas			93.507.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	300			

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
					Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis										
7			1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0003			Penyediaan Alat Bantu	Bantuan kursi roda, Kruk, Alat Bantu Dengar.			96.295.220	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	22			
8			1.06.04 1.06.04.2.01 1.06.04.2.01.0008			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Bantuan Uang			187.580.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	120	1.500.000		
9	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0003	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Bantuan Sembako (Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan PM rumah singgah Dosaraso)			264.730.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	150			
10		Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0004			Penyediaan Sandang	Bantuan sandang/ pakaian			78.329.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	100 Orang			
11		Dinsos P3A	1.06.05 1.06.05.2.02 1.06.05.2.02.0006	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Langsung Tunai DBHCHT			1.138.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	2.375 PPM	300.000	Bantuan Langsung Tunai	
12		Bag. Hukum Setda	4.01.02 4.01.02.2.03 4.01.02.2.03.0002	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pendampingan Hukum			39.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	12 Orang			
13	Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin dan Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan	Dinsos P3A	1.06.04 1.06.04.2.02 1.06.04.2.02.0007	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pelatihan Keterampilan, keagamaan dan senam			21.574.980	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	100 Orang	SSH	Bantuan Pelatihan	

No	Strategi	Perangkat Daerah	Kode	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Aktivitas Riil			Alokasi Anggaran	Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang								
	usaha ekonomi mikro dan kecil				NAPZA di Luar Panti Sosial												
14	Meminimalkan kantong kemiskinan dan Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan	Disperkim-hub	1.04.04 1.04.04.2.01 1.04.04.2.01.0001	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Bantuan Rumah Tidak Layak Huni		2.103.909.466	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	101 Unit	20.000.000	Bantuan Material dan Ongkos Tukang	
15		Bapperida	5.01.03 5.01.03.2.01 5.01.03.2.01.0005	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Makan Minum, BBM, Fotokopi, ATK, Honor Narsum rakor TKPK, Perjadin	196.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	PD Terkait	Sesuai Indeks SSH	-	
16		Bagian Perekonomian Setda	4.01.03 4.01.03.2.01 4.01.03.2.01.0002	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Makan Minum, BBM, Perjadin	77.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	PD terkait	Sesuai Indeks SSH		
17		Disperindag KUKM	3.30.04 3.30.04.2. 3.30.04.2.02.0003	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Subsidi Harga		2.720.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. Kebumen	Warga Kurang Mampu Yang Masuk Data Kemiskinan	Sesuai Indeks Subsidi		
Jumlah										104.053.964.280							

3.2. Target Tingkat Kemiskinan

Proyeksi tingkat kemiskinan disusun sebagai instrumen analitis untuk memperkirakan arah perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Proyeksi ini mempertimbangkan dinamika indikator makroekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, fluktuasi harga pangan dan energi, serta efektivitas program perlindungan sosial. Dengan demikian, proyeksi tingkat kemiskinan menjadi dasar dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan. Target tingkat kemiskinan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel III.2. Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 (%)

2026	2027	2028	2029	2030
14,30-13,40	13,27-12,41	12,24-11,42	11,20-10,43	10,50-9,73

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

3.3. Analisis Determinan Kemiskinan

3.3.1. Prioritas Intervensi Kemiskinan Bidang Konsumsi

Kemiskinan bidang konsumsi tercermin dari pengeluaran dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makan, sandang dan kebutuhan konsumsi lainnya. Intervensi dilakukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan daya beli masyarakat. Program intervensi kemiskinan bidang konsumsi, yaitu:

- a. Pemberian bantuan permakanaan;
Bantuan berupa sembako bagi anak terlantar, disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan penerima manfaat rumah singgah Dosaraso, serta bantuan permakanaan siap saji bagi lansia.
- b. Pemberian bantuan sandang/pakaian;
- c. Pemberian bantuan alat bantu disabilitas;
- d. Bantuan uang bagi penyadang cacat berat; dan
- e. Bantuan uang tunai bagi buruh dan petani tembakau

3.3.2. Prioritas Intervensi Kemiskinan Bidang Kesehatan

Intervensi kemiskinan bidang kesehatan dilakukan dengan memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Melalui program ini, pemerintah berupaya agar masyarakat memiliki akses

terhadap layanan kesehatan yang layak dan terjangkau. Dengan adanya jaminan kesehatan, beban biaya pengobatan yang sering kali menjadi hambatan utama dapat dikurangi, sehingga masyarakat tidak lagi menunda atau bahkan mengabaikan kebutuhan medis mereka. Selain itu, upaya ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3.3.3. Prioritas Intervensi Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar

Kemiskinan di bidang infrastruktur dasar mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Analisis yang dilakukan menyoroti bagaimana permasalahan infrastruktur dasar, terutama di wilayah permukiman, menjadi salah satu isu utama yang harus ditangani dalam upaya mengurangi kemiskinan secara komprehensif. Infrastruktur dasar mencakup aspek-aspek penting seperti rumah layak huni, akses air minum yang layak, sarana prasarana penyedia pangan dan jumlah pasar. Masing-masing sub-aspek ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Beberapa elemen kunci dari infrastruktur dasar yang disebutkan meliputi hunian yang layak, penting untuk menjamin tempat tinggal yang aman dan sehat bagi masyarakat. Hunian yang tidak memadai sering kali berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental penghuninya, serta berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi keluarga. Intervensi kemiskinan bidang infrastruktur dasar dilakukan dengan pemberian bantuan rumah tidak layak huni bagi warga miskin.

3.3.4. Prioritas Intervensi Kemiskinan Bidang Pendidikan

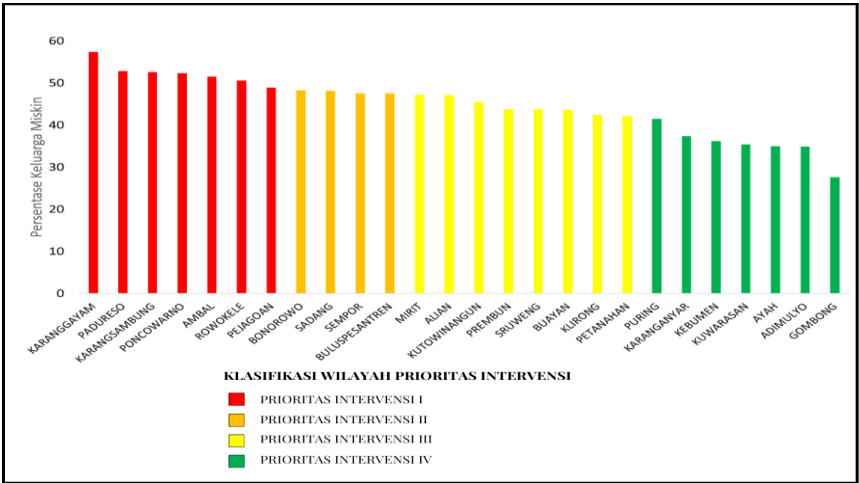
Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan menjadi salah satu aspek yang membutuhkan intervensi khusus dalam penanganannya. Program intervensi kemiskinan bidang pendidikan dilakukan melalui beasiswa bagi siswa kurang mampu, disabilitas, santri untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan/nonformal. Melalui dukungan tersebut, diharapkan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa terhambat oleh keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia dapat terus ditingkatkan, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

3.4. Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

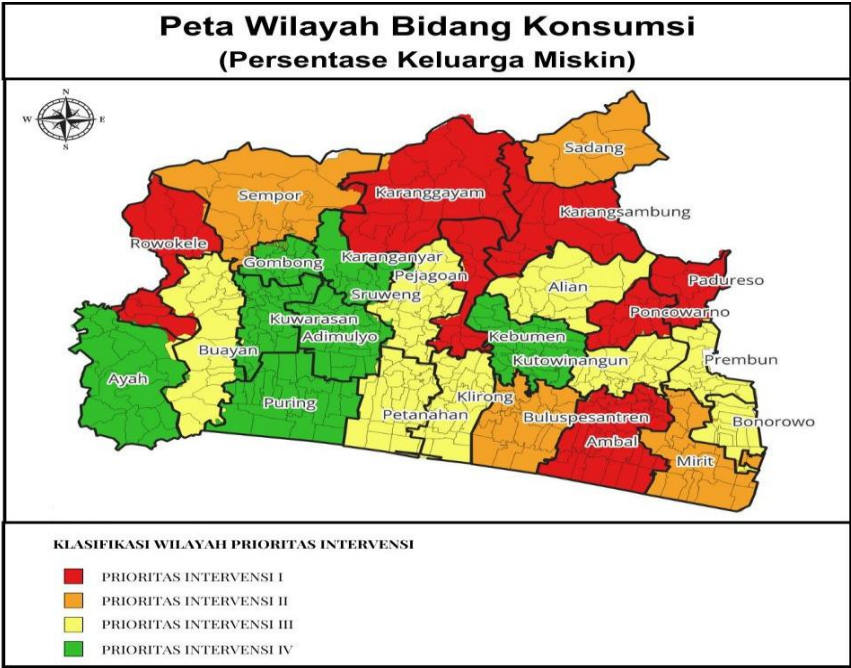
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2025, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen sebanyak 1,44 juta jiwa, sementara penduduk miskin sebesar 13,58% atau 162,54 ribu jiwa. Jumlah tersebut tersebar di perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya lokasi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Lokasi prioritas didasarkan pada analisis persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan lokasi prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan periode tahun 2025-2029. Lokasi prioritas ditentukan berdasarkan analisis determinan kemiskinan sebagai berikut:

3.4.1. Dimensi Kemiskinan Konsumsi

Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah berdasarkan dimensi kemiskinan konsumsi disusun dari persentase keluarga miskin per kecamatan di Kabupaten Kebumen. Hasil analisis disajikan melalui diagram batang (Gambar III.1.) dan peta prioritas wilayah (Gambar III.2.). Kecamatan yang menjadi prioritas 1 adalah kecamatan dengan persentase keluarga miskin yang tinggi di antara kecamatan di Kabupaten Kebumen. Kecamatan yang termasuk wilayah prioritas 1 adalah Ambal, Karanggayam, Karangsambung, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, dan Rowokele.



Gambar III.1. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin per Kecamatan
Sumber: DTKS, P3KE (diolah)

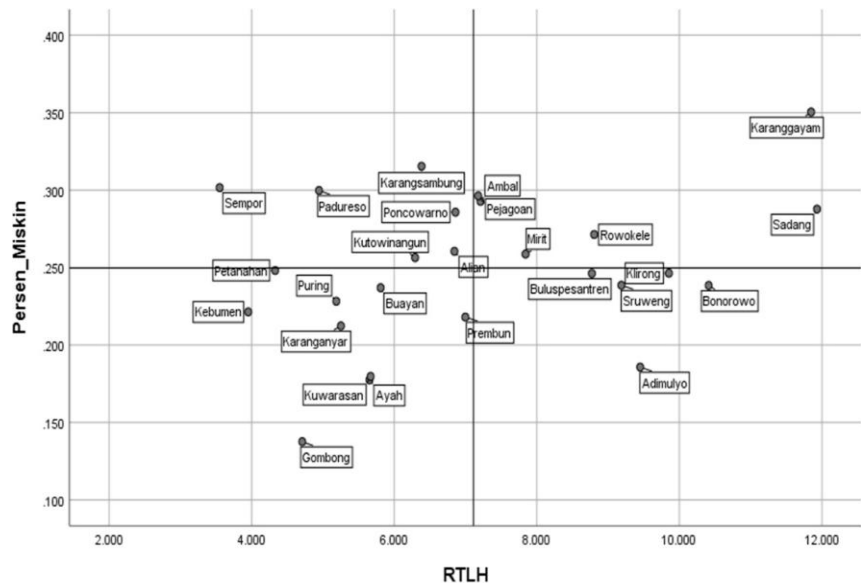


Gambar III.2. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin per Kecamatan.
Sumber: DTKS, P3KE (diolah)

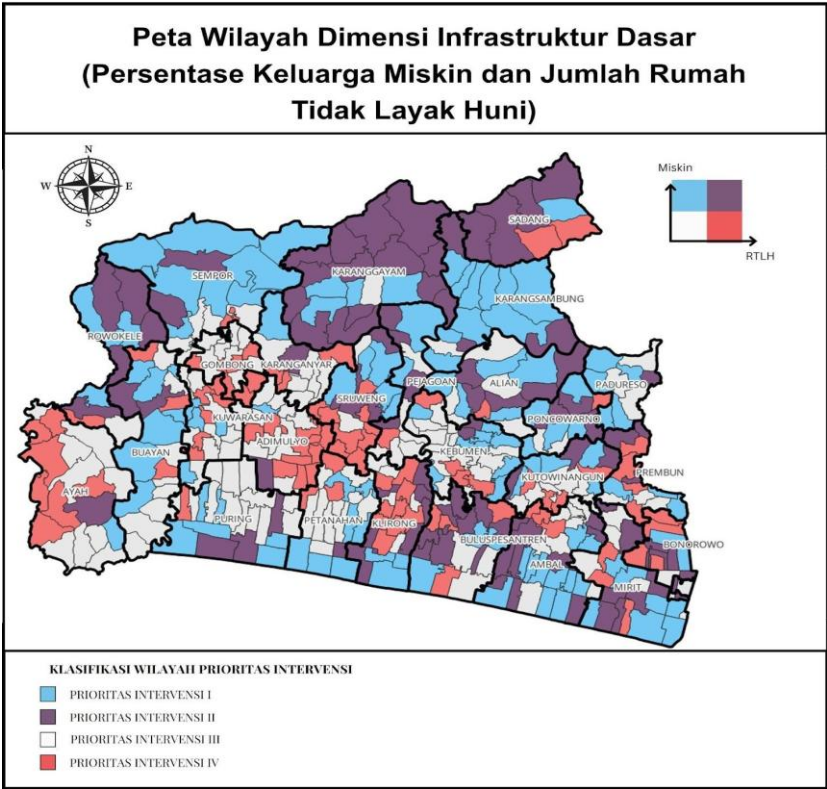
3.4.2. Dimensi Infrastruktur Dasar

Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah berdasarkan dimensi infrastruktur dasar disusun dari indikator persentase keluarga miskin dengan persentase rumah layak huni, persentase akses air minum layak, rasio sarana dan prasarana penyedia pangan, rasio jumlah pasar terhadap jumlah desa dan rata-rata jumlah industri mikro kecil. Hasil analisis disajikan ke dalam analisis empat kuadran (Gambar III.3., Gambar III.5., Gambar III.7., Gambar III.9. dan Gambar III.11.) dan peta prioritas wilayah (Gambar III.4., Gambar III.6., Gambar III.8., Gambar III.10. dan Gambar III.12.).

Indikator pertama pada dimensi infrastruktur dasar disusun dari persentase keluarga miskin dan persentase rumah tidak layak huni per kecamatan di Kabupaten Kebumen. Hasil analisis disajikan melalui analisis empat kuadran (Gambar III.3.) dan peta prioritas wilayah (Gambar III.4.). Kecamatan yang menjadi prioritas 1 adalah kecamatan dengan persentase keluarga miskin tinggi dan persentase rumah tidak layak huni per kecamatan yang tinggi di antara kecamatan di Kabupaten Kebumen. Kecamatan yang termasuk wilayah prioritas 1 adalah Ambal, Pejagoan, Mirit, Rowokele, Sadang, dan Karanggayam.



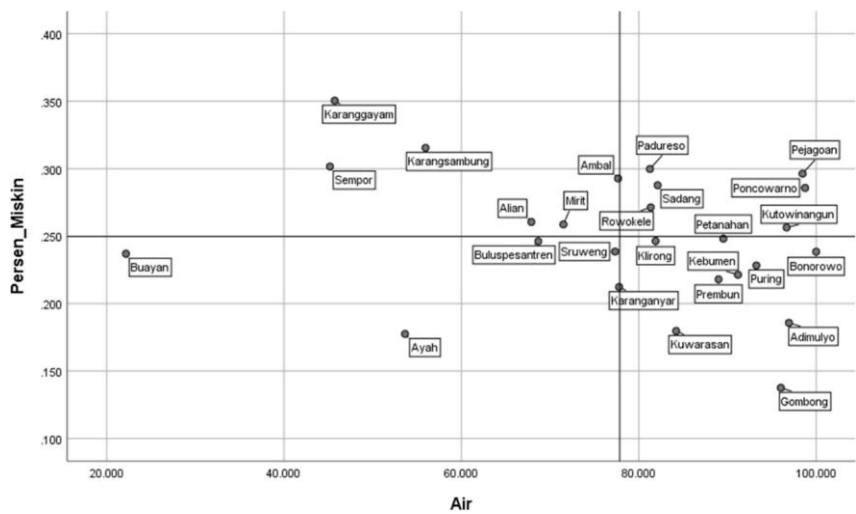
Gambar III.3. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin dan Persentase Rumah Tidak Layak Huni per Kecamatan
 Sumber: Pendataan Potensi Desa BPS Kabupaten Kebumen, 2024



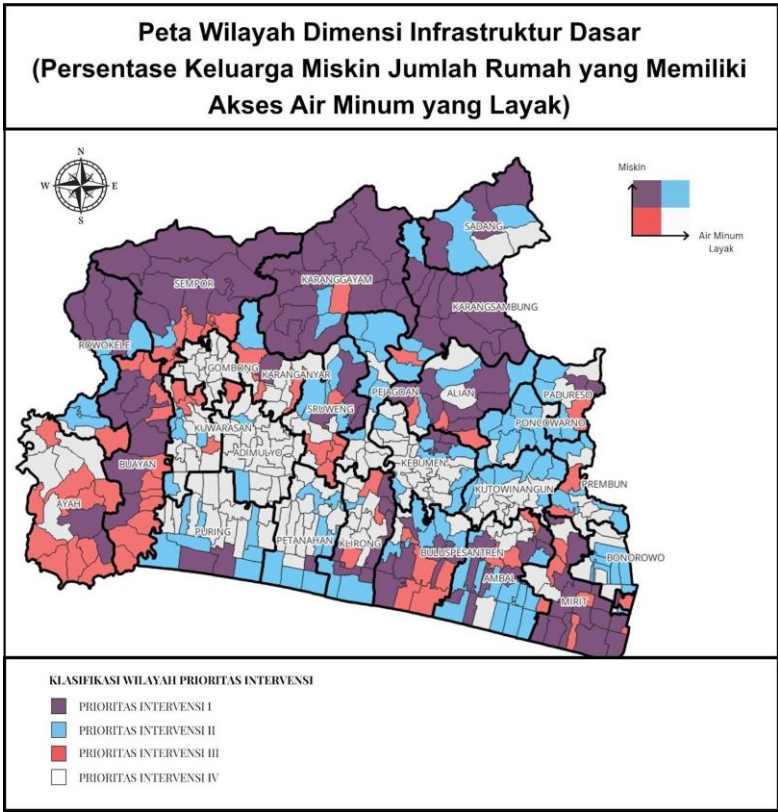
Gambar III.4. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Rumah Tidak Layak Huni
 Sumber : Pendataan Potensi Desa BPS Kabupaten Kebumen,2024

Indikator kedua dimensi infrastruktur dasar disusun dari persentase keluarga miskin dan persentase akses air minum layak per kecamatan di Kabupaten Kebumen. Hasil analisis disajikan melalui analisis empat kuadran (Gambar III.5.) dan peta prioritas wilayah (Gambar III.6.). Kecamatan yang menjadi prioritas 1 adalah kecamatan dengan persentase keluarga miskin tinggi dan persentase akses air minum layak per kecamatan yang rendah di antara kecamatan di Kabupaten Kebumen. Kecamatan yang termasuk

wilayah prioritas 1 adalah Karanggayam, Sempor, Karangsembung, Alian, Mirit, dan Ambal.



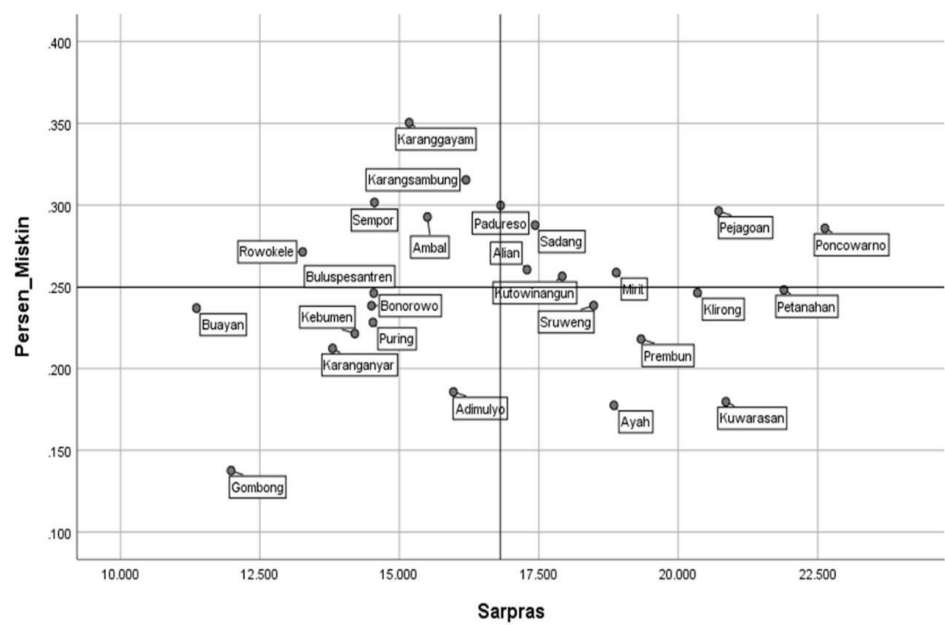
Gambar III.5. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin dan Persentase Akses Air Minum Layak per Kecamatan
Sumber: Pendataan Potensi Desa BPS Kabupaten Kebumen, 2024



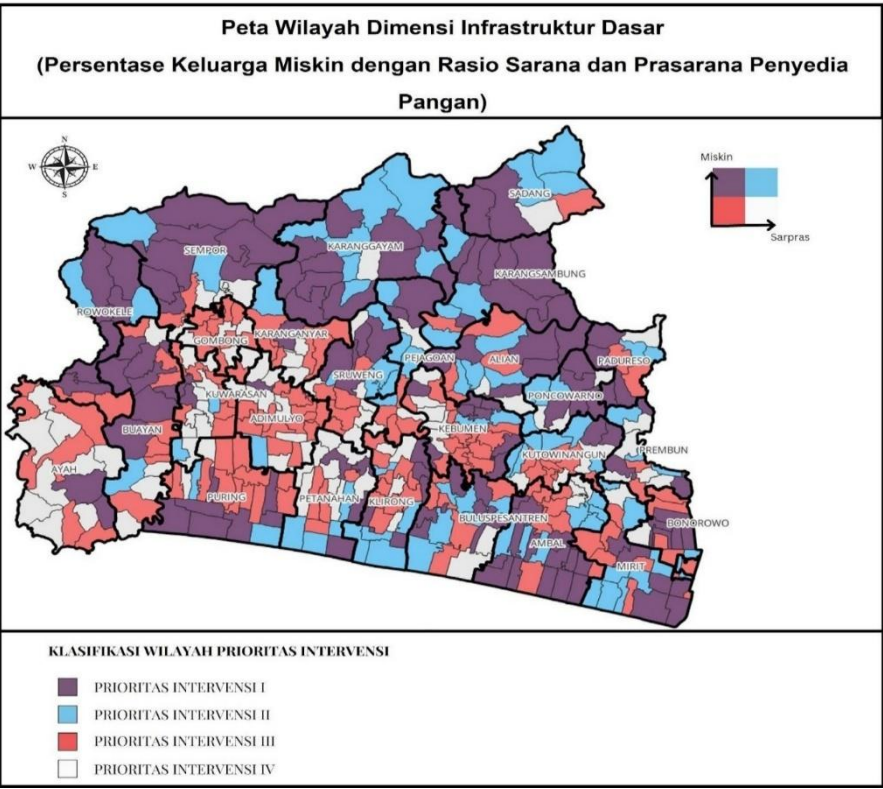
Gambar III.6. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Akses Air Minum Layak
Sumber: Pendataan Potensi Desa BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Indikator ketiga pada dimensi infrastruktur dasar disusun dari persentase keluarga miskin dan rasio sarana prasarana penyedia pangan per kecamatan di Kabupaten Kebumen. Hasil analisis disajikan melalui analisis empat kuadran (Gambar III.7.) dan peta prioritas wilayah (Gambar III.8.). Kecamatan yang menjadi prioritas 1 adalah kecamatan dengan persentase keluarga miskin tinggi dan rasio sarana prasarana penyedia pangan per kecamatan yang rendah di antara kecamatan di Kabupaten Kebumen. Kecamatan yang

termasuk wilayah prioritas 1 adalah Karanggayam, Karangsambung, Ambal, Sempor, Padureso dan Rowokele.



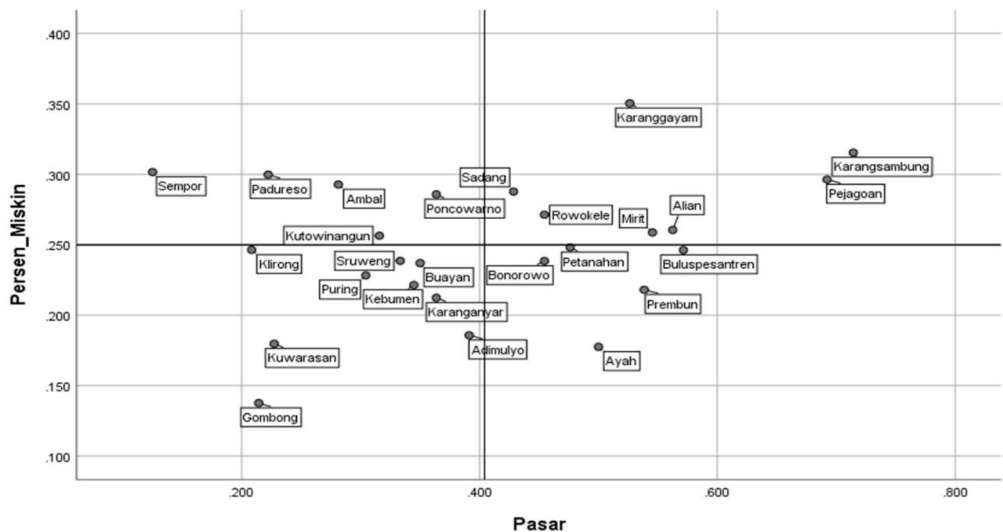
Gambar III.7. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin dan Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan per Kecamatan
Sumber: Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)



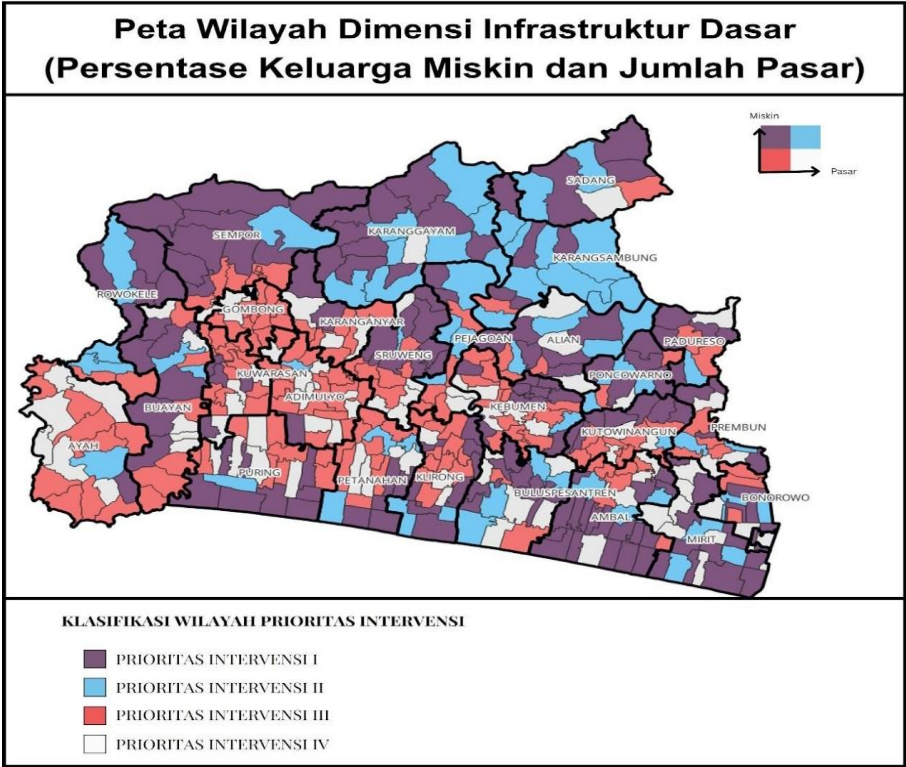
Gambar III.8. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan
Sumber: Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

Indikator keempat pada dimensi infrastruktur dasar disusun dari persentase keluarga miskin dan rasio jumlah pasar terhadap jumlah desa per kecamatan di Kabupaten Kebumen, Hasil analisis disajikan melalui analisis empat kuadran (Gambar III.9.) dan peta prioritas wilayah (Gambar III.10.). Kecamatan yang menjadi prioritas 1 adalah kecamatan dengan persentase keluarga miskin yang tinggi

dan rasio jumlah pasar terhadap jumlah desa per kecamatan yang rendah di antara kecamatan di Kabupaten Kebumen. Kecamatan yang termasuk wilayah prioritas 1 adalah Sempor, Padureso, Ambal, Kutowinangun dan Poncowarno.



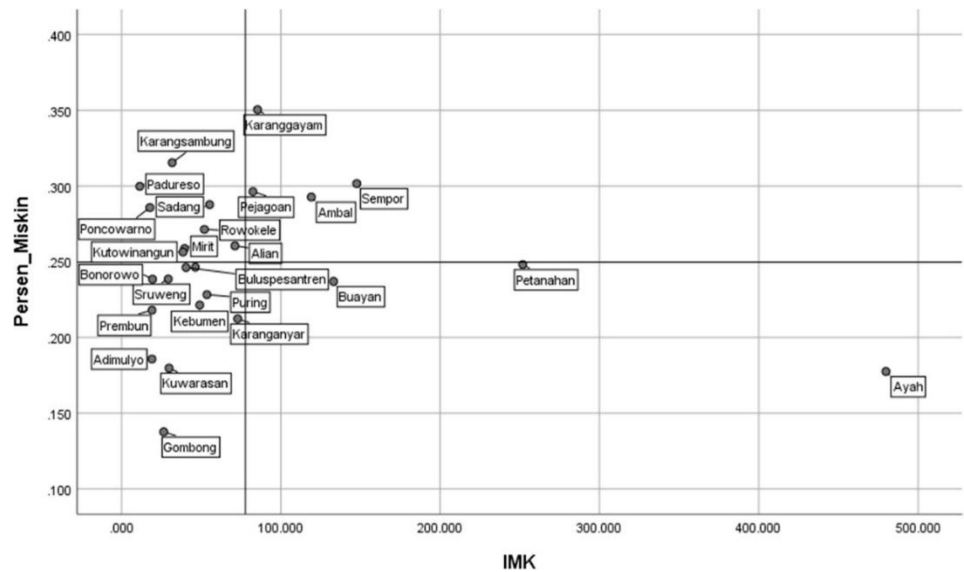
Gambar III.9. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin dan Rasio Jumlah Pasar terhadap Jumlah Desa
Sumber: Pendataan Potensi Desa BPS Kabupaten Kebumen, 2024



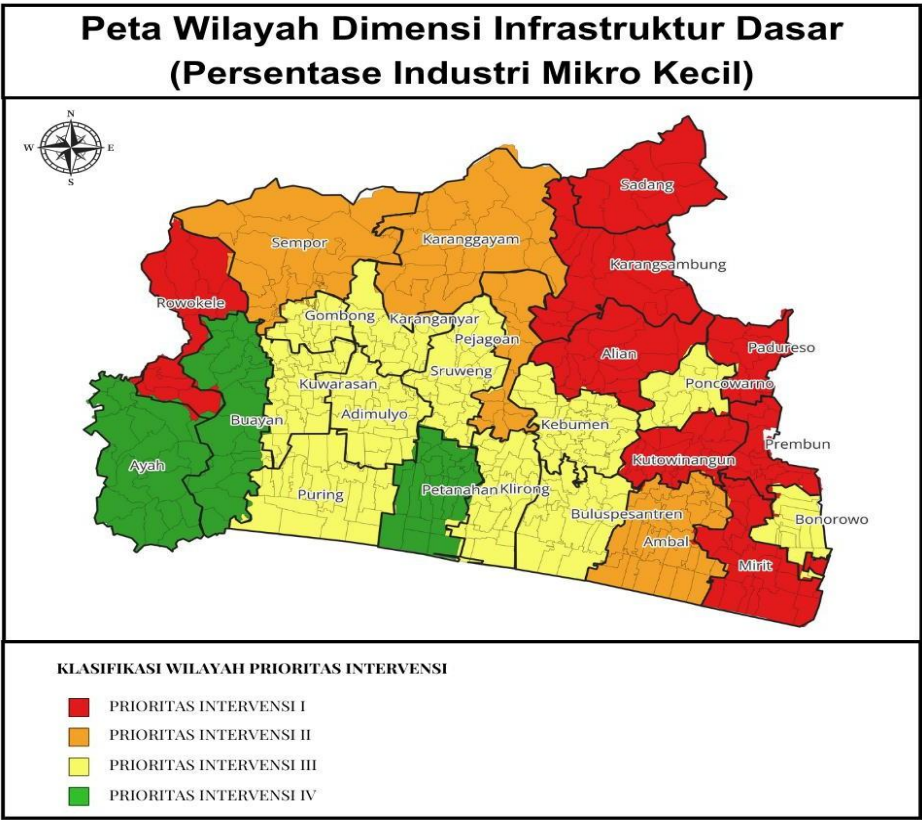
Gambar III.10. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Rasio Jumlah Pasar terhadap Jumlah Desa
Sumber: Pendataan Potensi Desa BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Indikator kelima pada dimensi infrastruktur dasar disusun dari persentase keluarga miskin dan rata-rata jumlah industri mikro kecil per kecamatan di Kabupaten Kebumen. Hasil analisis disajikan melalui analisis empat kuadran (Gambar III.11.) dan peta prioritas wilayah (Gambar III.12.). Kecamatan yang menjadi prioritas I adalah kecamatan dengan persentase keluarga miskin tinggi dan rata-rata

jumlah industri mikro kecil per kecamatan yang rendah di antara kecamatan di Kabupaten Kebumen. Kecamatan yang termasuk wilayah prioritas I adalah Karangsambung, Padureso, Sadang, Kutowinangun, Mirit, Rowokele, Alian dan Poncowarno.



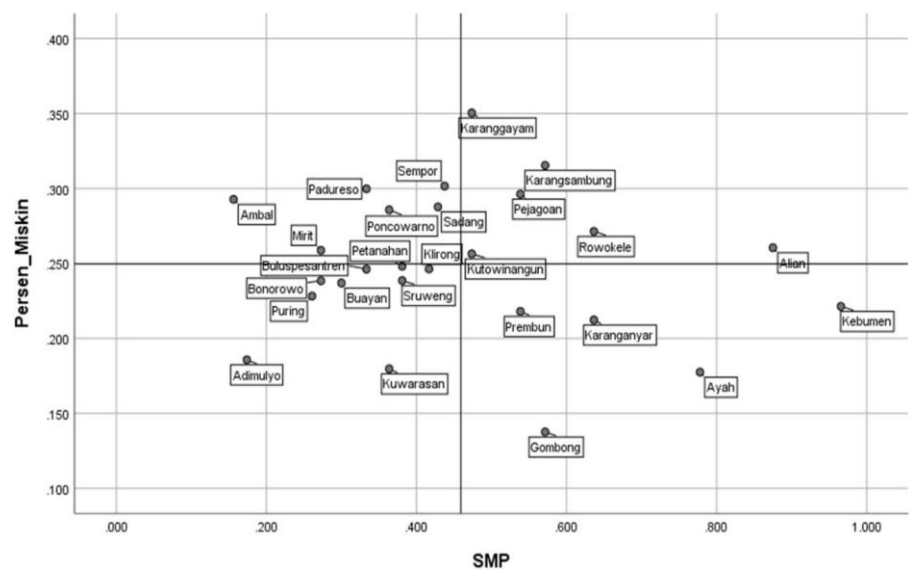
Gambar III.11. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin dan Rata-rata Jumlah Industri Mikro Kecil per Kecamatan
Sumber: Pendataan Potensi Desa BPS Kabupaten Kebumen, 2024



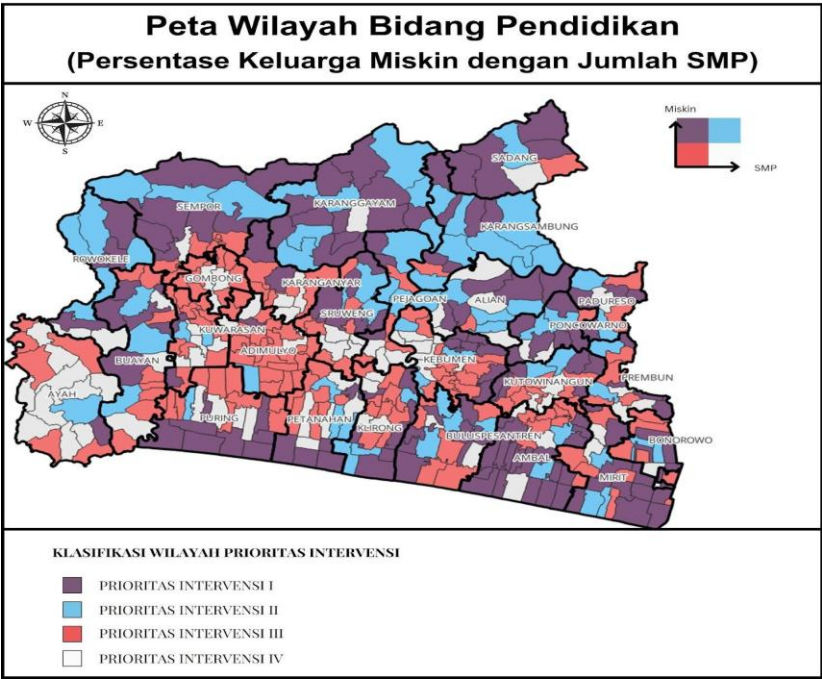
Gambar III.12. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Rata-rata Jumlah Industri Mikro Kecil
Sumber: Pendataan Potensi Desa BPS Kabupaten Kebumen, 2024

3.4.3. Dimensi Pendidikan

Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah berdasarkan dimensi pendidikan disusun dari persentase keluarga miskin dan rasio jumlah SMP terhadap jumlah desa per kecamatan di Kabupaten Kebumen. Hasil analisis disajikan melalui analisis empat kuadran (Gambar III.13.) dan peta prioritas wilayah (Gambar III.14.). Kecamatan yang menjadi prioritas I adalah kecamatan dengan persentase keluarga miskin tinggi dan rasio jumlah SMP terhadap jumlah desa per kecamatan yang rendah di antara kecamatan di Kabupaten Kebumen. Kecamatan yang termasuk wilayah prioritas I adalah Ambal, Mirit, Padureso, Poncowarno, Sadang dan Sempor.



Gambar III.13. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin dan Rasio Jumlah SMP terhadap Jumlah Desa per Kecamatan
Sumber: Pendataan Potensi Desa BPS Kabupaten Kebumen, 2024

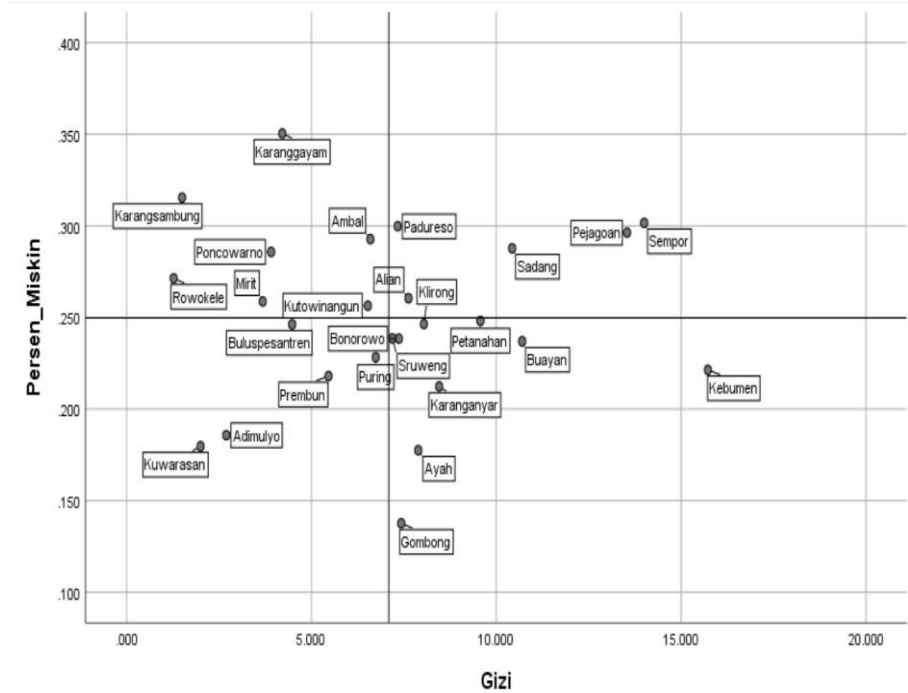


Gambar III.14. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin dengan Jumlah SMP
Sumber: Pendataan Potensi Desa BPS Kabupaten Kebumen, 2024

3.4.4. Dimensi Kesehatan

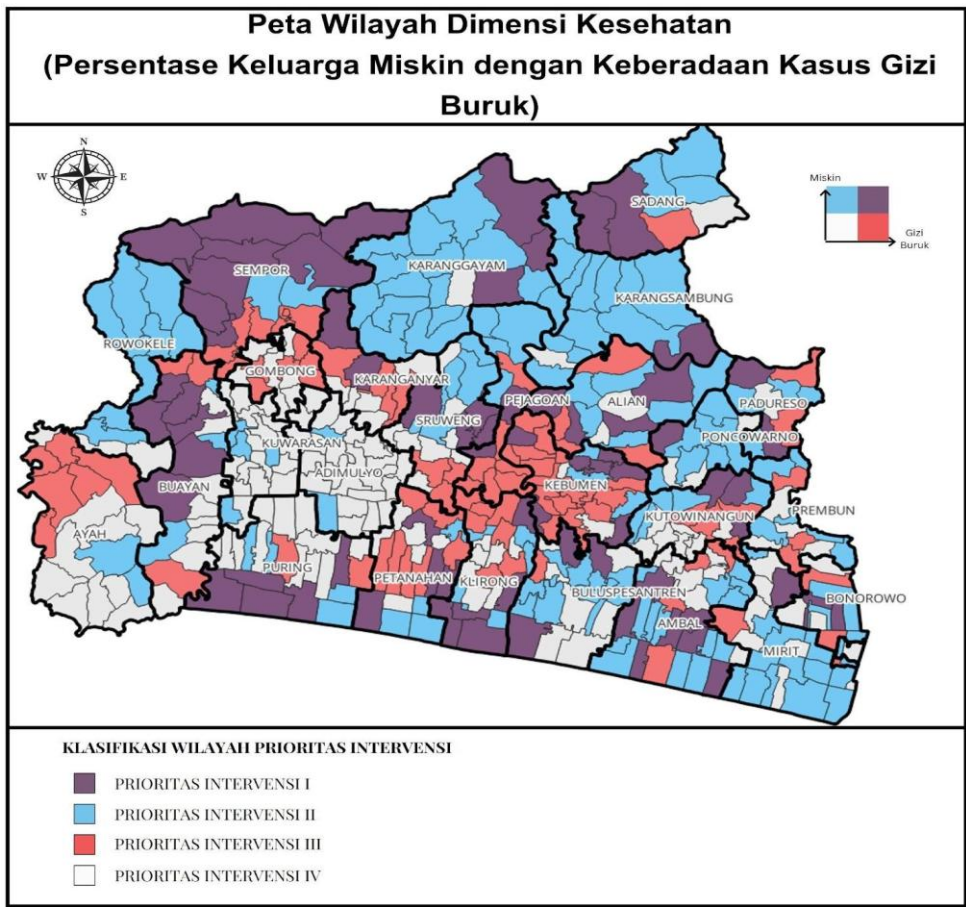
Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah di dimensi kesehatan disusun dari dua indikator yaitu indikator persentase keluarga miskin dengan rata-rata jumlah bayi gizi kurang dan indikator persentase keluarga miskin dengan persentase UHC per kecamatan. Hasil analisis disajikan ke dalam analisis empat kuadran (Gambar III.15. dan Gambar III.16.) dan peta prioritas wilayah (Gambar III.17. dan Gambar III.18.).

3.4.4.1. Rata-rata Jumlah Bayi Gizi Kurang



Gambar III.15. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin dan Rata-rata Jumlah Bayi Gizi Kurang per Kecamatan
Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

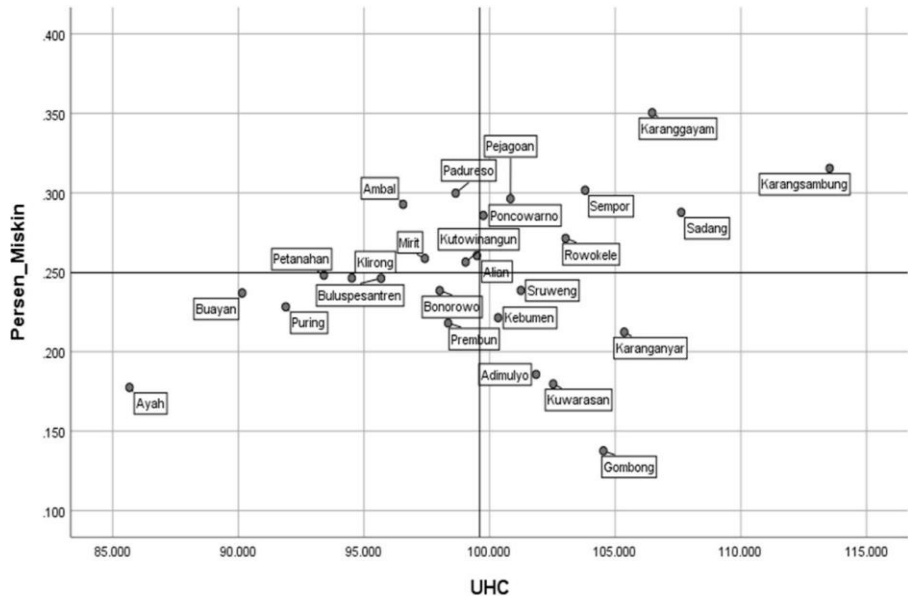
Berdasarkan indikator pertama, kecamatan dengan prioritas I adalah kecamatan dengan persentase keluarga miskin dan rata-rata jumlah bayi gizi kurang per kecamatan yang secara relatif terbesar di antara kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Kebumen. Secara kewilayahan, kecamatan-kecamatan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan di bidang kesehatan (Gambar III.15. analisis kuadran dan Gambar III.16. peta wilayah dimensi kesehatan) adalah Kecamatan Padureso, Alian, Sadang, Pejagoan dan Sempor.



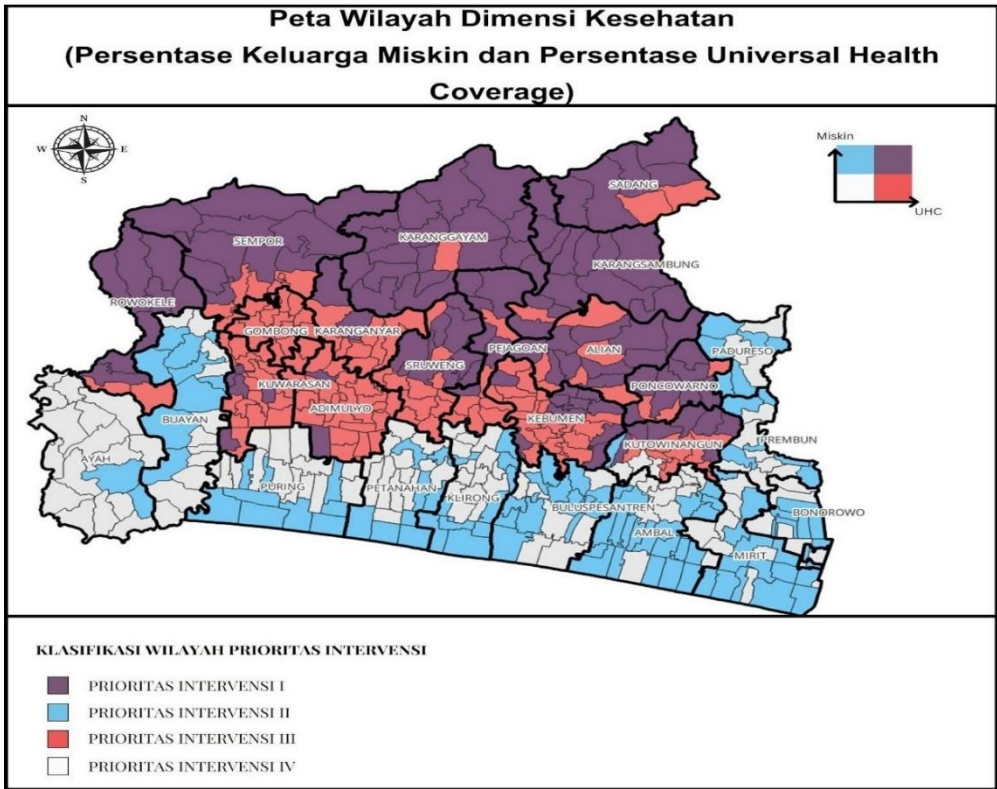
Gambar III.16. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Rata-rata Jumlah Bayi Gizi Kurang
Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

3.4.4.2. Persentase UHC Per Kecamatan

Berdasarkan indikator kedua, kecamatan dengan prioritas I adalah kecamatan dengan persentase keluarga miskin yang secara relatif tertinggi dan persentase UHC yang secara relatif terendah di antara kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Kebumen. Secara kewilayahan, kecamatan-kecamatan yang merupakan lokasi terpilih untuk prioritas intervensi kemiskinan di bidang kesehatan (Gambar III.17. analisis kuadran dan Gambar III.18. peta bidang kesehatan berdasarkan indikator kedua) adalah Kecamatan Ambal, Mirit, Padureso, Kutowinangun dan Alian.



Gambar III.17. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin dan Persentase UHC per Kecamatan
 Sumber: Dinsos P3A, Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

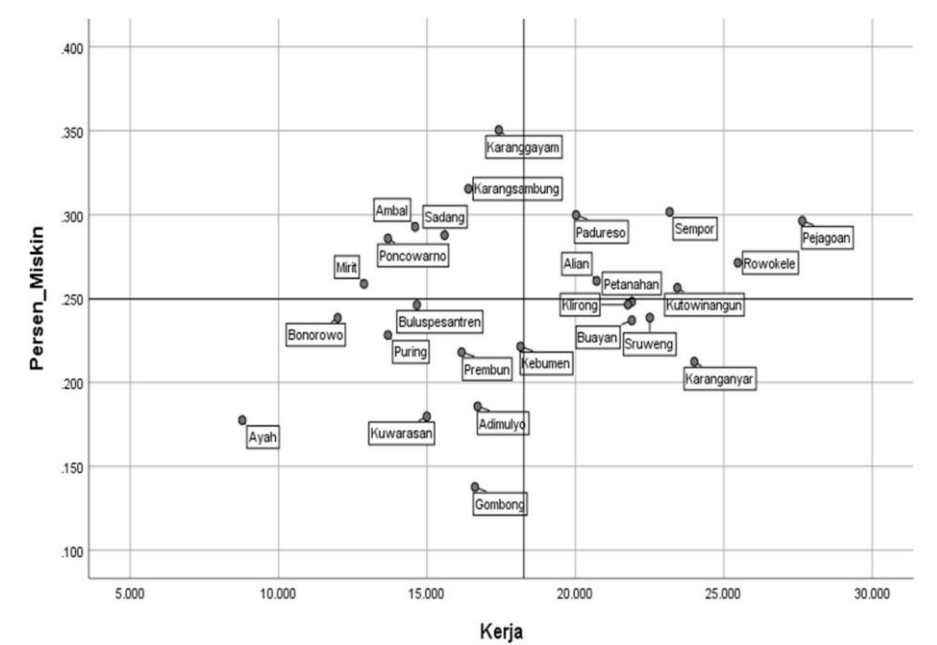


Gambar III.18. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin dan Persentase UHC per Kecamatan
 Sumber: Dinsos P3A, Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

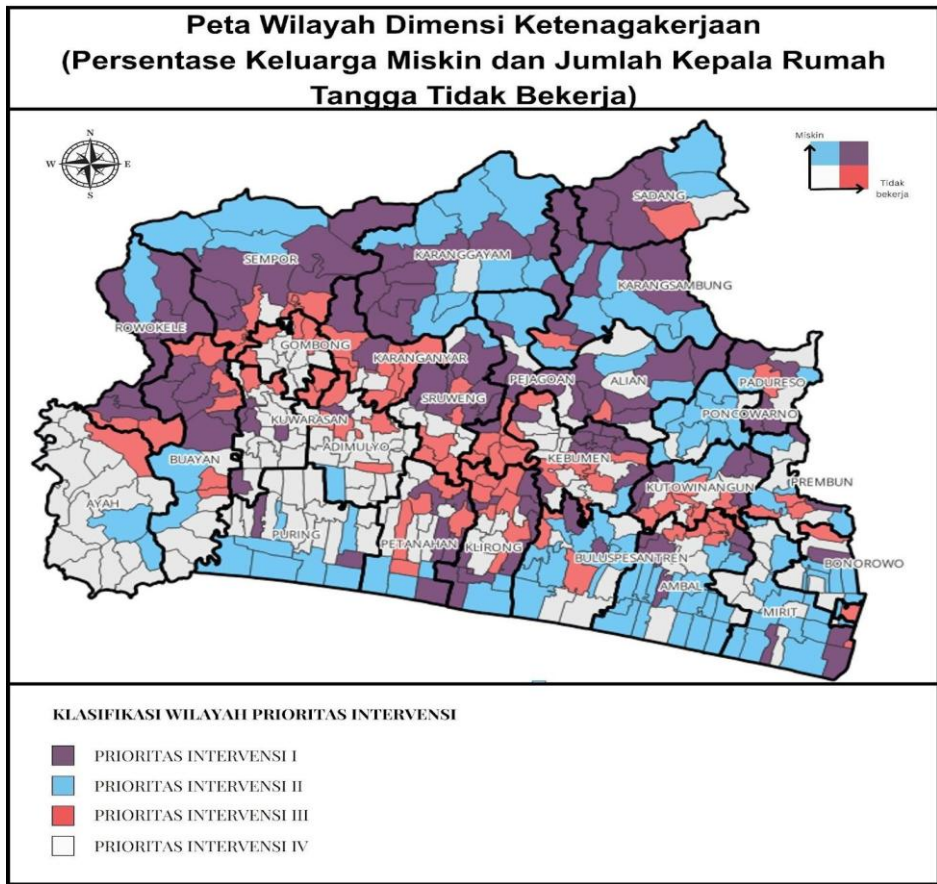
3.4.5. Dimensi Ketenagakerjaan

Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah berdasarkan dimensi ketenagakerjaan disusun dari persentase keluarga miskin dan persentase kepala keluarga tidak bekerja per kecamatan di Kabupaten Kebumen. Hasil analisis disajikan melalui analisis empat kuadran (Gambar III.19. dan peta prioritas wilayah (Gambar III.20.)). Kecamatan yang menjadi prioritas I adalah kecamatan dengan persentase keluarga miskin tinggi dan persentase kepala keluarga

tidak bekerja per kecamatan yang tinggi di antara kecamatan di Kabupaten Kebumen, Kecamatan yang termasuk wilayah prioritas I adalah Padureso, Alian, Kutowinangun, Sempor, Rowokele, dan Pejagoan.



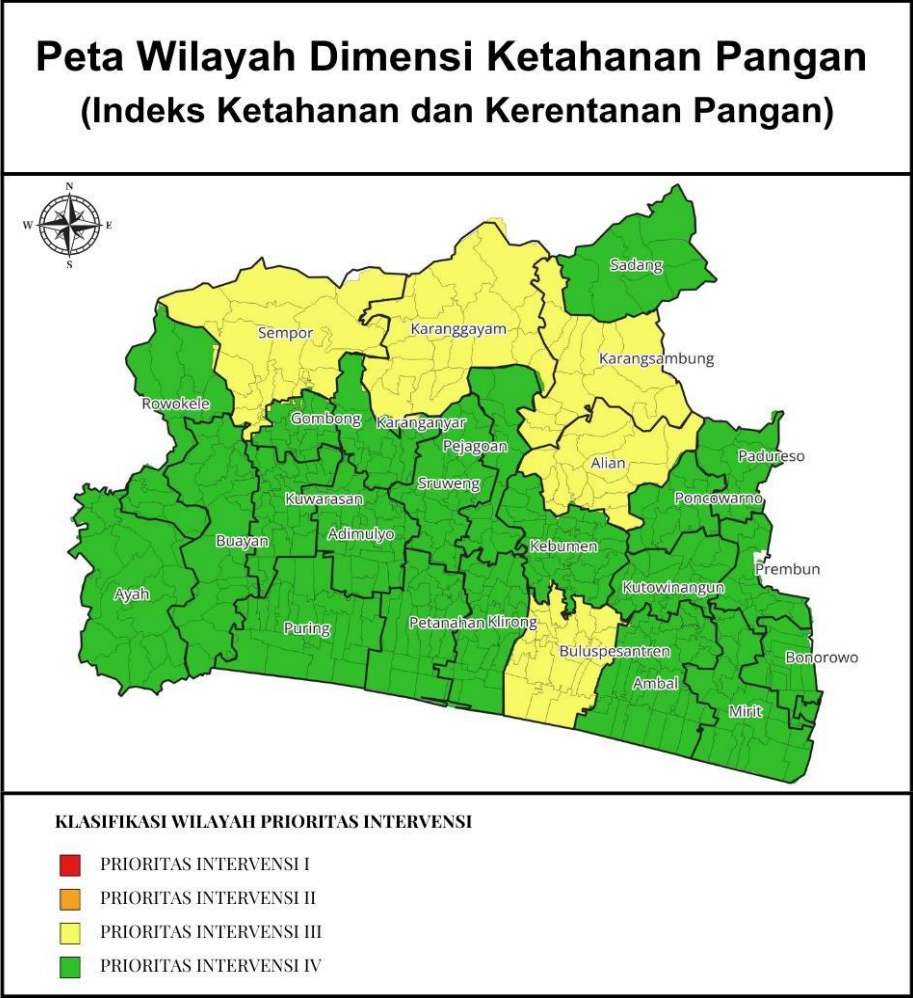
Gambar III.19. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Keluarga Miskin dan Persentase Kepala Keluarga Tidak Bekerja per Kecamatan
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024



Gambar III.20. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Kepala Keluarga Tidak Bekerja
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

3.4.6. Dimensi Ketahanan Pangan

Analisis terhadap lokasi prioritas wilayah berdasarkan dimensi ketahanan pangan disusun dari Indeks Ketahanan Pangan per kecamatan di Kabupaten Kebumen. Hasil analisis disajikan melalui peta prioritas wilayah (Gambar III.21). Kecamatan yang menjadi prioritas I adalah kecamatan dengan skor indeks lebih kecil dari 41,53. Kecamatan yang menjadi prioritas II adalah kecamatan dengan skor indeks di antara 41,52 dan 51,43. Kecamatan yang menjadi prioritas III adalah kecamatan dengan skor indeks di antara 51,42 dan 59,59. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada kecamatan yang termasuk prioritas I dan II, Sementara kecamatan yang termasuk wilayah prioritas III adalah Alian, Buluspesantren, Karanggayam, Karangsambung dan Sempor.



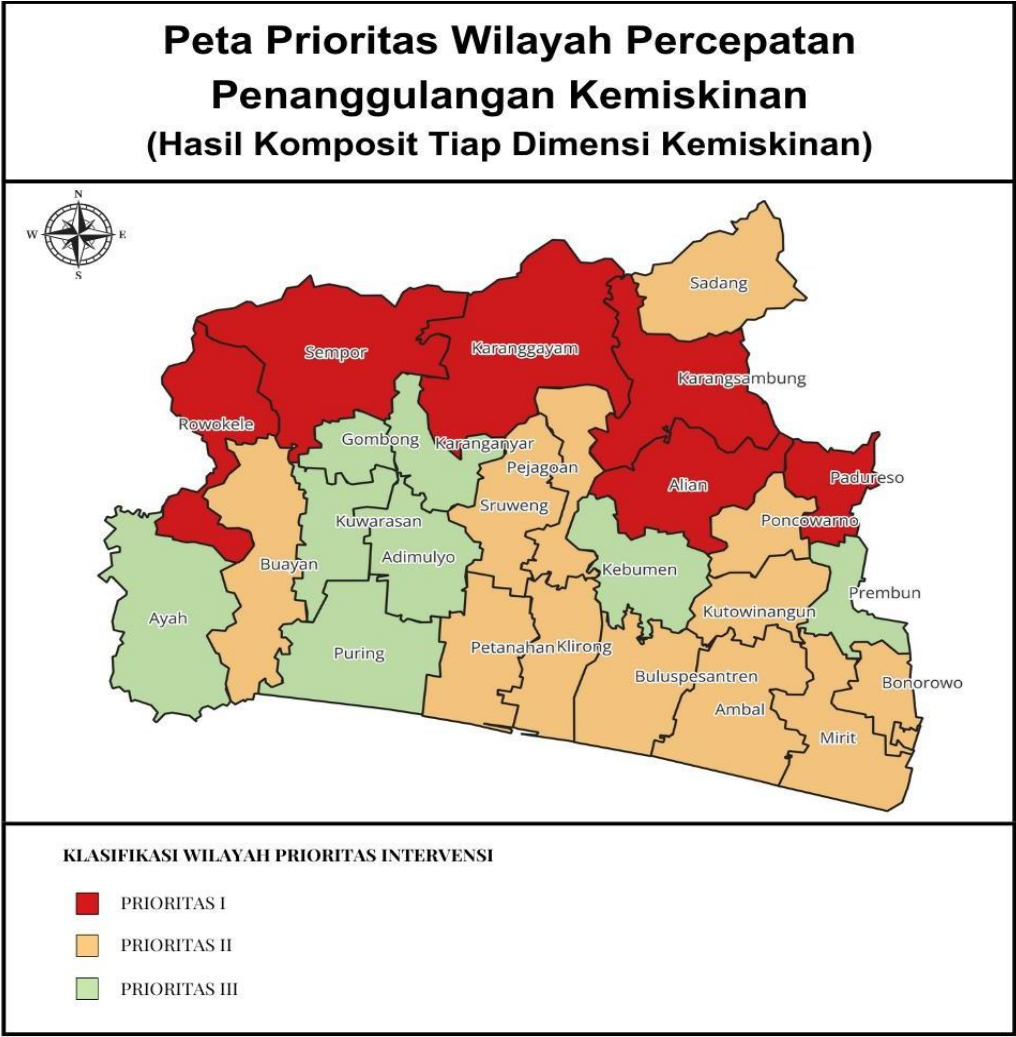
Gambar III.21. Pengelompokan Wilayah berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan
Sumber: Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

3.4.7. Hasil Komposit

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari jumlah penduduk sangat miskin-rentan miskin serta kondisi setiap dimensi kemiskinan. Penentuan hasil komposit prioritas wilayah ditentukan berdasarkan dimensi konsumsi, infrastruktur dasar, pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Dengan adanya wilayah prioritas intervensi yang mempresentasikan distribusi penduduk sangat miskin-rentan miskin, maka perlu upaya-upaya kolaboratif terkait intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Hasil komposit prioritas wilayah percepatan penanggulangan kemiskinan setiap dimensi kemiskinan di Kabupaten Kebumen membagi klasifikasi menjadi tiga, yaitu wilayah prioritas intervensi I, II, dan III. Kecamatan-kecamatan dengan prioritas intervensi I adalah kecamatan dengan kondisi setiap dimensi relatif pada kuadran I atau prioritas I (Tabel III.3.). Secara kewilayahan, kecamatan-kecamatan yang merupakan lokasi untuk prioritas intervensi kemiskinan (Tabel III.3. dan Gambar III.22.) adalah Kecamatan Padureso, Alian, Rowokele, Sempor, Karanggayam dan Karangsambung.



Gambar III.22. Peta Prioritas Wilayah Penanggulangan Kemiskinan
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Tabel III.3. Komposit Prioritas Wilayah Penanggulangan Kemiskinan Setiap Dimensi Kemiskinan

Kecamatan	Persentase Keluarga Miskin	Dimensi Konsumsi	Dimensi Infrastruktur Dasar					Dimensi Pendidikan	Dimensi Kesehatan		Dimensi Ketenagakerjaan	Dimensi Ketahanan Pangan	Hasil Komposit
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Akses Air Minum Layak	Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan	Rasio Jumlah Pasar terhadap Jumlah Desa	Rata-rata Jumlah Industri Mikro Kecil		Keberadaan bayi gizi kurang	Persentase UHC			
Ayah	34,9868	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III
Buayan	43,67218	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II
Puring	41,47972	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III
Petanahan	42,14709	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II
Klirong	42,38074	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II
Buluspesantren	47,52447	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II
Ambal	51,49928	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II
Mirit	47,21874	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II
Bonorowo	48,28911	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas II
Prembun	43,7667	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III
Padureso	52,79065	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas III	Prioritas I
Kutowinangun	45,43337	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas III	Prioritas II
Alian	47,09954	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas I
Poncowarno	52,28473	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II
Kebumen	36,21087	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III
Pejagoan	48,89923	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas III	Prioritas II
Sruweng	43,75651	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II

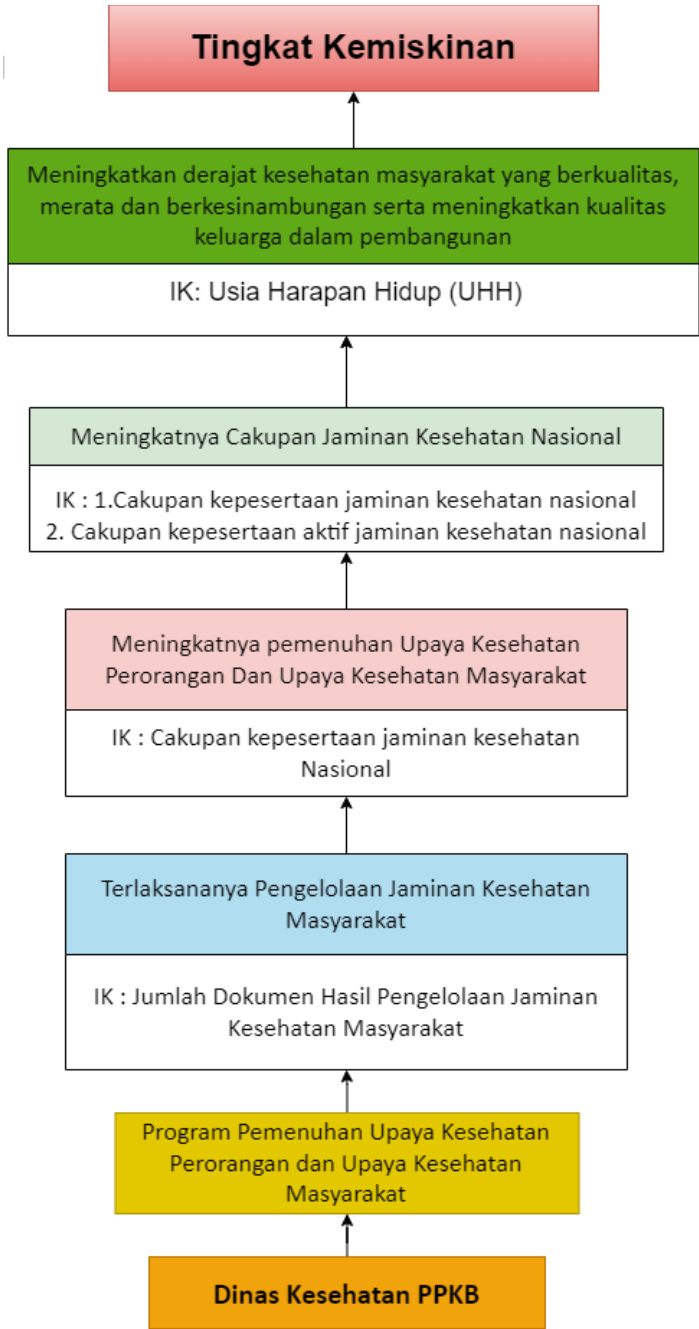
Kecamatan	Persentase Keluarga Miskin	Dimensi Konsumsi	Dimensi Infrastruktur Dasar					Dimensi Pendidikan	Dimensi Kesehatan		Dimensi Ketenaga-kerjaan	Dimensi Ketahanan Pangan	Hasil Komposit
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Akses Air Minum Layak	Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan	Rasio Jumlah Pasar terhadap Jumlah Desa	Rata- rata Jumlah Industri Mikro Kecil		Keberadaan bayi gizi kurang	Persentase UHC			
Adimulyo	34,89451	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III
Kuwarasan	35,41207	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III
Rowokele	50,55639	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas III	Prioritas I
Sempor	47,57016	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas I
Gombong	27,57535	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas III
Karanganyar	37,38016	Prioritas III	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas III
Karanggayam	57,38621	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas I
Sadang	48,09797	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas II
Karangsambung	52,58188	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas II	Prioritas I

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024 (data diolah)

3.5. Penyusunan *Theory of Change* (ToC)

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan data dan pemetaan kondisi kemiskinan, diperlukan suatu kerangka berpikir sistematis untuk merumuskan arah intervensi yang tepat. *Theory of Change* (ToC) merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara program/kegiatan, indikator kinerja, intervensi yang dilakukan, serta perubahan yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Secara lengkap ToC Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 tersaji sebagai berikut:

3.5.1. ToC Bidang Kesehatan

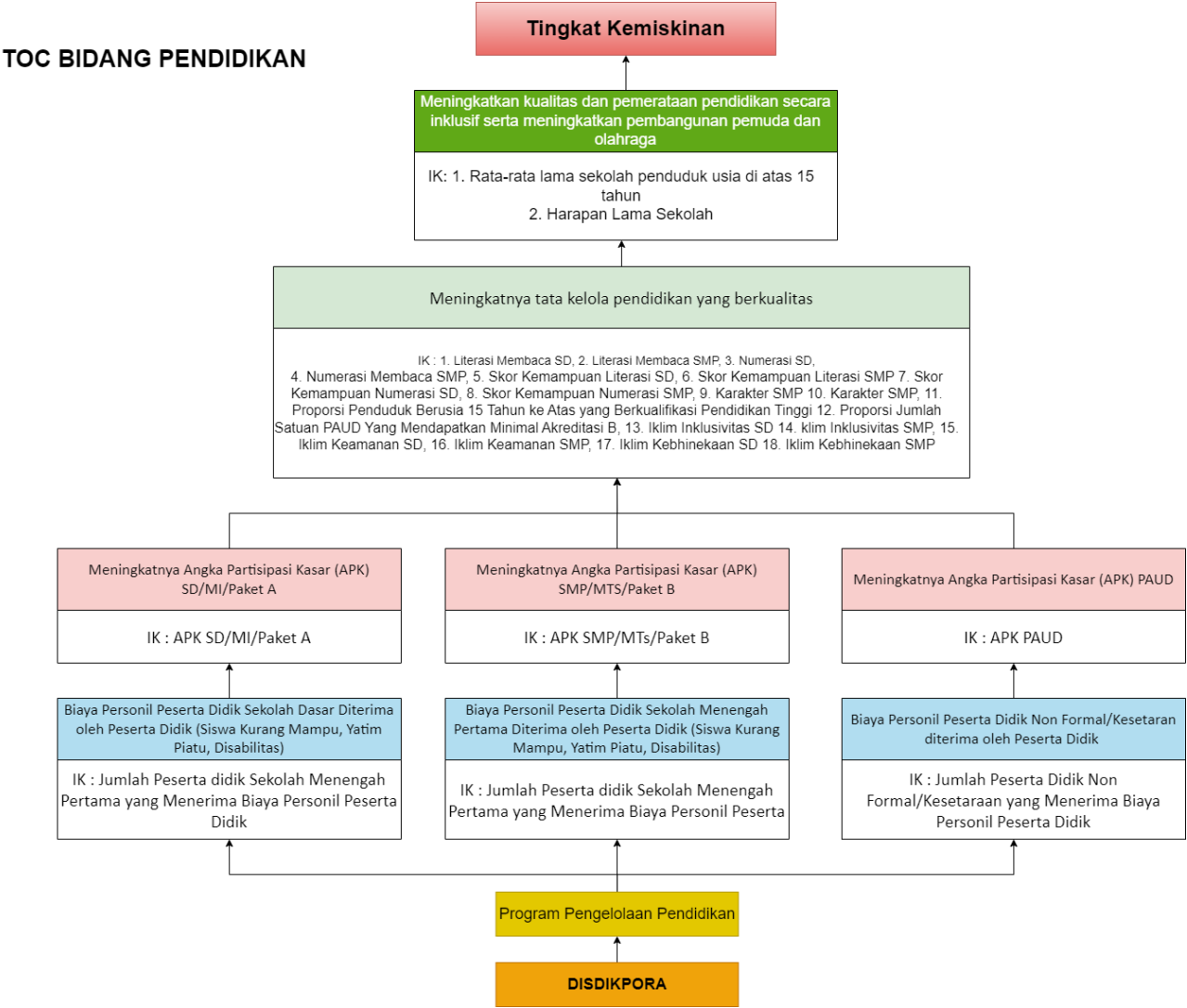


Gambar III.23. ToC Bidang Kesehatan

Gambar III.23 menunjukkan bahwa pelaksanaan program kesehatan oleh Dinas Kesehatan PPKB bertujuan meningkatkan

pengelolaan dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, yang berdampak pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (UHH) dan pada akhirnya berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.

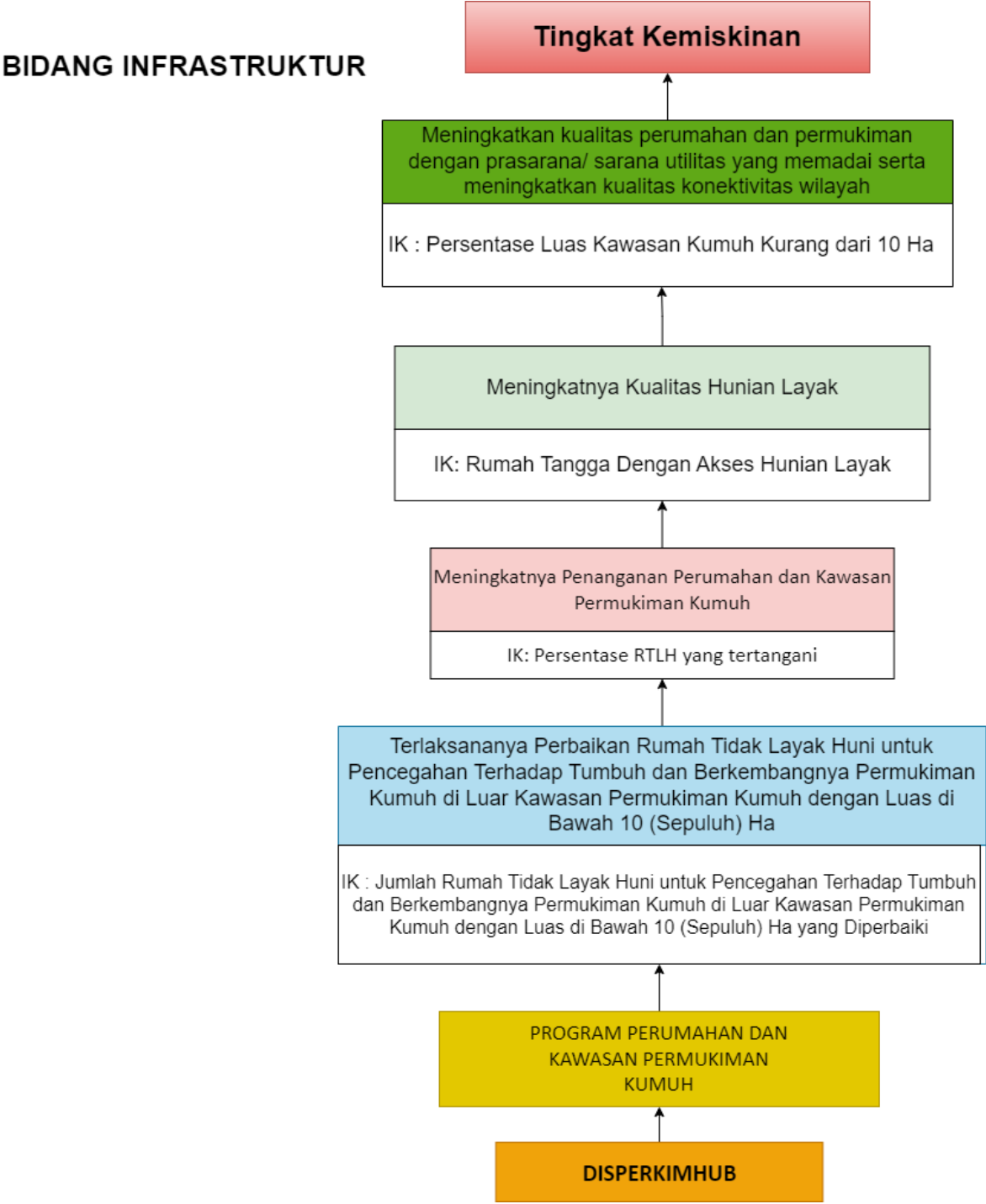
3.5.2. ToC Bidang Pendidikan



Gambar III. 24. ToC Bidang Pendidikan

Gambar III.24 menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui pemberian bantuan biaya personal peserta didik untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah (APK) pada jenjang sekolah dasar, menengah, dan PAUD. Peningkatan partisipasi tersebut berkontribusi pada perbaikan tata kelola dan kualitas pendidikan. Pada akhirnya, peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan ini mendukung penurunan tingkat kemiskinan.

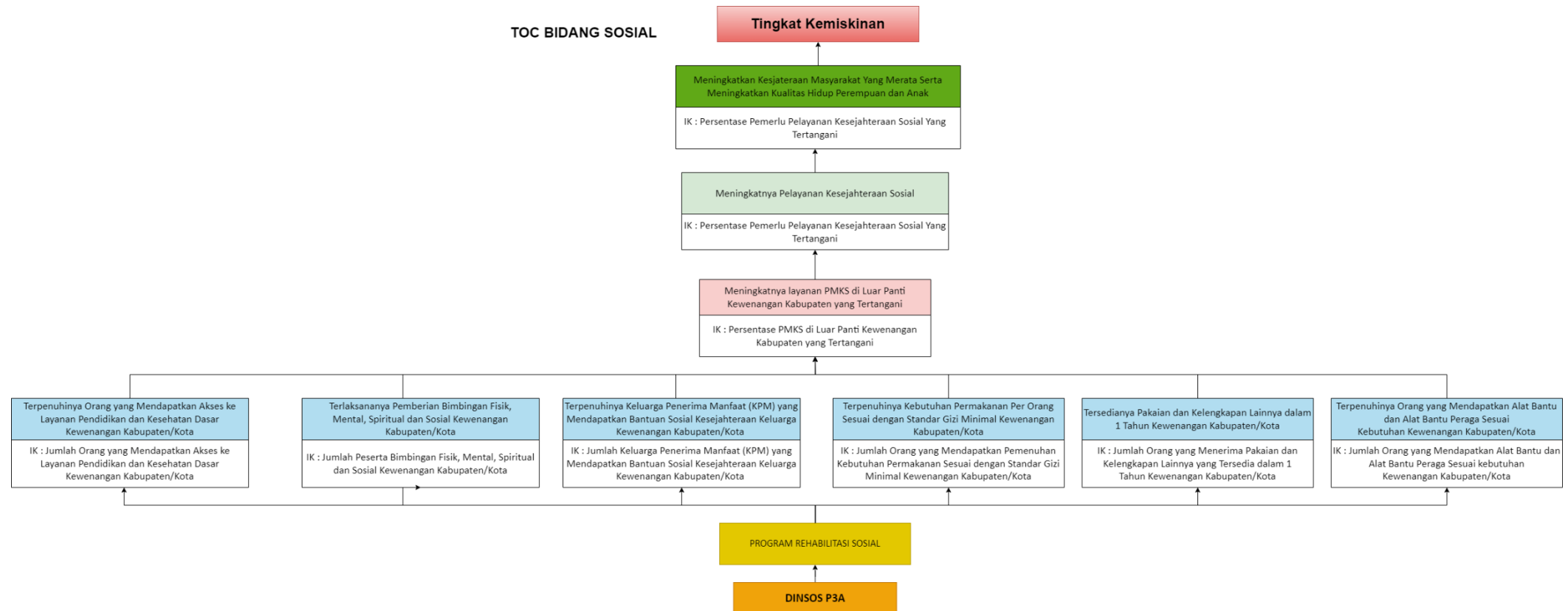
3.5.3. ToC Bidang Infrastruktur



Gambar III. 25. ToC Bidang Infrastruktur

Gambar III.25 menunjukkan bahwa pelaksanaan program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh oleh Disperkimhub melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) mendorong peningkatan penanganan kawasan kumuh. Intervensi tersebut berkontribusi pada meningkatnya kualitas hunian layak dan berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh. Pada akhirnya, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman ini mendukung penurunan tingkat kemiskinan.

3.5.4. ToC Bidang Sosial



Gambar III.26. ToC Bidang Sosial

Gambar III.26 menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial P3A bertujuan meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui pemenuhan akses layanan dasar, pemberian bantuan sosial, bantuan sandang, bantuan permakanan serta bantuan alat bantu bagi disabilitas. Pada akhirnya, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman ini mendukung penurunan tingkat kemiskinan.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1. Rekapitulasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Program intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen tersebar di perangkat daerah. Intervensi dilaksanakan melalui 3 strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Rekapitulasi Program Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030, terlampir sebagaimana dalam Tabel IV.1.

Program penanggulangan kemiskinan dibagi kedalam 3 strategi yang dikelompokkan dalam keterangan aktivitas riil yang meliputi aktivitas langsung, tidak langsung dan penunjang. Selama periode 2025-2030 anggaran penanggulangan kemiskinan berdasarkan tiga strategi mengalami fluktuatif. Rekapitulasi aktivitas riil program penanggulangan kemiskinan berdasarkan kelompok aktivitas langsung, tidak langsung dan penunjang sebagaimana Tabel IV.2. berikut:

Tabel IV.1. Rekapitulasi Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Strategi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030

Strategi Utama	Subkegiatan	Kerangka Pendanaan (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.057.840.000	1.130.000.000	1.130.000.000	1.130.000.000	1.130.000.000	1.130.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.938.832.793	1.535.074.600	2.025.791.000	2.025.791.000	2.025.791.000	2.025.791.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	83.786.000	689.000.000	692.000.000	692.000.000	694.000.000	694.000.000
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	43.053.136.482	71.414.858.000	80.577.750.135	86.470.775.404	87.002.740.832	89.422.953.791
	Penyediaan Permakanan	3.741.745.000	1.872.792.023	2.058.089.023	7.788.089.023	10.788.089.023	3.765.303.823
	Penyediaan Sandang	93.507.000	93.507.000	93.507.000	93.507.000	93.507.000	93.507.000
	Penyediaan Alat Bantu	66.177.900	66.177.000	96.177.000	71.177.000	96.285.220	96.285.220
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	187.580.000	187.580.000	187.580.000	187.580.000	187.580.000	187.580.000
	Penyediaan Permakanan	269.730.600	211.643.500	264.730.000	264.730.000	264.730.000	264.730.000
	Penyediaan Sandang	81.329.100	78.329.000	78.329.000	78.329.000	78.329.000	78.329.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.378.853.400	3.678.319.000	128.000.000	1.015.800.000	1.015.800.000	1.138.000.000
	Fasilitasi Bantuan Hukum	40.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	720.000.000	-	-	-	-	-

Strategi Utama	Subkegiatan	Kerangka Pendanaan (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin dan Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	81.802.600	210.302.200	116.683.200	21.574.980	21.574.980	21.574.980
Meminimalkan kantong-kantong kemiskinan dan Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan	Perbaikan RTLH untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	534.862.000	2.212.576.000	2.085.704.800	2.085.704.800	2.094.761.848	2.103.909.466
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	98.009.000	108.500.000	188.000.000	189.000.000	191.000.000	196.000.000
	Pengendalian dan distribusi perekonomian	43.505.124	52.500.000	77.000.000	77.000.000	77.000.000	77.000.000
	Pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	595.185.500	1.720.000.000	2.720.000.000	2.720.000.000	2.720.000.000	2.720.000.000

Strategi Utama	Subkegiatan	Kerangka Pendanaan (Rp)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/Kota	124.004.000	-	-	-	-	-
Total		58.189.886.499	85.300.158.323	92.558.341.158	104.950.058.207	108.520.188.903	104.053.964.280

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029

Tabel IV.2. Rekapitulasi Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kelompok Aktivitas Langsung, Penunjang dan Tidak Langsung Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030

Aktivitas Real	Alokasi Anggaran					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Langsung	13.741.184.393	9.791.724.323	6.909.886.223	13.407.578.003	16.434.686.223	9.534.101.023
Tidak Langsung	1.130.047.500	3.932.576.000	4.805.704.800	4.805.704.800	4.814.761.848	4.823.909.466
Penunjang	43.318.654.606	71.575.858.000	80.842.750.135	86.736.775.404	87.270.740.832	89.695.953.791
Total Aktivitas Langsung dan Tidak Langsung	14.871.231.893	13.724.300.323	11.715.591.023	18.213.282.803	21.249.448.071	14.358.010.489

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029

Keterangan

- Langsung

:

Aktivitas kegiatan yang secara langsung terima dan dirasakan oleh masyarakat miskin.
- Tidak Langsung

:

Aktivitas kegiatan yang tidak secara langsung dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat tetapi berdampak pada penurunan kemiskinan.
(Contoh : Pemberian modal pada BUMD untuk pemberdayaan masyarakat, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Rehabilitasi Jalan, Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas Baru)
- Penunjang

:

Kegiatan lain yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pada aktivitas riil langsung dan tidak langsung.
(Contoh : Rapat Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi)

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dalam penerapan rencana penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan guna memastikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, diperlukan data dan informasi yang tepat, akurat, serta lengkap. Tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah untuk menilai perkembangan dan kualitas pelaksanaan kegiatan program mengidentifikasi masalah atau potensi masalah yang mungkin muncul dan menilai keberhasilan program atau kegiatan tersebut dari segi keluaran (output), kegunaan, dampak, serta pencapaian kinerja penanggulangan kemiskinan. Pemantauan berfungsi sebagai proses untuk memperoleh umpan balik secara berkelanjutan pada setiap program atau kegiatan yang direncanakan termasuk untuk mengetahui tantangan yang dihadapi, faktor pendukung maupun penghambat serta dampak positif atau negatif dari pelaksanaannya. Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan program tercapai dan mengungkapkan masalah kinerja yang muncul yang dapat menjadi dasar untuk perbaikan di masa mendatang.

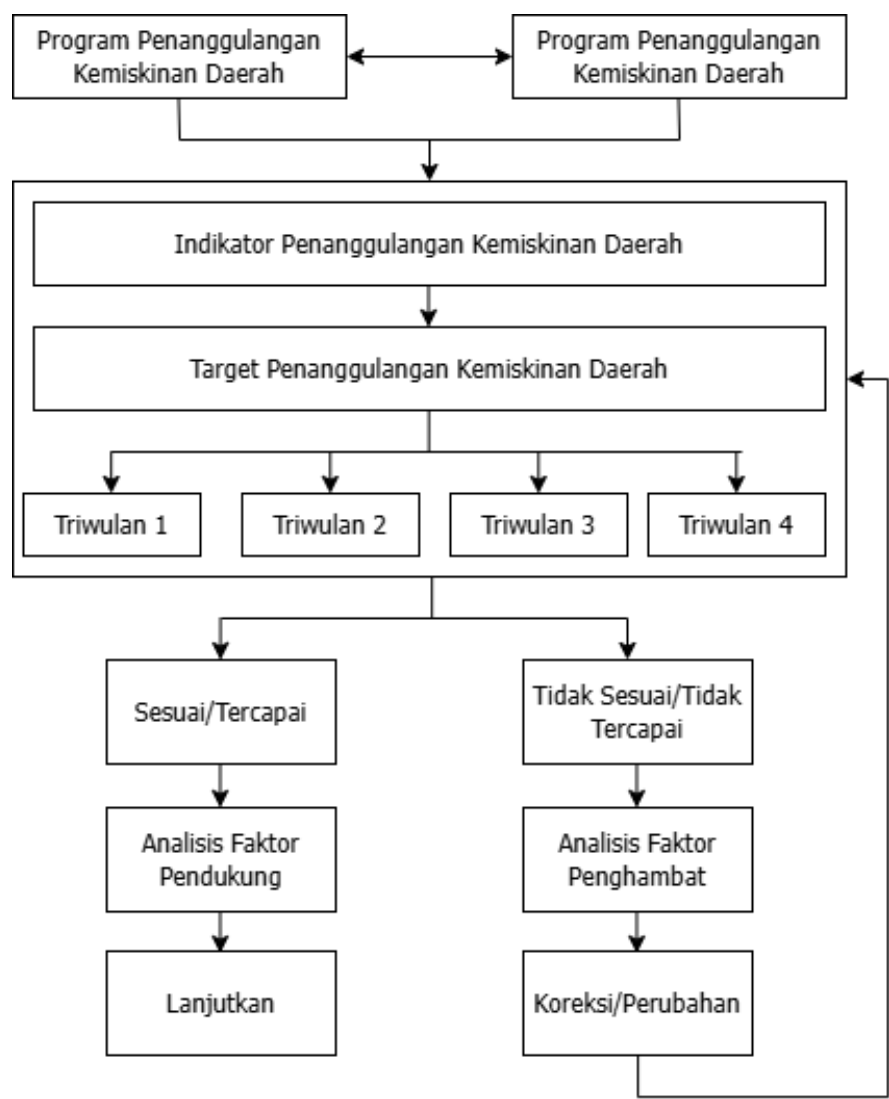
5.1. Alur Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dibagi menjadi beberapa tahap: (i) persiapan, (ii) pelaksanaan, (iii) pelaporan, dan (iv) tindak lanjut. Pada tahap persiapan instrumen pemantauan disiapkan sesuai dengan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta capaian indikator dalam periode tertentu (misalnya per triwulan) bersamaan dengan pemantauan capaian program prioritas perangkat daerah. Tahap pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan mengevaluasi kinerja masing-masing indikator di setiap program dan kegiatan dalam periode waktu tertentu. Pada tahap pelaporan, hasil analisis mencerminkan tingkat kesesuaian dan pencapaian program terhadap target yang ditetapkan dilengkapi dengan identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Tindak lanjut pun dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Evaluasi tahunan bertujuan untuk membandingkan target dengan realisasi pada setiap indikator kinerja dari program dan kegiatan. Tingkat pencapaian diukur pada setiap program dan kegiatan untuk menentukan apakah berada pada kategori tinggi, sedang atau rendah diikuti dengan

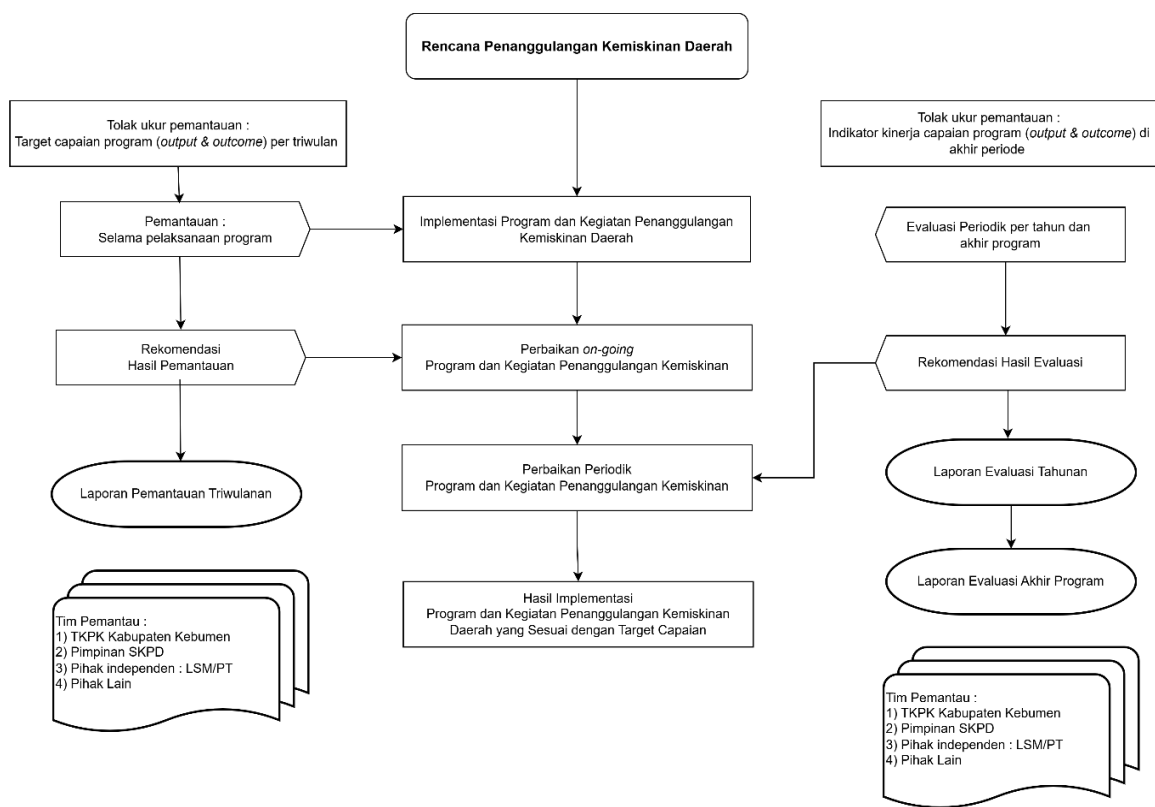
analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian target (Gambar V.1).

Secara umum pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk semua kebijakan dan program yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Adapun fasilitas pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan.



Gambar V.1. Alur Pemantauan dan Evaluasi

Alur di atas menggambarkan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah yang dimulai dari penetapan indikator dan target, kemudian dipantau setiap triwulan. Hasil capaian dibandingkan dengan target untuk menentukan apakah program telah tercapai atau belum. Apabila tercapai, dilakukan analisis factor pendukung dan program dilanjutkan. Sedangkan apabila tidak tercapai, dilakukan analisis faktor penghambat untuk dilakukan koreksi atau perbaikan secara berkelanjutan.



Gambar V.2. Alur Monitoring dan Evaluasi

5.2. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

Secara sederhana instrumen pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana tertera pada tabel V.1 berikut.

Tabel V.1. Instrumen Pemantauan

No	Strategi/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Triwulan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tidak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Keterangan:

- Kolom (1) : berisi nomor
- Kolom (2) : berisi nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan perangkat daerah yang mendukung program penanggulangan kemiskinan
- Kolom (3) : berisi indikator program/ kegiatan/ subkegiatan perangkat daerah yang mendukung program penanggulangan kemiskinan
- Kolom (4) : berisi sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan
- Kolom (5) : berisi satuan sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan

- Kolom (6) : berisi target kinerja yang telah direncanakan di awal tahun anggaran
- Kolom (7) : berisi realisasi kinerja triwulan
- Kolom (8) : berisi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan
- Kolom (9) : berisi faktor pendorong pelaksanaan kegiatan
- Kolom (10) : berisi saran untuk tindak lanjut kegiatan

Adapun instrumen evaluasi seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel V.2. Instrumen Evaluasi

No	Strategi/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Sasaran	Satuan	Target Tahun	Realisasi Program/ Kegiatan pada Tahun n	Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Ketercapaian Program/ Kegiatan	Faktor Penghambat /Pendorong	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Keterangan:

- Kolom (1) : berisi nomor
- Kolom (2) : berisi nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan perangkat daerah yang mendukung program penanggulangan kemiskinan
- Kolom (3) : berisi indikator program/ kegiatan/ subkegiatan perangkat daerah yang mendukung program penanggulangan kemiskinan
- Kolom (4) : berisi sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan
- Kolom (5) : berisi satuan sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan
- Kolom (6) : berisi target kinerja yang telah direncanakan di awal tahun anggaran
- Kolom (7) : berisi realisasi program/kegiatan pada tahun n
- Kolom (8) : berisi target anggaran sampai akhir tahun perencanaan
- Kolom (9) : berisi realisasi anggaran sampai akhir tahun perencanaan
- Kolom (10) : berisi tingkat ketercapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dibagi menjadi tiga kelas: (i) tinggi, jika ketercapaian lebih atau sama dengan 100% (ii) sedang, jika ketercapaian antara 80-99% (iii) rendah, jika ketercapaian kurang dari 80%

- Kolom (11) : berisi identifikasi faktor penghambat dan/atau faktor pendorong
- Kolom (12) : berisi saran untuk tindak lanjut kegiatan

5.3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten Kebumen bersama instansi terkait untuk setiap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan cakupan sebagai berikut:

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di perangkat daerah terkait;
2. Evaluasi pelaksanaan program di masing-masing perangkat daerah terkait; dan
3. Evaluasi terhadap pencapaian indikator-indikator kemiskinan.

TKPK Kabupaten Kebumen juga berkoordinasi dengan TKPK Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan monitoring ini didasarkan pada prinsip objektivitas, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, ketepatan waktu, kesinambungan dan berfokus pada indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Sebagai dokumen perencanaan strategis. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program dan kegiatan yang berorientasi pada penurunan kemiskinan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan. Implementasi rencana ini memerlukan komitmen kuat dari Pemerintah Daerah, perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha serta masyarakat luas agar setiap intervensi mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Lebih lanjut, implementasi RPKD ini membutuhkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang konsisten sebagai dasar untuk melakukan penajaman kebijakan dan penyusunan langkah perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Kolaborasi antar sektor, peningkatan kualitas data, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi perlu terus diperkuat agar penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi yang berkembang.

Dengan tersusunnya dokumen ini, Pemerintah Daerah menegaskan komitmen untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari proses pembangunan yang inklusif. Semoga dokumen ini dapat memberikan arah yang jelas dan menjadi landasan bersama dalam rangka mewujudkan Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI